



ARAH KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Disampaikan dalam Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY Tahun 2017
Yogyakarta , 7 Maret 2016



PENDAHULUAN



MUSRENBANGNAS PENYUSUNAN RKP 2017

SEBAGAI FORUM PENYELARASAN



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum bersama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional yang ditujukan untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan (*top down planning*).

Pelaksanaan Forum Musrenbangnas ditujukan untuk mensinkronisasikan rencana pembangunan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dengan usulan/kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Namun demikian, pelaksanaan Forum Musrenbangnas kadang dianggap sebagai forum yang bersifat “seremonial” dengan tidak banyak kesepakatan yang dihasilkan.

Tidak banyaknya kesepakatan yang tercapai dalam pelaksanaan Musrenbangnas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas, sementara usulan/kebutuhan sangat banyak. Untuk itu Pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyusun **PRIORITAS PEMBANGUNAN**. Hanya rencana pembangunan yang benar-benar prioritas saja yang diusulkan dan dibahas dalam forum Musrenbangnas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif.

Prioritas pembangunan antara pusat dan daerah harus dapat diselaraskan mulai pada tahap penyusunan dokumen perencanaan.



PENEGASAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Amanat konstitusi menegaskan bahwa **ANGGARAN NEGARA** adalah **INSTRUMEN** untuk mencapai **tujuan nasional**.

Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh **TUJUAN** yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*).

Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan **EFISIENSI**, **EFEKTIVITAS** dan **KEADILAN** alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.

Proses perencanaan dan penganggaran adalah **OPTIMALISASI SUMBERDAYA** (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki **KUALITAS BELANJA**.



DASAR HUKUM



UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

• Pasal 12 ayat 2

- Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Pasal 4 ayat 3

- RKP merupakan **penjabaran dari RPJM Nasional**, memuat **prioritas pembangunan**, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk **kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif**.

UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Pasal 263 ayat 4

- RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, **prioritas pembangunan daerah**, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja pemerintah dan **Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**



PERMASALAHAN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada **Tugas dan Fungsi (*Tusi*)** dari K/L daripada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang efektif dan efisien.

Karena penekanan pada ***Tusi*** K/L, suatu proyek terpaksa dilakukan oleh berbagai K/L. Tanpa koordinasi yang efektif, maka suatu bagian proyek yang dikerjakan K/L - A telah selesai, namun bagian lain yang dikerjakan oleh K/L - B belum dimulai atau bahkan belum ada anggarannya. Contoh: Waduk terbangun namun saluran irigasi belum dimulai; sawah terdapat, namun air tidak pernah sampai.

Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya **duplikasi program**. Program yang sama dilaksanakan oleh berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektivitas yang berbeda. Contoh: program bedah runtu dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Anggaran tidak fokus dan tersebar tipis pada setiap ***Tusi*** dan cenderung dibagi rata tanpa indikator atau formula yang tepat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur misalnya, cenderung dibagi rata kepada semua daerah tanpa dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.

Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.



KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN :

Money Follow Program



ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

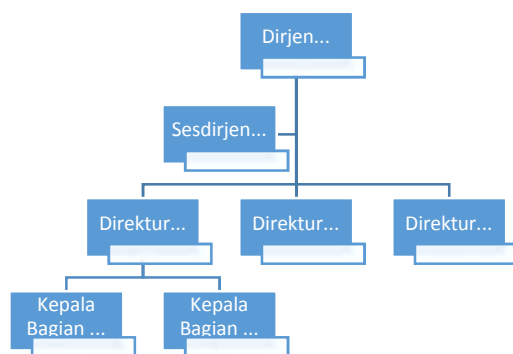


Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (**tusi**) harus dibiayai secara merata.

money follow function



Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Semua nomenklatur Proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Bukan Dirjen ke Bawah, Presiden Jokowi Tegaskan Menteri Kendalikan Penggunaan Anggaran



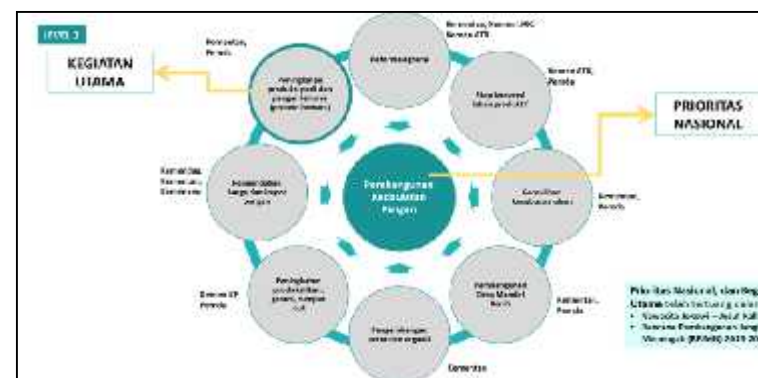
Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (10/2) Rabu sore. (Foto: Humas/Den)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Anggaran 2017. Presiden menegaskan, para menteri harus betul-betul mengendalikan arah penggunaan anggaran, memberikan (kontrol) tersebut kepada bawahan.

"Arah itu dipegang penuh oleh menteri, sehingga direktur, dan ke bawah itu hanya memberikan rincian (policy) yang berkaitan itu dipegang menteri," tegas Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

<http://setkab.go.id/bukan-dirjen-ke-bawah-presiden-jokowi-tegaskan-menteri-kendalikan-penggunaan-anggaran/>

money follow program prioritas





PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 : BAPPENAS SEBAGAI *SYSTEM INTEGRATOR*

- Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu , usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
- Diperlukan upaya pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.
- Hanya Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai **koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD)**. - Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.
- Bappenas sedang menyiapkan perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial dalam upaya pencapaian sasaran agenda prioritas nasional agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
- Dalam pendekatan perencanaan tersebut, maka hanya program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional menjadi program dan kegiatan prioritas.



ILUSTRASI RENCANA TERINTEGRASI KEDAULATAN PANGAN DAN KEDAULATAN ENERGI

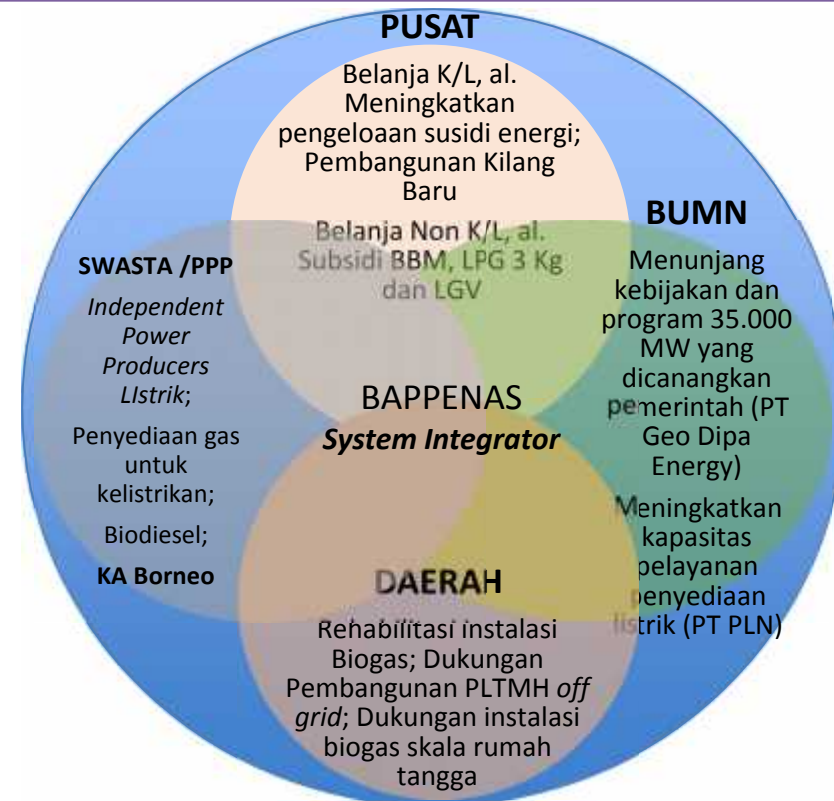
KEDAULATAN PANGAN

KEDAULATAN ENERGI

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019 a.l :

1. Meningkatkan produksi dalam negeri: produksi padi 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, kedelai 2,6 juta ton, gula 3,8 juta ton di 2019;
2. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa 9,89 juta ha; rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa 3,01 juta ha; pembangunan dan peningkatan irigasi tambak 304,75 ribu ha di tahun 2019; pembangunan 49 waduk (2014-2019)

1. Produksi Energi Kelistrikan 35.000 MW pada tahun 2019
2. Meningkatkan Konsumsi Listrik Perkapita dari 843 Kwh (2014) menjadi 1200 Kwh (2019)
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi





PENDEKATAN PEMBANGUNAN DALAM PENYUSUNAN RKP 2017 : HOLISTIK-TEMATIK, TERINTEGRASI, dan SPASIAL



PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (1/2)



Contoh: **Prioritas Nasional** Kedaulatan Pangan

□ Mempunyai multitarget (banyak sasaran)

❖ Sasaran Pokok, antara lain :

- Peningkatan produksi padi,
- Peningkatan produksi jagung,
- Peningkatan produksi ikan dll.

❖ Program Prioritas antara lain :

1. Reforma agraria
2. Stop konversi lahan produktif
3. Pemulihan kesuburan lahan
4. Pembangunan desa mandiri benih
5. Pengembangan pertanian organik
6. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut
7. Pengendalian harga dan impor pangan
8. Peningkatan produksi padi dan pangan lainnya (protein hewani)

Prioritas Nasional, Sasaran Pokok serta **Program Prioritas** telah tertuang dalam :

- Nawacita Jokowi – Jusuf K
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-

Prioritas Nasional menjadi **Program Strategis Nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana UU 23/2014 Ayat 263 (4)



PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK DAN TERINTEGRASI (2/2)

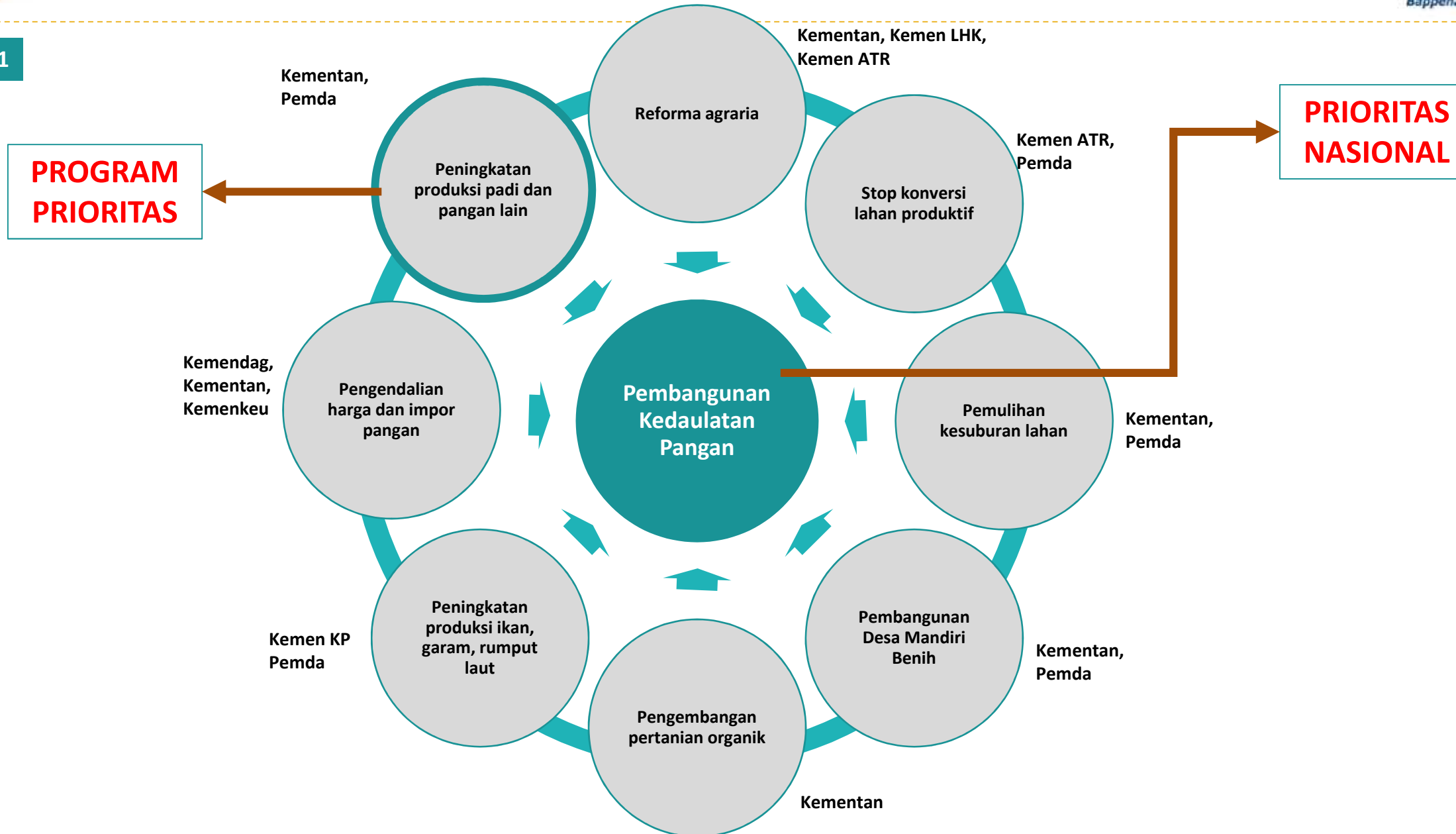


- ❑ Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- ❑ Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- ❑ Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.



ILUSTRASI PERENCANAAN TERINTEGRASI: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

EL 1

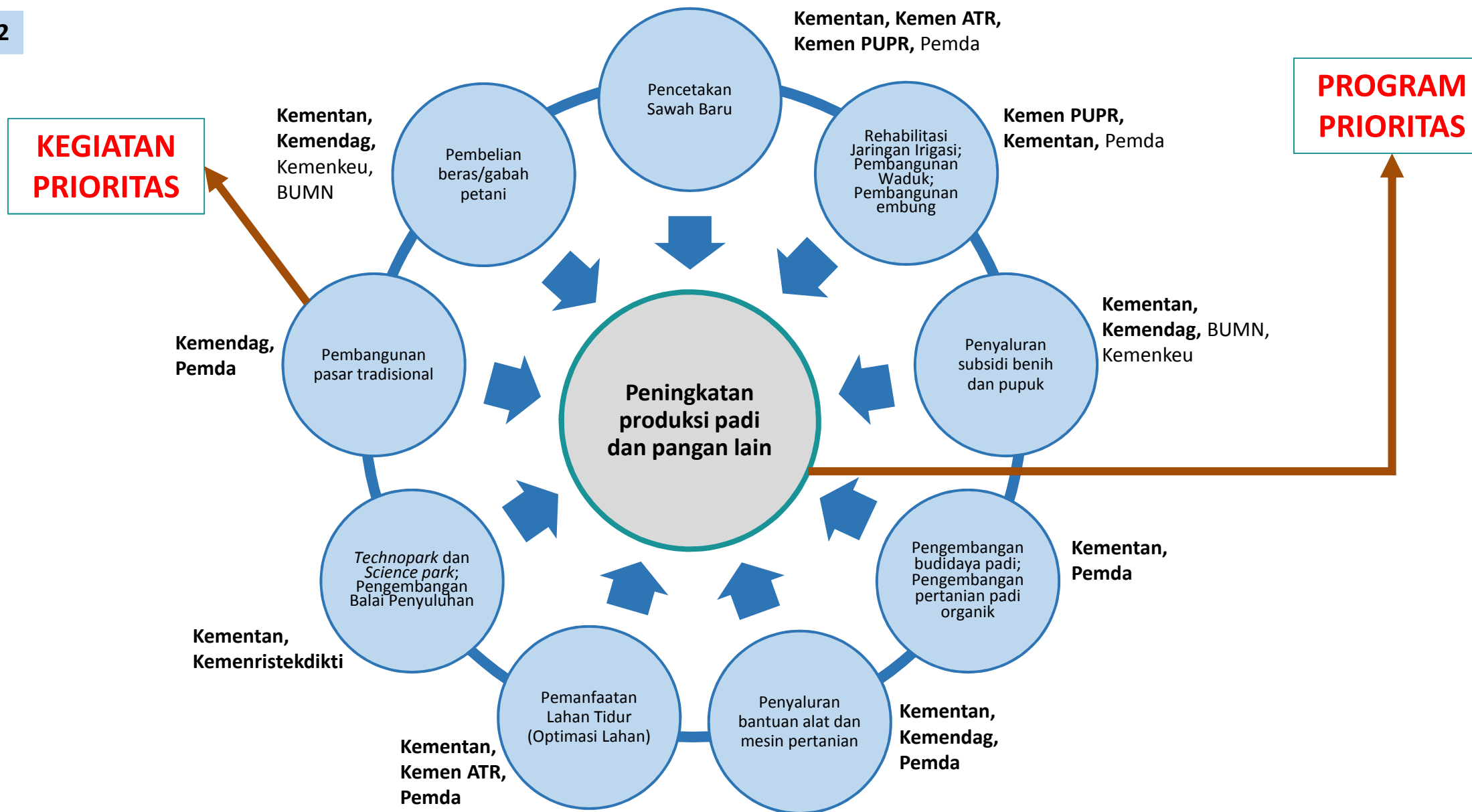




PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi

EL 2





MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/2)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp)
Kegiatan Padi dan Lain	Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = Ha Untuk Jagung = Ha Lainnya =Ha	Termanfaatnya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.	Kabupaten A, B, C, D Koordinat :	10.000 ha	
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas				Penyederhanaan Nomenklatur				
Kegiatan Padi dan Lain	Pencetakan Sawah Baru	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru	Tercetaknya 266,700 Ha Sawah Baru, yang dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.	Kabupaten A, B,C,D Koordinat : A B..... C..... D.....	266.700 Ha	
		"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)			Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret				



MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (2/2)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp)
Kegiatan Keksi Padi dan n Lain	Pencetakan Sawah Baru	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.	Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis	Kabupaten A, B, C, D Koordinat :	10.000 ha	
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas				Penyederhanaan Nomenklatur				
Kegiatan Keksi Padi dan n Lain	Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.	Tersalurnya 7.300 Unit Alsintan kepada Petani atau Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga	Kab A ...Unit; Kab B...Unit ; Kab. C....Unit	7.300 unit	
		"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)			Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret				



PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Ilustrasi Rencana Pembangunan Bendungan Tahun 2017



TAHAP 2015 RENCANA 2015 8 BENDUNGAN

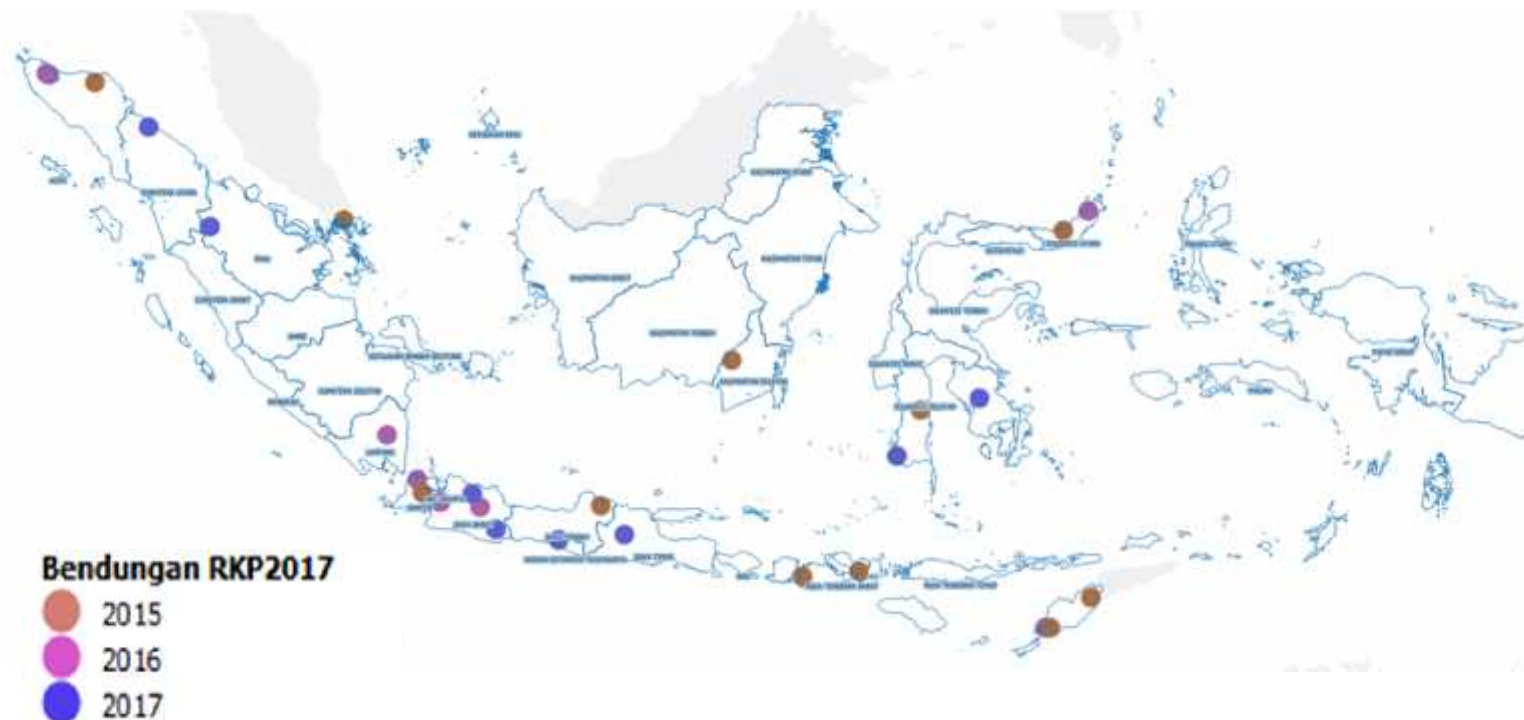
• Rukoh (Aceh),
• Ciawi (Jawa Barat),
• Sukamahi (Jawa Barat),
• Kuwil Kawangkoan (Sulawesi Utara),
• Sukoharjo (Lampung),
• Cipanas (Jawa Barat),
• Leuwikeris (Jawa Barat),
• Ladongi (Sulawesi Tenggara)

RENCANA 2016 8 BENDUNGAN

- Bener (Jateng),
- Semantok (Jawa Timur),
- Pamakkulu (Sulawesi Selatan),
- Komering II (Sumatera Selatan),
- Sadawarna (Jawa Barat),
- Tiro (Aceh),
- Lausimeme (Sumatera Utara),
- Kolhua (Nusa Tenggara Timur),
- Sidan (Bali)

RENCANA 2017 9 BENDUNGAN

- Bener (Jateng),
- Semantok (Jawa Timur),
- Pamakkulu (Sulawesi Selatan),
- Komering II (Sumatera Selatan),
- Sadawarna (Jawa Barat),
- Tiro (Aceh),
- Lausimeme (Sumatera Utara),
- Kolhua (Nusa Tenggara Timur),
- Sidan (Bali)



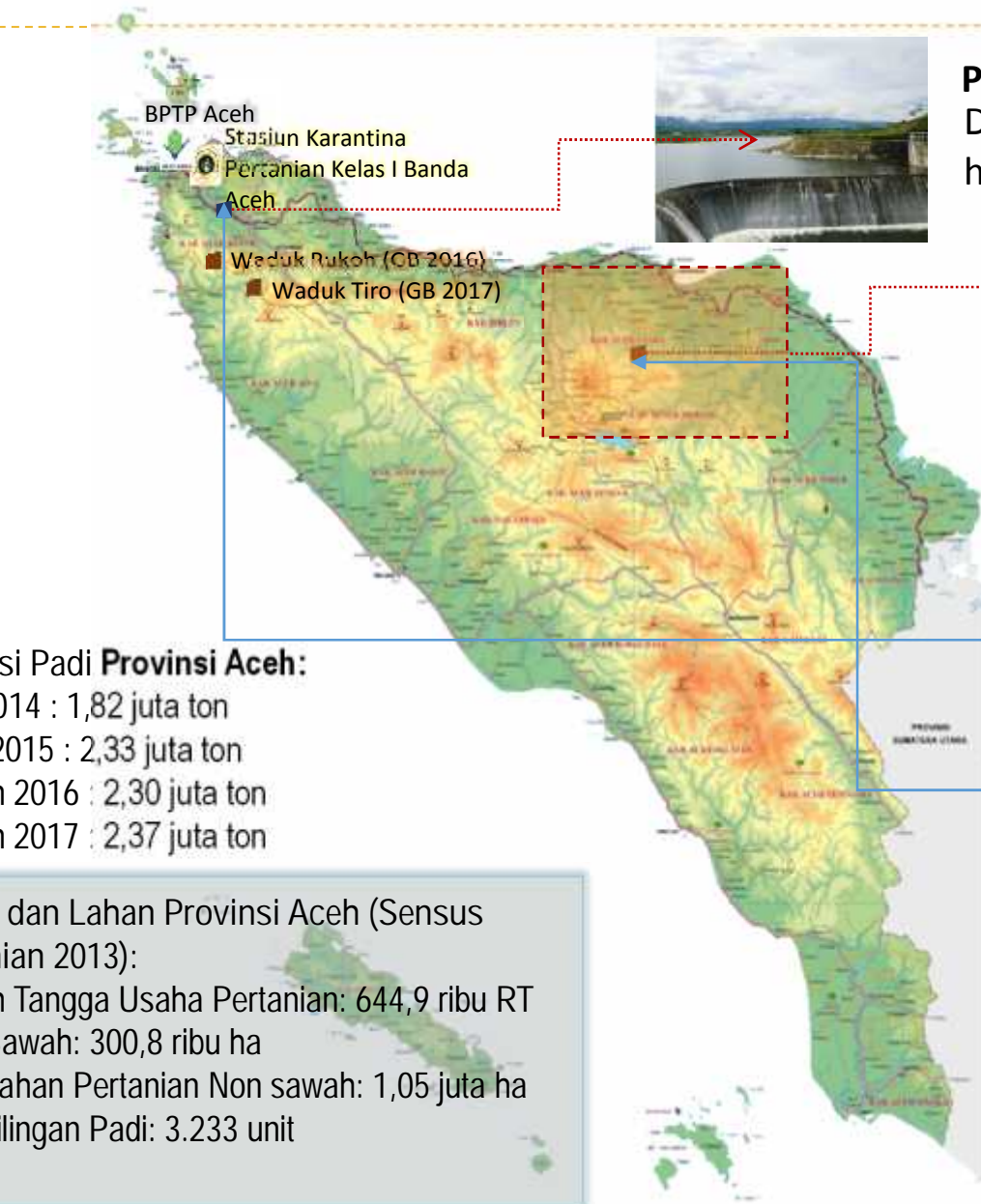
Rencana Penyelesaian Pembangunan 49 Waduk Baru dalam RPJM 2015-2019

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Groundbreaking	13	8	9	11	8	49
Penggenangan	5	3	6	7	8	29



PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh



Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar
DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (1.053 ha, *extension*); dan DI Krueng Jreue (2.350 ha).



Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015

Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m³) akan mengairi Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

Aceh Besar 6.000 ha
Aceh Jaya 1.000 ha
Aceh Timur 8.200 ha
Aceh Utara 2.000 ha
Pidie 5.500 ha
Pidie Jaya 2.300 ha

Cetak Sawah : 14.000 ha

Desa Mandiri Benih : 40 Desa

Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh

Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur



**RPJMN 2015-2019
SERTA
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017**



VISI DAN MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

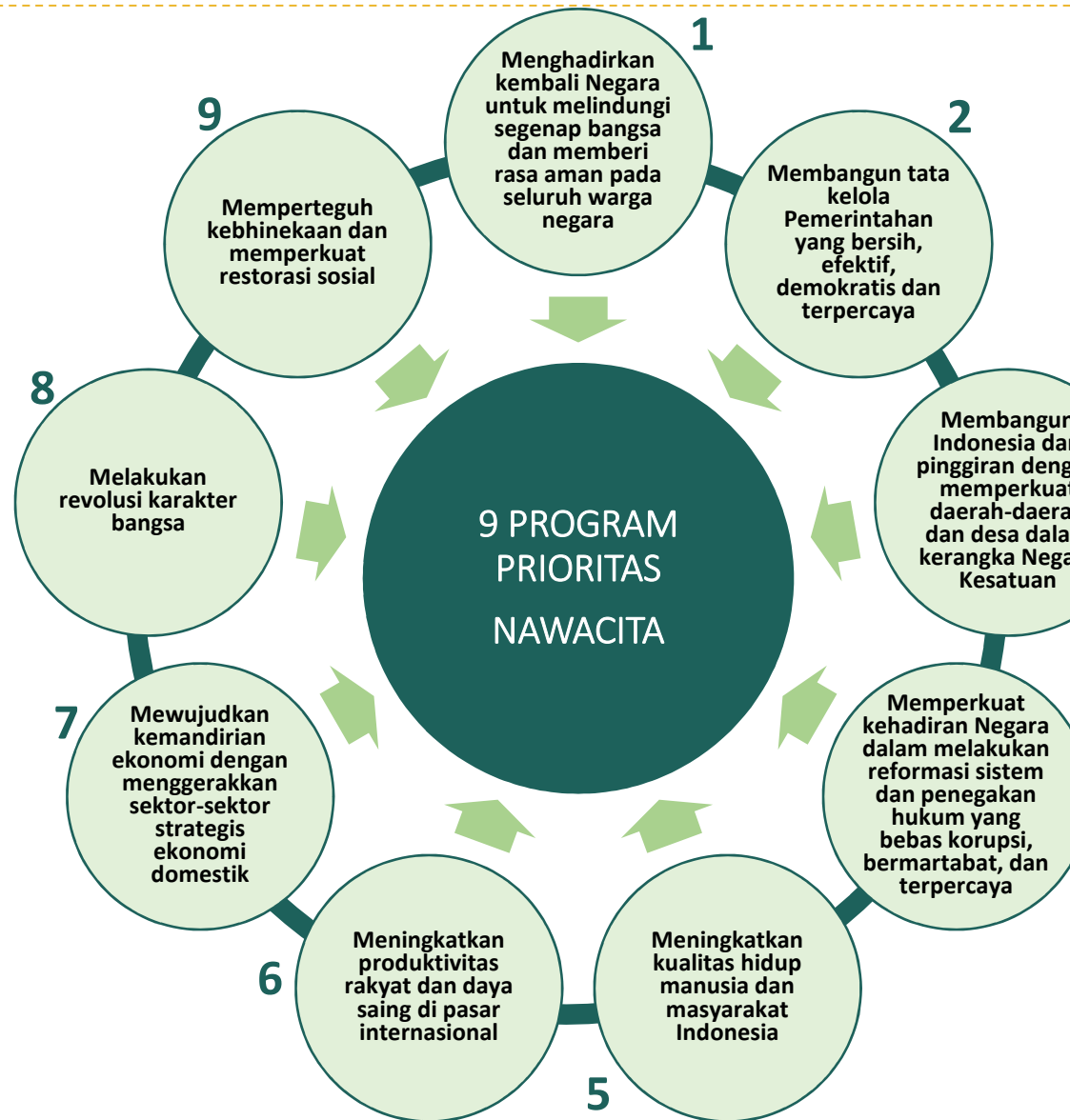


VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui **7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.





STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:

- Pembangunan bersifat **holistik komprehensif** memperhatikan seluruh dimensi terkait
- Pembangunan **untuk manusia dan masyarakat** harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
- Pembangunan **tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar**
- Pembangunan **tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem**
- Pembangunan harus mendorong **tumbuh berkembangnya swastadan** tidak justru mematikan usaha yang sudah berjala

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
Nawacita 8&9

Revolusi Mental

Nawacita 5 Pendidikan
Kesehatan
Perumahan

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR LINGGULAN

Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi dan
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata & Industri

Nawacita 6&7

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa; (2) Perbatasan; (3) Tertinggal; (4) Perkotaan

Nawacita 3

Nawacita 4
Kepastian dan Penegakan Hukum

Nawacita 1 **KONDISI PERLU**
Keamanan dan Ketertiban

Nawacita 9
Politik dan Demokrasi

Nawacita 2
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

↓

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

↓

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

↓

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

↓

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

↓

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019



SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019



INDIKATOR MAKRO	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018*	2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,1 (5,0)	5,8 (4,8)	6,6 (5,3)**	7,1 (5,5 – 5,9)	7,5	8,0
Persentase Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)	11,5 (10,9)	13,2 (10,6)	14,2 (12,2)**	14,6 (12,6-12,8)	15,2	16,0
Angka Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	5,6-5,9 (5,94)	5,5-5,8 (6,18)	5,2-5,5 (5,6 – 5,9)	5,0-5,3 (5,3 – 5,6)	4,6-5,1	4,0-5,1
Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0-10,0 (10,96)	9,5-10,5 (11,13)	9,0-10,0 (10,0 – 10,8)	8,5-9,5 (9,5-10,5)	7,5-8,5	7,0-8,5
Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)	n.a (0,41)	0,40 (0,41)	0,39	0,38	0,37	0,36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	74,8	75,3	75,7	76,1	76,3
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)***	0,55	n.a	n.a	n.a	n.a	mening

Dengan perkembangan keadaan saat ini, target-target tersebut perlu dipertimbangkan kembali
Target APBN 2016

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

Sumber: RPJMN 2015

(*) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.



PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN DALAM RKP 2017



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan



ALUR PIKIR PENYELARASAN PRIORITAS NASIONAL DALAM PENYUSUNAN RKP 2017

Visi Misi + Nawacita → PRIORITAS NASIONAL → Program K/L dan Urusan Pemerintahan



VISI-MISI

- Visi + 7 Misi

NAWACITA

- 9 Agenda Pembangunan

Strategi Pembangunan

- Norma Pembangunan
- Dimensi Pembangunan
- Kondisi Perlu

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:

- Pembangunan bersifat **holistik komprehensif** memperhatikan seluruh dimensi terkait
- Pembangunan **untuk manusia dan masyarakat** harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
- Pembangunan **tidak menciptakan ketimpangan** yang semakin lebar
- Pembangunan **tidak boleh merusak**, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
- Pembangunan harus mendorong **tumbuh berkembangnya swasta** dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Nawacita 8&9

Revolusi Mental

Nawacita 5
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan

Nawacita 4
Kepastian dan Penegakan
Hukum

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR LINGGILAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata & Industri

Nawacita 6&7
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi dan
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata & Industri

Nawacita 1
Keamanan dan Ketertiban

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Nawacita 3
Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa; (2)
Perbatasan; (3) Tertinggal; (4)
Perkotaan

Nawacita 2
Tata Kelola dan Reformasi
Birokrasi

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Program dan Kegiatan Prioritas

- Program K/L
- Kegiatan K/L

Program dan Kegiatan Prioritas

- Urusan Pemerintahan
- Urusan Pemerintahan



**ISU PEMBANGUNAN DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017
DALAM KONTEKS
PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



ISU PEMBANGUNAN KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017



ISU PEMBANGUNAN PROV. DI. YOGYAKARTA

KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU



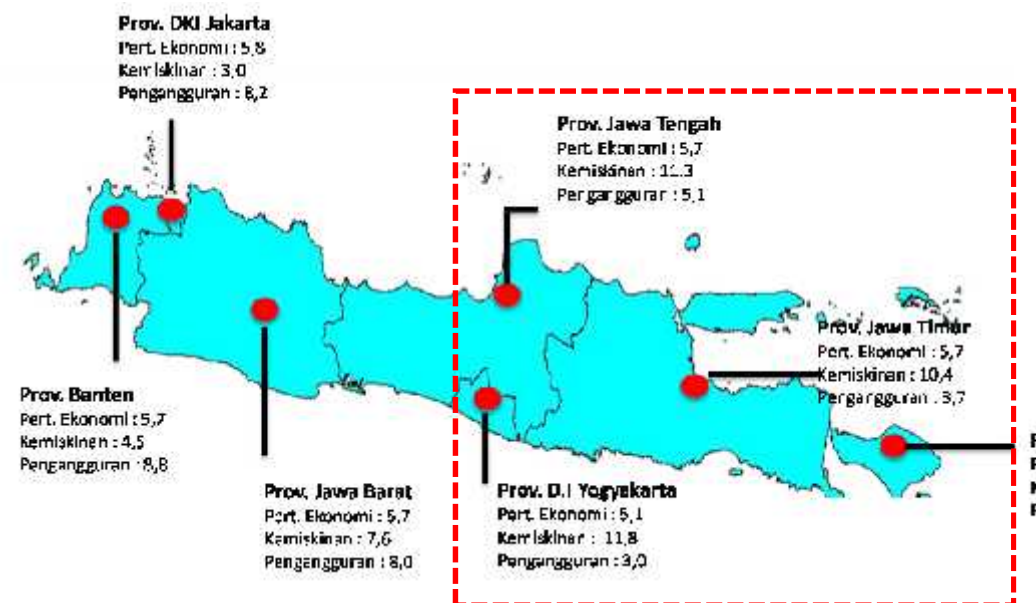
RATIO GINI	PROVINSI	2013
0,35	Kep. Bangka Belitung	0,31
	Maluku Utara	0,32
	Aceh	0,34
0,35 - 0,40	Sumatera Utara	0,35
	Jambi	0,35
	Nusa Tenggara Timur	0,35
	Kalimantan Tengah	0,35
	Sulawesi Barat	0,35
	Sumatera Barat	0,36
	Kepulauan Riau	0,36
	Lampung	0,36
	Jawa Timur	0,36
	Nusa Tenggara Barat	0,36
	Kalimantan Selatan	0,36
	Riau	0,37
	Kalimantan Timur	0,37
	Maluku	0,37
	Sumatera Selatan	0,38
	Bengkulu	0,39
	Jawa Tengah	0,39
	Banten	0,40
	Bali	0,40
	Kalimantan Barat	0,40
0,40	Jawa Barat	0,41
	Sulawesi Tengah	0,41
	Sulawesi Utara	0,42
	DKI Jakarta	0,43
	Sulawesi Selatan	0,43
	Sulawesi Tenggara	0,43
	Papua Barat	0,43
	DI Yogyakarta	0,44
	Gorontalo	0,44
	Papua	0,44

RATIO GINI	PROVINSI	2014
< 0,35	Kep. Bangka Belitung	0,30
	Maluku Utara	0,32
	Sumatera Utara	0,32
	Aceh	0,33
	Jambi	0,33
	Sumatera Barat	0,33
0,35 - 0,40	Maluku	0,33
	Kalimantan Tengah	0,35
	Sulawesi Barat	0,35
	Lampung	0,35
	Riau	0,35
	Kalimantan Timur	0,35
	Nusa Tenggara Timur	0,36
	Kalimantan Selatan	0,36
	Bengkulu	0,36
	Jawa Timur	0,37
	Sulawesi Tengah	0,37
	Nusa Tenggara Barat	0,38
	Jawa Tengah	0,38
	Banten	0,39
	Kalimantan Barat	0,39
	Kepulauan Riau	0,40
	Sumatera Selatan	0,40
> 0,40	Gorontalo	0,41
	Papua	0,41
	Jawa Barat	0,41
	Bali	0,41
	Sulawesi Utara	0,41
	Sulawesi Tenggara	0,41
	DI Yogyakarta	0,42
	Sulawesi Selatan	0,42
	DKI Jakarta	0,43
	Papua Barat	0,44

Perkembangan PDRB Perkapita Prov.D I Yogyakarta Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Kulonprogo	9.120.975	9.910.472	10.671.984	11.770.582	12.200.000
Bantul	9.956.746	10.960.3317	12.114.961	13.564.996	14.800.000
Gunungkidul	9.807.962	10.694.252	11.628.655	12.980.950	13.700.000
Sleman	12.451.096	13.634.545	14.976.756	16.920.504	17.700.000
Yogyakarta	30.303.585	33.189.951	36.363.267	40.472.989	43.500.000
DIY	12.083.874	13.195.095	14.849.534	16.227.097	19.400.000
Kabupaten/Kota/	2010	2011	2012	2013	2014

Sumber: BPS DIY



Provinsi D.I Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, namun memiliki pengangguran yang rendah. Hal menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat masih berada di bawah rata-rata pendapatan yang layak.

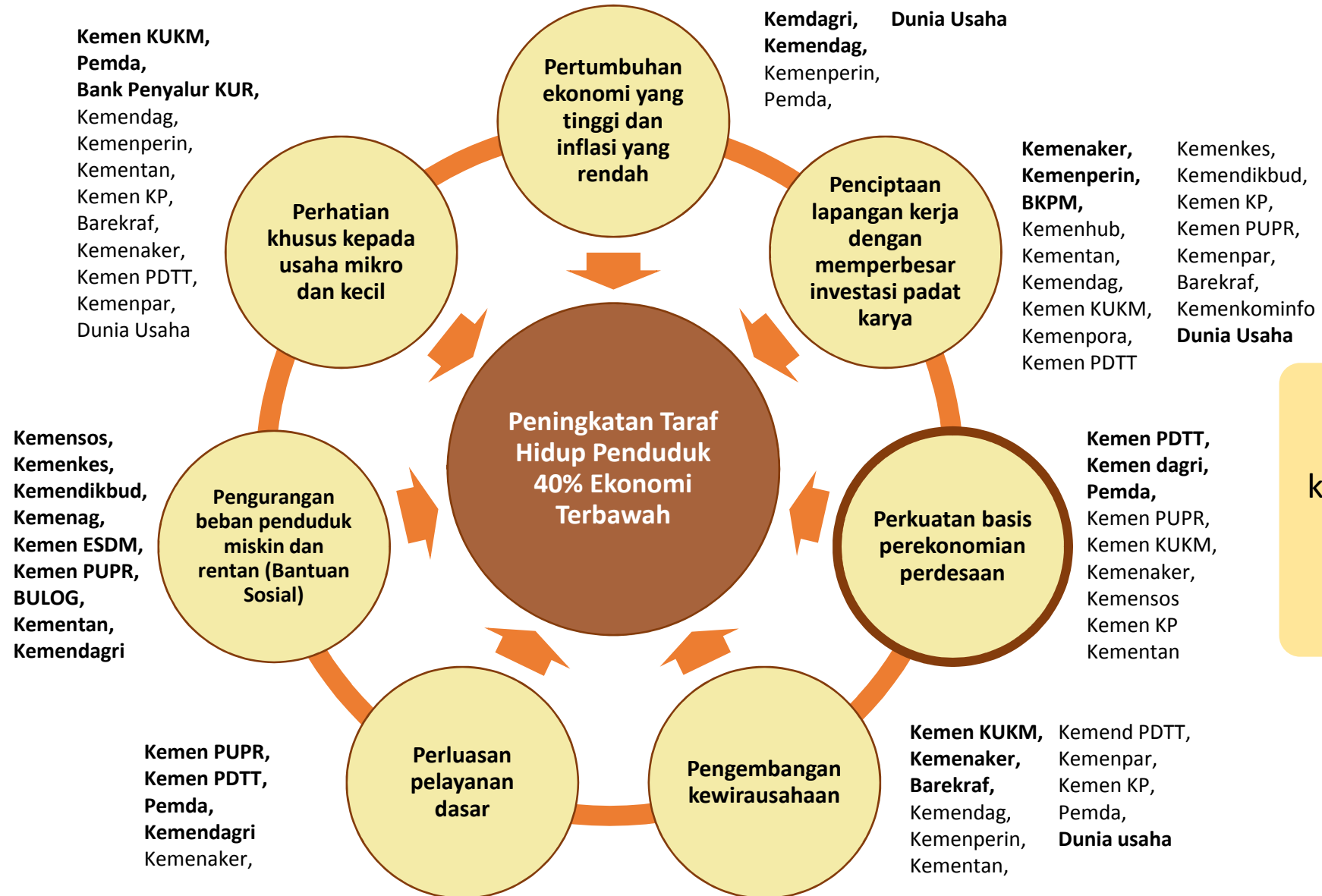
Sumber : Data BPS



PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1



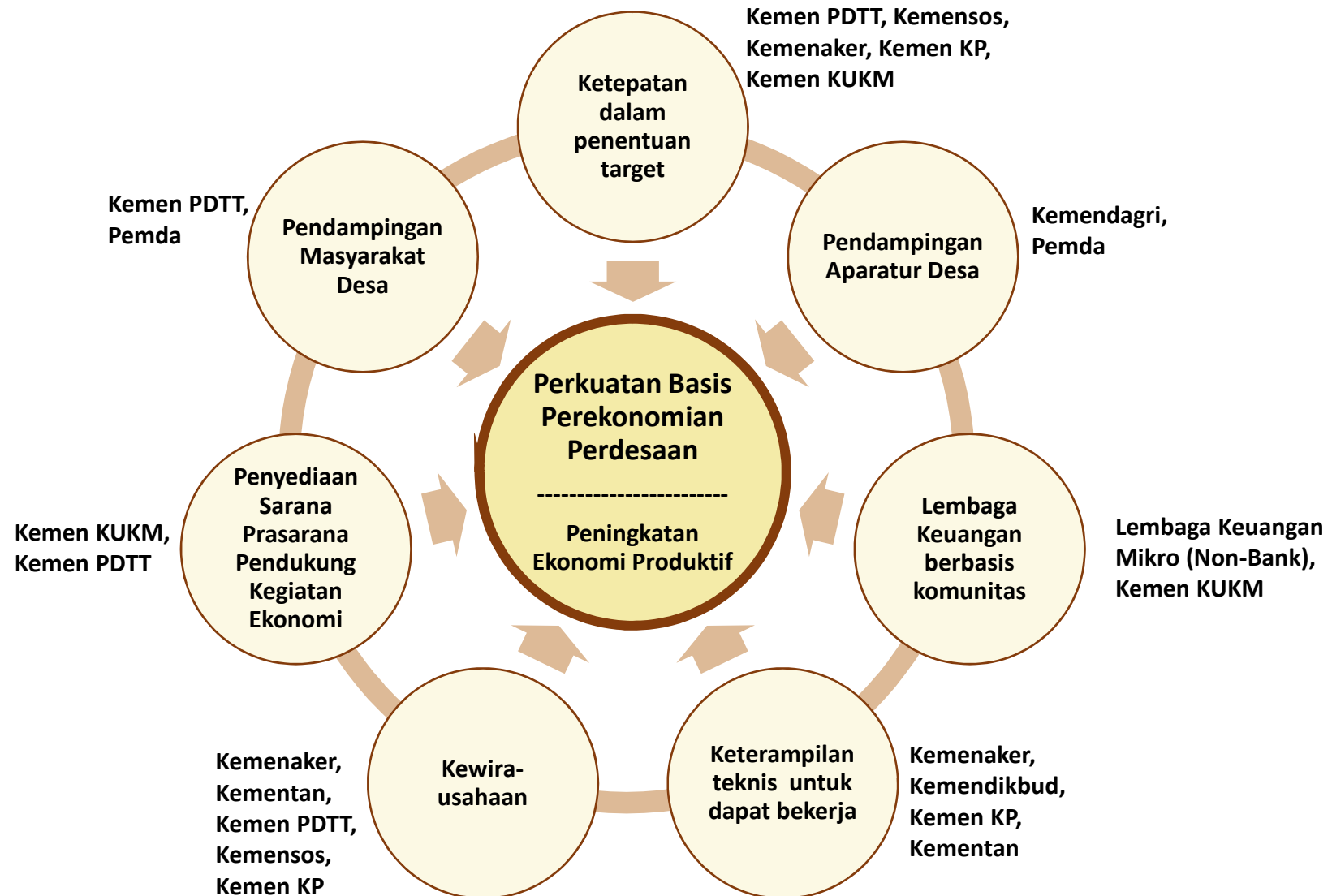
Alokasi diprioritaskan kepada program yang sudah teruji manfaatnya.



PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

EL 2





PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Sasaran Nasional dan Daerah



Sasaran	Nasional					Provinsi D. I Yogyakarta				
	2014	2015	2016	2017	2019	2014	2015	2016	2017	2019
Penciptaan lapangan kerja										
Penyediaan lapangan kerja	1,73 juta	191,2 ribu	± 2 juta	± 2 juta	± 2 juta					
Tenaga kerja formal (%)	40,5	42,1	43,6	46,0	51,0					
Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja										
Pelatihan Kerja Orang)	523.870	815.705	810.000	1.000.000	1.200.000					
Sertifikasi (orang)	151.250	93.813	123.000	150.000	200.000					
Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil										
Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)	22.790 / 52.720	31.540/ 58.186	31.067/ 84.016	42.000/ 89.000	43.000/ 97.000					
Kewirausahaan (Orang)	91.000	70.400	112.600	138.000	150.000					
Subsidi KUR (Rp triliun)	3,409	3,04	10,5	10,5						
Akses terhadap Pelayanan Dasar						Pemerintah Daerah diharapkan dapat menterjemahkan sasaran pembangunan nasional kepada sasaran pembangunan daerah				
Kepemilikan akte lahir	64,6%	72,3%	74,0%	75,0%	77,4%					
Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan	n.a	n.a	n.a	Ditentukan kemudian	100%					
Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan										
Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)	86,4 juta	88,2 juta	92,4 juta	94,4 juta	107,2 juta					
Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)	2,8 juta	3,5 juta	6 juta	7 juta	8 juta					
Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)	11,9 juta	20,3 juta	21,6 juta	21,6 juta	21,6 juta					
Subsidi pangan (rumah tangga sasaran)	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta					



ISU PEMBANGUNAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017



ISU PEMBANGUNAN PROV. DI. YOGYAKARTA

KESENJANGAN ANTARWILAYAH DIBANDINGKAN PROVINSI LAINNYA DI JAWA

Kabupaten Yang Berada di Wilayah Pantai Selatan Jawa	
Kabupaten :	
Kab. Lebak	Kab. Pandeglang
Jawa Barat	
Kab. Sukabumi	Kab. Cianjur
Kab. Garut	Kab. Tasikmalaya
Kab. Pangandaran	
Jawa Tengah	
Kab. Cilacap	Kab. Purworejo
Kab. Kebumen	Kab. Wonogiri
DI Yogyakarta	
Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul
Kab. Kulonprogo	
Jawa Timur	
Kab. Pacitan	Kab. Trenggalek
Kab. Malang	Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar	Kab. Tulungagung
Kab. Jember	Kab. Lumajang

Wilayah Selatan (22 Kab):
Kontribusi Perekonomian Terhadap Wilayah Jawa sekitar 10,1 persen
3 Sektor Terbesar :
1. Perdagangan
2. Pertanian
3. Jasa-jasa

Tema Pembangunan Wilayah Jawa dalam RPJMN 2015-2019

1. Lumbung Pangan
2. Industri makanan minuman, tekstil, energi, otomotif, alutista, besi baja, kimia dan telematika
3. Destinasi wisata
4. Ekonomi maritim melalui industri kapal

Wilayah Utara dan Tengah:
Kontribusi Perekonomian Terhadap Wilayah Jawa sekitar 89,9 persen
3 Sektor Terbesar :
1. Ind, Pengolahan
2. Perdagangan
3. Keuangan

----- Jawa bagian tengah dan utara
----- Jawa bagian selatan

Provinsi	Distribusi PDRB 2010	Distribusi PDRB 2014
DKI JAKARTA	15.66	16.46
JAWA BARAT	13.21	12.95
JAWA TENGAH	9.08	8.65
DI YOGYAKARTA	0.94	0.87
JAWA TIMUR	14.43	14.40
BANTEN	3.95	4.04
BALI	1.37	1.46
JAWA-BALI	58.64	58.83



RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI D.I YOGYAKARTA UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS

Provinsi DIY

PROVINSI JAWA TENGAH

PKW Sleman

Sebagai kota berfungsi sebagai pertumbuhan wilayah yang mendukung pembangunan sektor pertanian (beras dan hortikultura), industri pengolahan, serta pariwisata alam dan budaya.

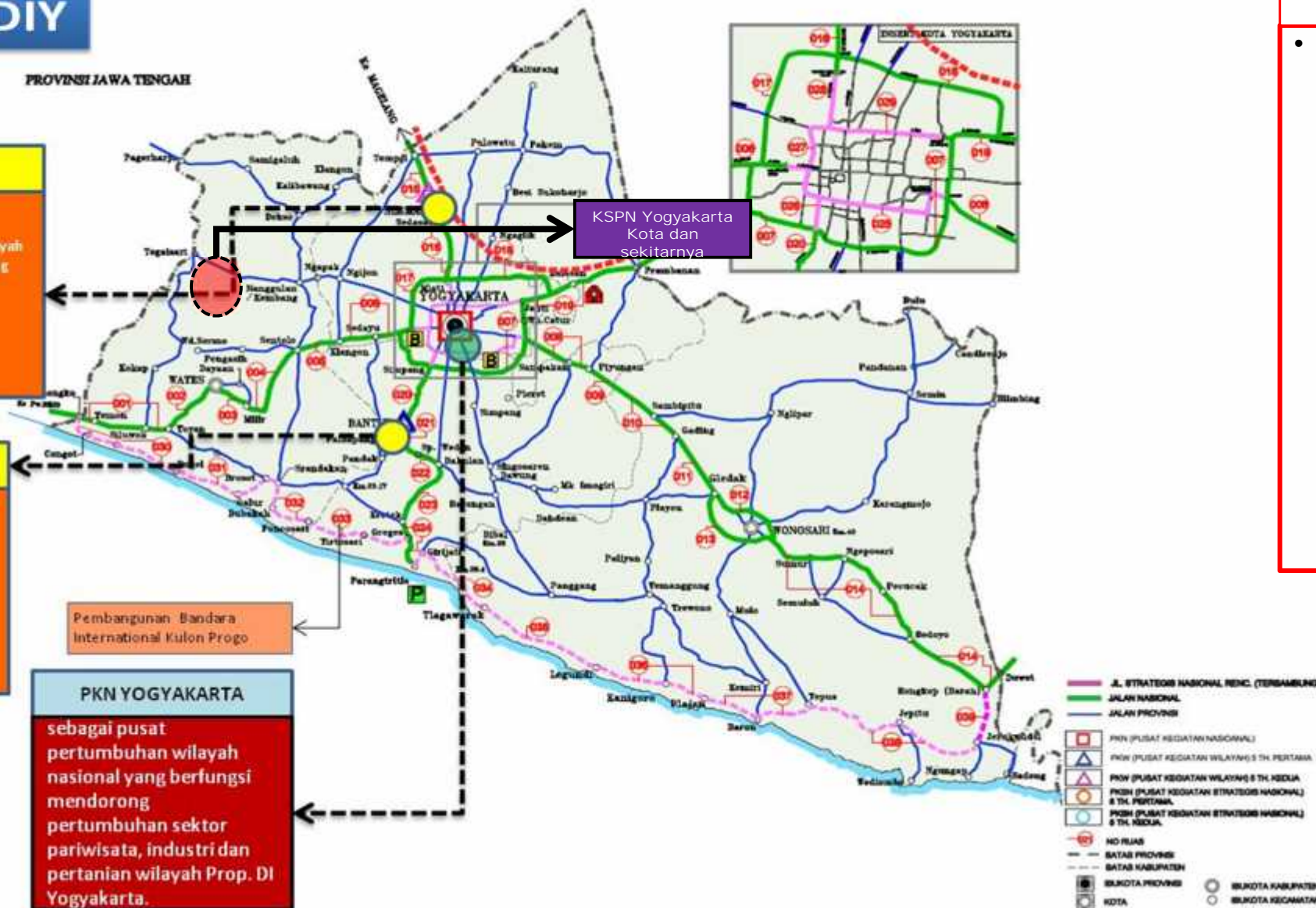
PKW Bantul

Sebagai kota berfungsi sebagai pertumbuhan wilayah yang mendukung pembangunan sektor pertanian (beras dan hortikultura), industri pengolahan, dan pariwisata alam dan budaya.

PKN YOGYAKARTA

Sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan pertanian wilayah Prop. DI Yogyakarta.

KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya

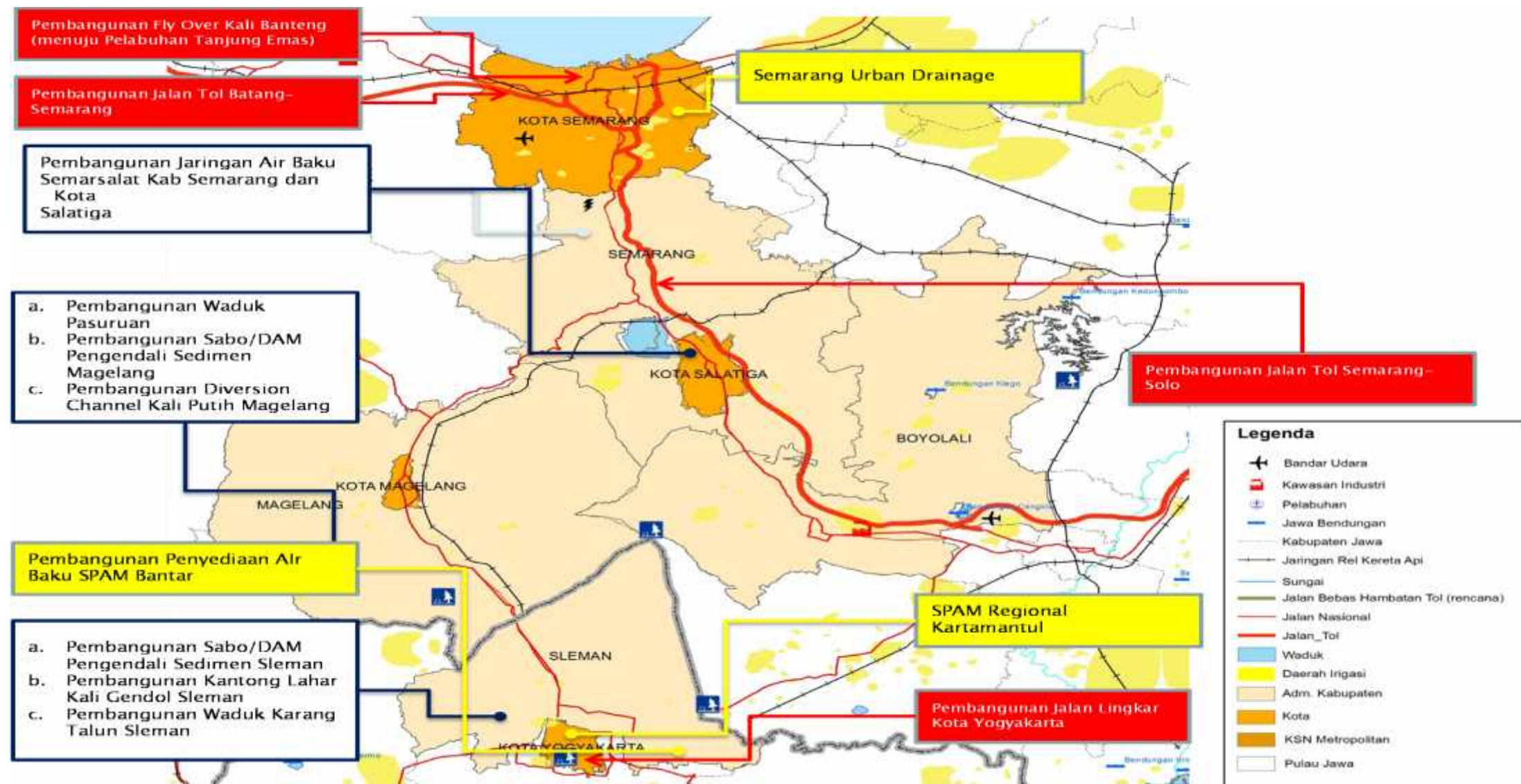


INFRASTRUKTUR PENDUKU

- KSPN/PKW /PKN
 - Pembangunan jalur KA Perkotaan Yogyakarta termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta
 - Elektrifikasi jalur KA Kutoarjo-Yogyakarta
 - Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo
 - Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta
 - Pengembangan Sistem Transit dan BRT Kota Yogyakarta
 - Pembangunan Jalan Lintas Pantura Selatan Jawa (Temon-Bugel-Giri-Jepitu-Jerukwudel)

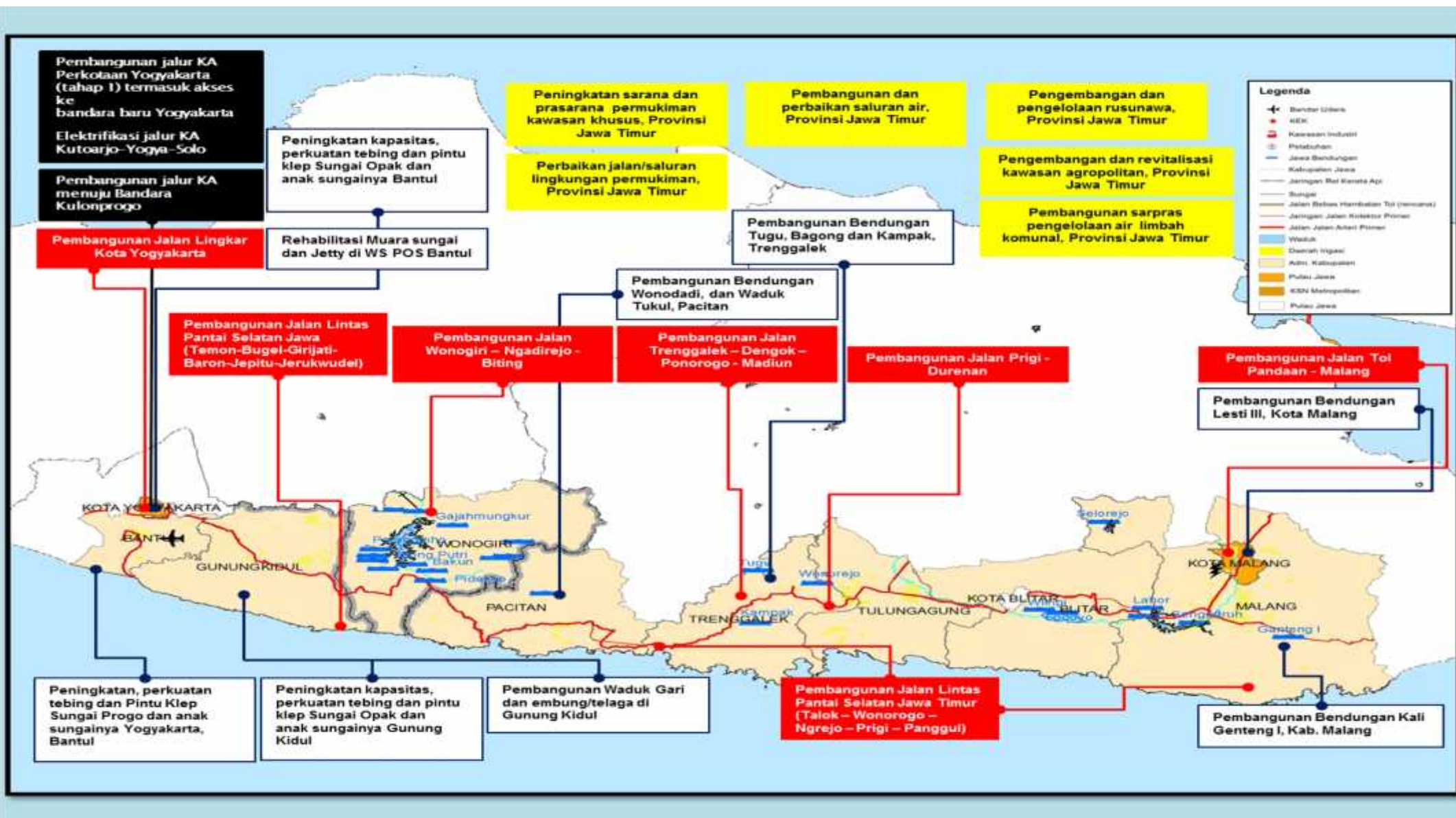


WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS YOGYAKARTA – SOLO – SEMARANG PUSAT





WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS YOGYAKARTA-PRIGI-BLITAR-MALANG





PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN MENDUKUNG DISTRIBUSI YANG EFISIEN



ngunan jalur KA untuk mendukung distribusi yang efisien di
I III antara lain:

	Pembangunan jalur KA Manado-Bitung
	Pembangunan jalur KA Bitung-Gorontalo-Isimu
ES	Pembangunan jalur KA ParePare-Mamuju
	Pembangunan jalur KA Makassar-ParePare
	Pembangunan jalur KA Makassar-Bulukumba-Watampone
	Pembangunan jalur KA Tanjung-Paringin-Rantau Martapura-Bandara Syamsudin Noor-Banjarmasin
	Pembangunan jalur kereta api Banjarmasin Pelabuhan Batu Licin Sengayam Tanah Grogot
	Pembangunan jalur KA Tanjung-Balikpapan
J	Pembangunan jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya
	Pembangunan jalur KA Balikpapan - Samarinda
	Pembangunan jalur KA Murung Raya-Kutai Barat-Paser-Penajam Paser Utara-Balikpapan
	Pembangunan jalur KA Tanjung-Balikpapan
	Pembangunan jalur KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung
	Pembangunan jalur KA dari spoor simpang menuju KEK Sei Mangke
	Pembangunan KA dari KEK Seimangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung-Pelabuhan Belawan
RA	Pembangunan jalur KA Duku-Bandara Internasional Minangkabau
	Pembangunan jalur KA Batu Ampar-Bandara Hang Nadim
	Pembangunan jalur KA Tanjung Uncang-Batam Center
	Pembangunan/reaktivasi jalur KA menuju Pelabuhan Panjang Lampung

TRANS PAPUA	Persiapan pembangunan jalur KA Sorong-Manokwari Persiapan pembangunan jalur KA Manokwari-Nabire Persiapan pembangunan jalur KA Nabire-Timika Persiapan pembangunan jalur KA Nabire-Sarmi-Jayapura
JAWA-BALI	Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KC Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper-Bandara Soetta Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno Hatta-Halim Pembangunan jalur KA antara Cangkring-Pelabuhan Cirebon Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek-Tanjung Sari-Kertajati Reaktivasi jalur KA antara Cirebon-Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru an Kadipaten-Bandara Kertajati Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksa-Pelabuhan Cirebon Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage Jalur KA menuju Bandara Kulonprogo Pembangunan jalur ganda KA antara Surabaya-Kalimas/Tanjung Perak Pembangunan jalur KA antara Kandangan-Pelabuhan Teluk Lamong Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja-Rangkasbitung-Mera Pembangunan jalur KA antara Tonjong-Pelabuhan Bojonegara Pembangunan KA Bandara Ngurah Rai-Denpasar-Mengwi



Lanjutan ...

Wilayah Jawa Tengah dan DIY



Pemasangan elektrifikasi antara Solo – Yogyakarta – Kutoarjo :
Rp. 80 M

Pengadaan lahan untuk pembangunan gedung operasional Balai, reaktivasi jalur KA antara Semarang Tawang-Tanjung Mas dan jalur ganda KA antara Solo-Kedungbanteng: **Rp. 10,8 M**

Reaktivasi jalur KA (2,3 km) antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Mas: **Rp. 36 M**

Pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa antara Kroya – Kutoarjo (1 Pkt) : **Rp. 169 M**

Pembangunan jalur ganda KA (badan jalur) antara Solo – Kedungbanteng (3,6 Km): **Rp. 15,7 M**

Pemasangan sistem telekomunikasi dan sistem C jalur ganda KA antara Tegal – Bojonegoro (1 Pkt): **Rp. 66 M**

PEMBANGUNAN BANDARA BARU KULONPROGO NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (N.Y.I.A)



Latar Belakang dan Pelaksanaan Pembangunan:

- ❖ Kapasitas apron Bandara Adisutjipto sudah tidak memadai dan dirancang untuk menampung **1,2 juta** penumpang per tahun
- ❖ Kepemilikan lahan Bandara Adisutjipto merupakan civil enclave TNI AU, Pangkalan Utama dan Sekolah Penerbang TNI
- ❖ Pesisir selatan kecamatan Temon, kab.Kulon Progo merupakan kawasan **paling memenuhi persyaratan teknis & operasional** untuk pembangunan bandara baru





RENCANA TERPADU PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DIY



PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN JAWA



- Yogya ingin mengembangkan wisata pantai teknologi
 - Bantul sebagai tujuan Wisata legenda
 - Gunung Kidul sebagai lokasi Technopark, tepatnya di Bantul
- Kondisi geografis D.I Yogyakarta :
 - Kabupaten Gunung Kidul yang berbukit dan tanahnya subur
 - Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Bantul yang datar dan berpasir.
- Potensi wilayah di Kulonprogo direncanakan Bandara Internasional dan rencana Pangkalan Udara Utama AL
- Total Panjang Lintas Pantai Selatan Jawa dari Provinsi DI Yogyakarta 123,38 Km, yang sudah berfungsi 111 Km
- Lahan yang sudah dibebaskan rata-rata di Kabupaten Bantul Rumija 12-16 m.
- Kebutuhan tanah yang belum bebas 229,38 Ha

Lintas	Nasional	SNR	Total
Banten	239.38	-	-
Jabar	155.91	265.09	421.00
Jateng	159.71	53.15	212.86
DIY	-	123.38	123.38
Jatim	202.71	413.29	616.00
Total	757.72	854.91	1612.63

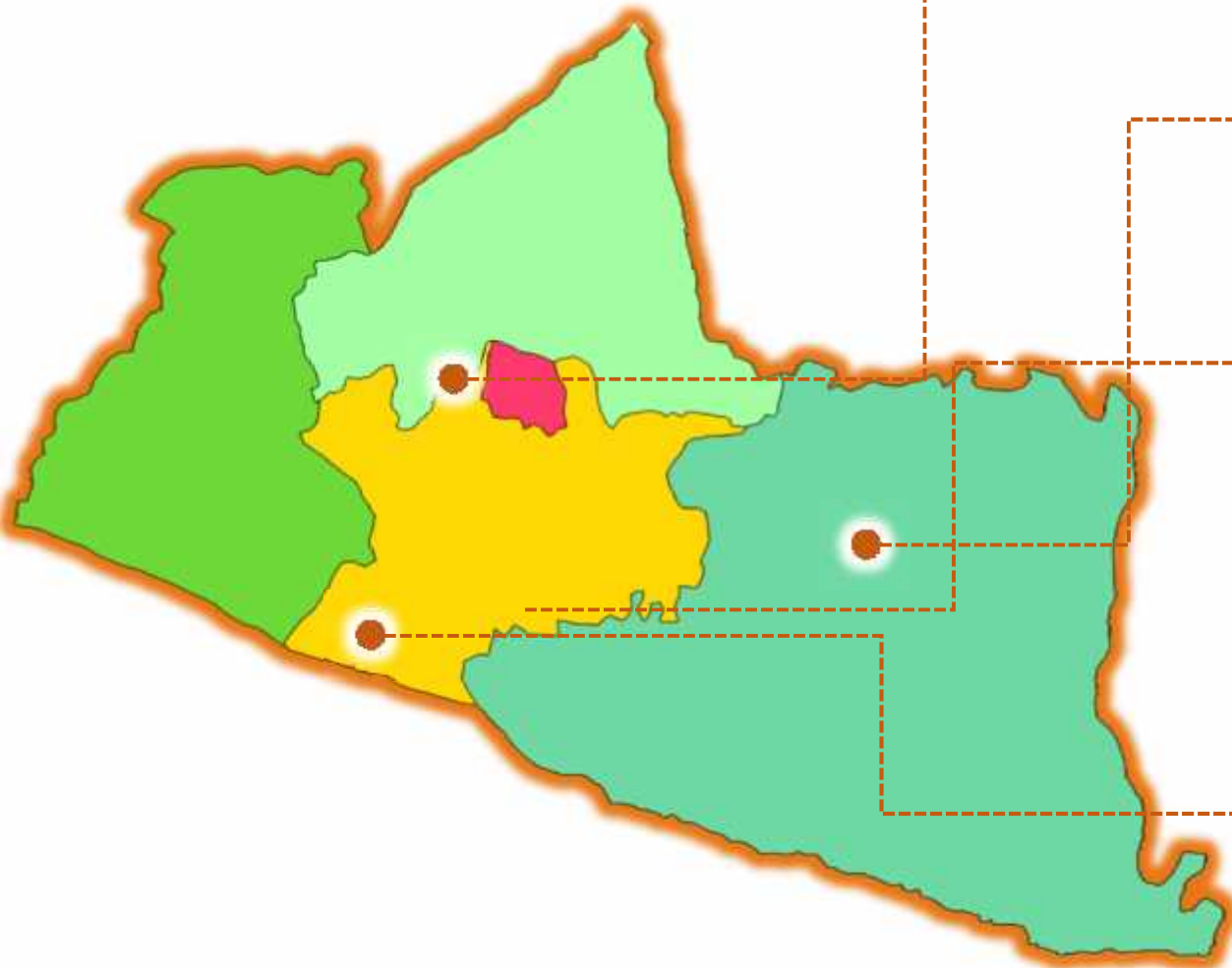


NO	RUAS JALAN	PANJANG (KM)
KORIDOR 2		
1	GALUR - CONGOT	23.9
2	YOGYAKARTA - PARANG TRITIS	5.9
3	PARANGTRITIS - BATAS KAB. GN. KIDUL	0.7
4	BARON - TEPUS	14.6
5	TEPUS - JEPITU - JERUK WUDEL	18.3
KORIDOR 3		
1	SRANDAKAN - KRETEK	17.4
2	GIRIJATI - SPG 020 1	13.7
3	JERUK WUDEL - BARAN (RONGKOP)	9.5





KETENAGALISTRIKAN



Gardu Induk tegangan 150 / 20 kV :

- Lokasi : Godean
- Kapasitas : 20 MVA
- COD : 2016



Transmisi 150 kV :

- Konduktor : 2 cct, HTLSC
- Ruas : Pedan - Wonosari
- Panjang : 44 kms
- COD : 2016



Pengembangan Distribusi :

- 2016
- JTM : 191 kms
 - JTR : 118 kms
 - Trafo : 50 MVA

2017

- JTM : 155 kms
- JTT : 121 kms
- Trafo : 47 MVA

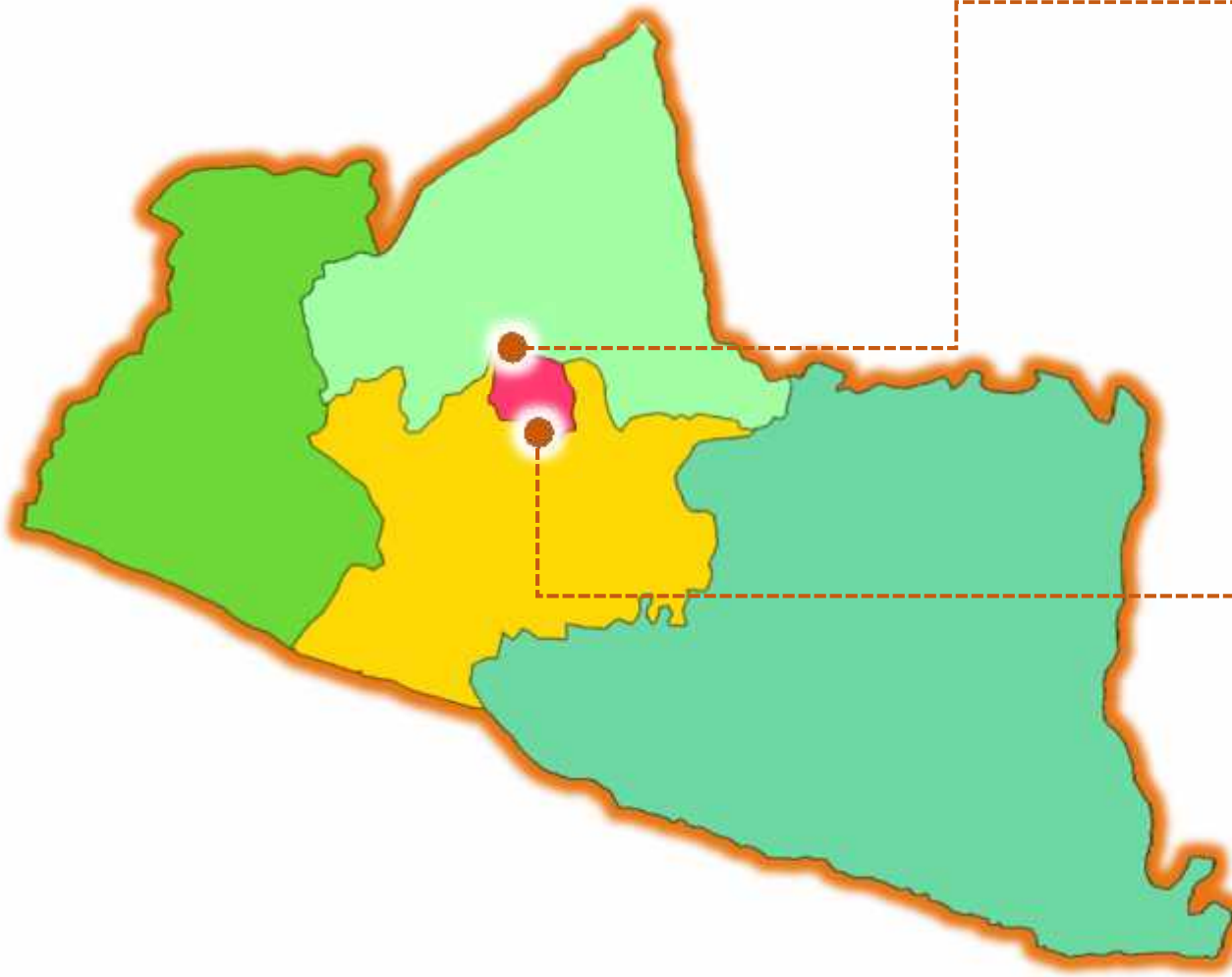


Pengembangan PLT Angin :

- Lokasi : Samas
- Kapasitas : 20 MVA
- COD : 2019



TIK DAN PENYIARAN



Pemancar TVRI ITTS Phase II (2016)

- Peningkatan stasiun transmisi TVRI



ICT Utilization Project For Educational Quality Enhancement

- Penyediaan perangkat, jaringan, bahan ajar dan training bagi guru
- Lokasi : 500 sekolah tersebar di DIY
- Status : On Going



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DI.YOGYAKARTA

LOKASI	SATUAN	VOL OUTPUT	SAT OUTCOME	VOL OUTCOME	TOTAL 2017 Indikasi (Rp. Juta)
Pembangunan embung / telaga di WS POS	Buah	10	Juta m3		10000
Rehabilitasi embung kecil / telaga di WS POS	Buah	5	Juta m3		5000
Pembangunan SPAM SISTEM SUNGAI BAWAH TANAH GUNUNGKIDUL	km	0,26	m3/detik	0,0075	1500
Pembangunan SPAM REGIONAL Regional KEBONAGUNG	Intake	1	m3/detik		6500
Pembangunan Air Baku Pedesaan WS Progo Opak Serang	Intake	4	m3/detik	0	0
Rehabilitasi JIAT Kab. Gunungkidul	Km	0,2	Ha	0,01	2000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sistem Kalibawang	Km	1,3	Ha	98	9800
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Karangtalun (Van Der Wijck + Mataram)	Km	0,95	Ha	71	7100
Pembangunan Air Baku Pedesaan WS Progo Opak Serang	Intake	4			0
Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing Sungai Serang dan anak sungainya	Km	1	Ha	0,3	3000
Peningkatan, perkuatan tebing Sungai Progo dan anak sungainya	Km	1	Ha	0,3	3000
Peningkatan, perkuatan tebing Sungai Opak dan anak sungainya	Km	1	Ha	0,3	3000
Pembangunan Drainase Primer Pengendali Banjir Jalan Babaran Tahap I	Km		Ha	0,75	7500
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Rehabilitasi Prasarana Pengendali Banjir DAS Progo	dokumen	1	Dokumen	1	750
Rehabilitasi Prasarana pengendali banjir Sungai Serang dan anak sungainya	km	1	Ha		5000
Rehabilitasi Prasarana pengendali banjir Sungai Progo dan anak sungainya	km	1	Ha		5000
Rehabilitasi Prasarana pengendali banjir Sungai Opak dan anak sungainya	km	1	Ha		5000
Pembangunan Bangunan Konservasi Terpadu/Cek Dam/BPS WS Progo Opak Serang	buah	10	Ha	1	10000



ISU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017



PEMBANGUNAN PARIWISATA

Sebaran 10 Destinasi Wisata Prioritas

Danau Toba



Kepulauan Seribu



Tanjung Kelayang



Wakatobi

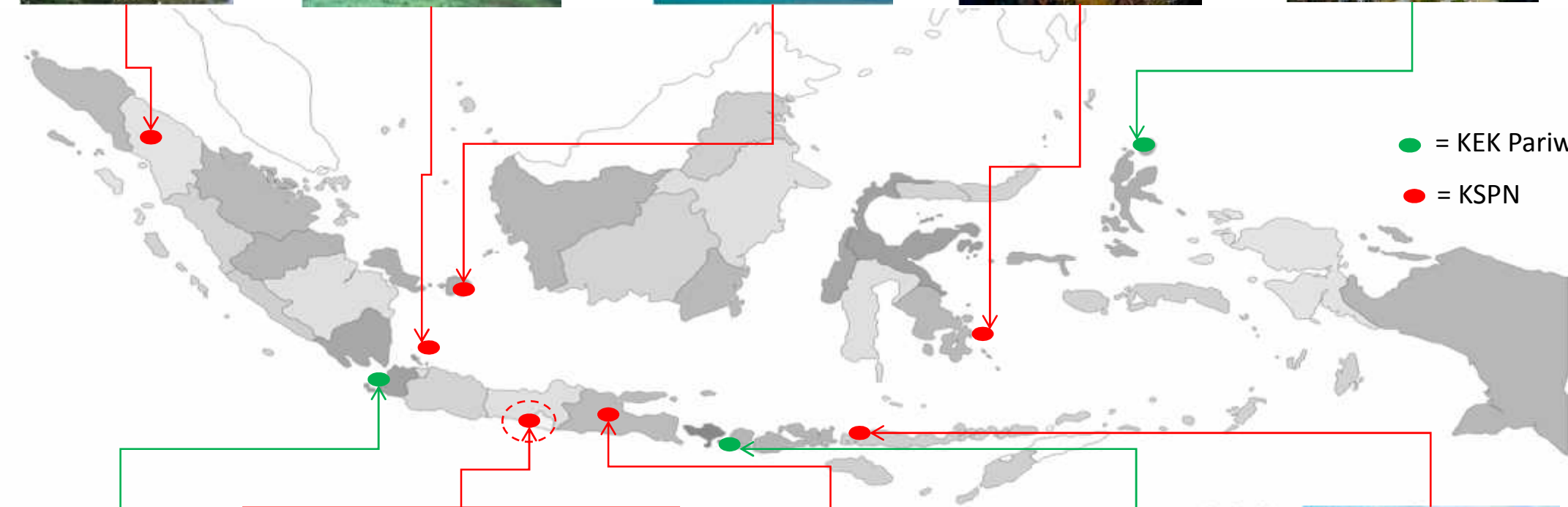


Pulau Morotai



● = KEK Pariwisata

● = KSPN



Tanjung Lesung



Borobudur dsk



Kawasan
Gunung Bromo



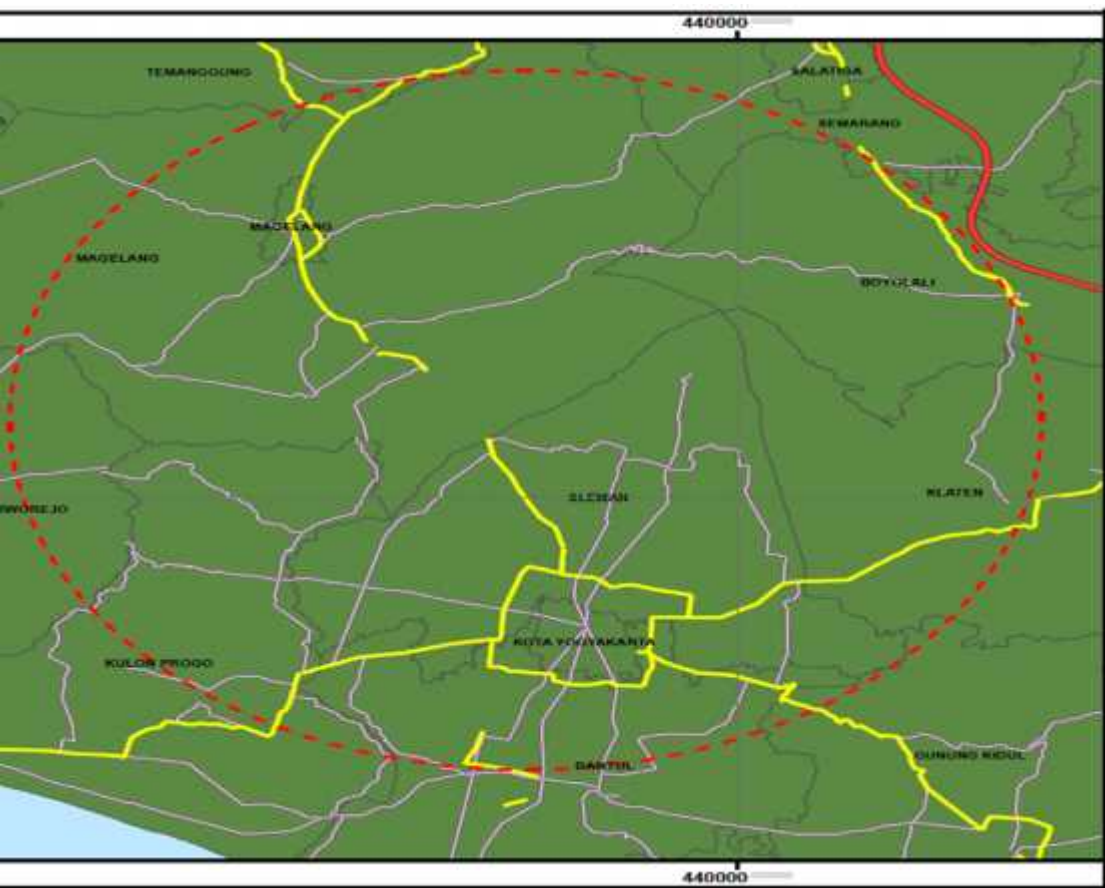
Mandalika



Labuan Bajo



DESTINASI BOROBUDUR DAN SEKITARNYA



Produk

- Core: Destinasi wisata budaya
- Supporting: Destinasi wisata alam

Pasar

- Utama: Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, USA
- Potensial: Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman, Brunei

Komponen Destinasi

- DTW: Candi Borobudur, Candi Prambanan
- Akses/ Hub: Udara: Bandara Internasional Achmad Yani (Semarang), Adisucipto (Yogyakarta). Laut : Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang)
- Fasilitas Pariwisata (tour base): Semarang, Magelang, Yogyakarta

Success Factors: Badan Pengelolaan Pariwisata

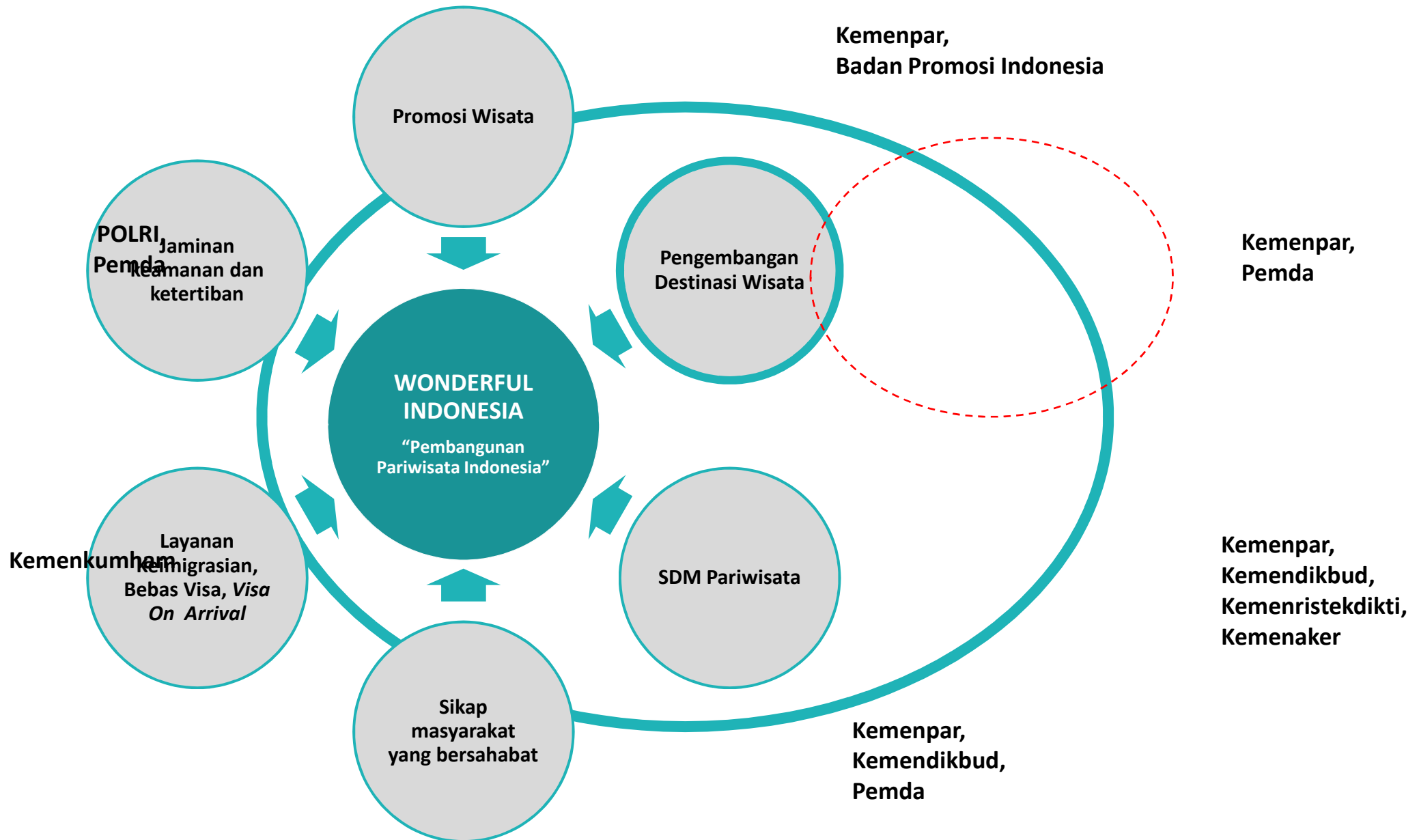
KSPN	JUMLAH WISMAN		PERTUMBUHAN KUNJUNGAN	DEVI SA WISMAN (USD)	INVESTASI (JUTA USD)	PROYEKSI WISMAN	PROYEKSI DEVI SA (USD)
	2012	2013					
BOROBUDUR dsk	193,982	227,337	17.19	27,337,000	1,520	2,000,000	2,000,000



KETERKAITAN BAPPENAS SEBAGAI INTEGRATOR DALAM PERENCANAAN MELALUI “RPI2JM” TERKAIT KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA



EL 1



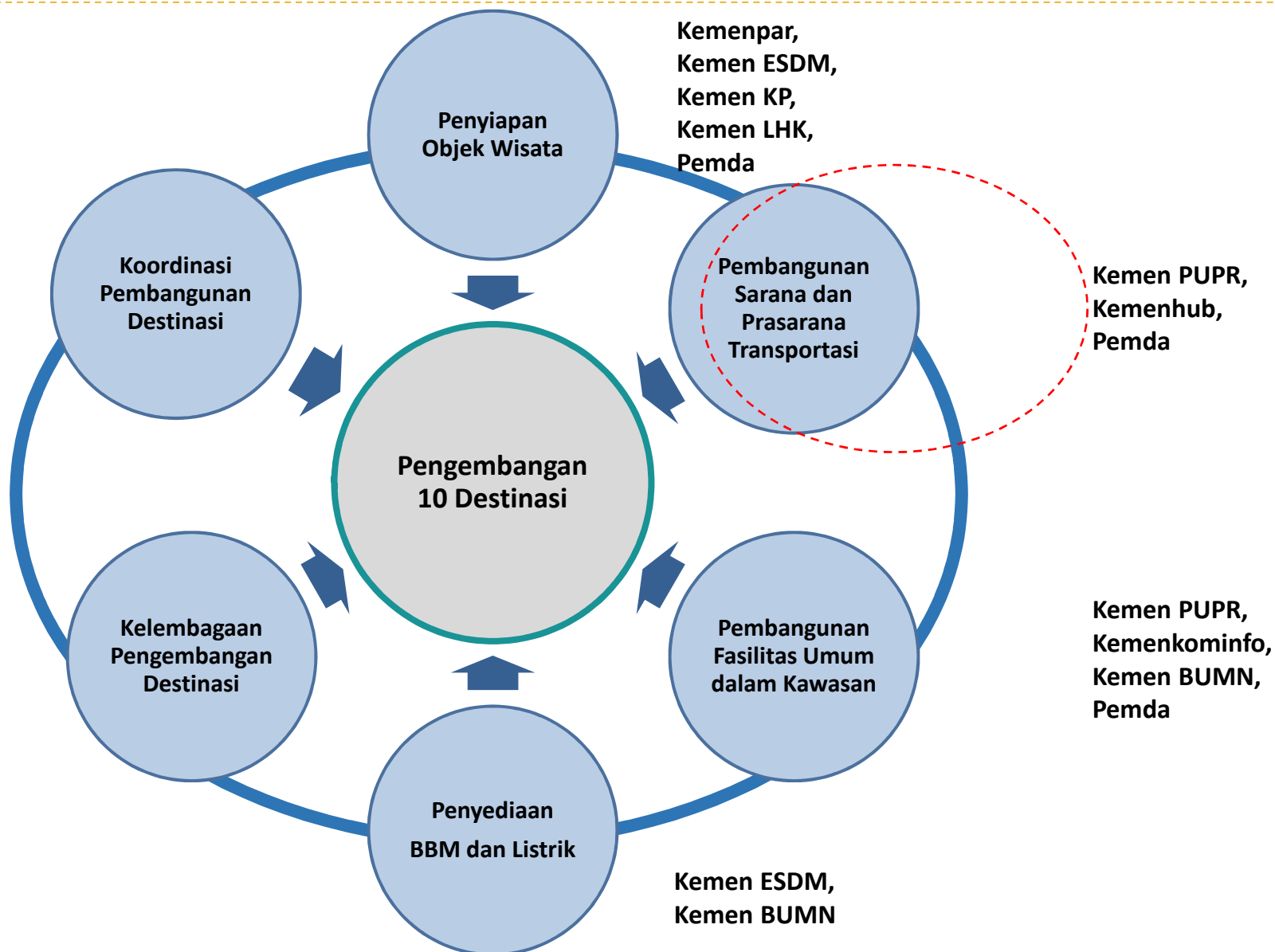


KETERKAITAN BAPPENAS SEBAGAI INTEGRATOR DALAM PERENCANAAN MELALUI “RPI2JM” TERKAIT KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

EL 2

Kemenko Maritim,
Kemenko Ekon

Kemenpar,
Kemen BUMN,
Kemenkeu,
Pemda





PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR DSK



Level I	Level II	Delivery System	Highlight Program dan Kegiatan Kementerian		Keterangan
			Kemenhub	KemenPU Pera	
Mendukung Pembangunan Pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia)	Pengembangan 10 Destinasi Wisata	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi di Kawasan Wisata Borobudur dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jalan Rel/ Emplasemen Yogyakarta – Magelang (reaktivasi)• Pembangunan jalur KA Perkotaan Yogyakarta (tahap 1) termasuk akses ke Bandara baru Yogyakarta• Elektrifikasi jalur KA Kutoarjo-Yogya-Solo• Pembangunan Bandara International Kulon Progo• Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">• Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta• Pembangunan Jalan Lintas Pantasi Selatan Jawa (Temon-Bugel-Girijati-Baron-Jepitu-Jerukwudel)• Pelebaran Jalan Akses Bandara Baru Kulonprogo	<p>Data i ambilka dokur RPI2JM telah sinerg antar s antar w dan anta dengan c</p>



PENUTUP



PENUTUP (1/2)



Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

Kementerian PPN/Bappenas (dan Bappeda) yang mempunyai kapasitas teknis dengan fungsi utama sebagai **koordinator perencanaan lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD) dan lintas wilayah**. Oleh karena itu Bappenas (Bappeda) bertindak sebagai *system integrator* dan *resource allocator* antar K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) agar sinergi bisa tercapai.

Untuk mendukung prioritas nasional, maka diharapkan dalam pembahasan dengan SKPD dilakukan pendekatan:

- ***Money follow function*** diubah menjadi ***Money follow program***. Dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya. Program-program lain akan minimal alokasinya
- Pengujian pada setiap program/kegiatan:
 - Apakah proyek ini perlu?
 - Apakah proyek ini perlu sekarang?
 - Apakah produksi dan tenaga kerja dalam negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam proyek ini?
 - Apakah proyek akan dapat lebih efisien?



PENUTUP (2/2)



Dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan:

- Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
- Perkuatan DAK yang *proposal based approach* dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
- Pengenalan perencanaan berbasis sistem integrasi untuk Kabupaten/Kota

Oleh karena itu, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasi anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan.



JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017





TERIMA KASI



LAMPIRAN



PRIORITAS NASIONAL RKP 2017



PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan



REVOLUSI MENTAL

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baselin e)	2015	2016	2017	2019
Katnya Integritas					
Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)	3,61	3,59	3,63	3,70	3,75
Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)	*)	*)	*)	*)	*)
Pase aparatatur Pemerintah/ Penegak Hukum yang mendapat sanksi melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum	*)	*)	*)	*)	*)
Pase kepuasan publik atas penanganan perkara	*)	*)	*)	*)	*)
Pas pendidikan karakter di sekolah dan perguruan tinggi	*)	*)	*)	*)	*)
Pas kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang- an	*)	*)	*)	*)	*)
Pas belanja pemerintah (manfaat, biaya dan kualitas)	*)	*)	*)	*)	*)
Katnya Etos Kerja					
Pas kualitas pelayanan publik di K/L, Legislatif, dan Pemerintah	*)	*)	*)	*)	*)
Pas produktivitas masyarakat (efisiensi dunia usaha, jumlah sta, hasil riset, publikasi ilmiah)	*)	*)	*)	*)	*)
Pas profesi guru yang berbasis kinerja	*)	*)	*)	*)	*)
Pas kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah asional	*)	*)	*)	*)	*)
Pas semangat persaingan yang sehat (<i>cooperate and compete</i>)	*)	*)	*)	*)	*)
Pas hidup bersahaja, hemat, bersih dan sehat	*)	*)	*)	*)	*)
Katnya Gotong Royong					
Pas pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	*)	*)	*)	*)	*)
Pas jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	*)	*)	*)	*)	*)
Pas katnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan e	*)	*)	*)	*)	*)
Pas tetahanan Keluarga (angka perceraian, anak terlantar)	*)	*)	*)	*)	*)
Pas ruang publik bermuatan negatif (penyebarkan kebencian, me dan pornografi)	*)	*)	*)	*)	*)

*) Akan diurusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental masing-masing K/L

Arah Kebijakan

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

1. Penegakan hukum dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat
3. Penanganan perkara yang transparan dan memuaskan
4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan Birokrasi yang responsif)
2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan az manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward & punishment* dan sistem merit dalam birokrasi

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

1. Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif, dan professional mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan)
2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
3. Internalisasi nilai-nilai persaingan yang sehat (*cooperate and compete*) bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)
2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*)
3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)
4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga dan Media Publik

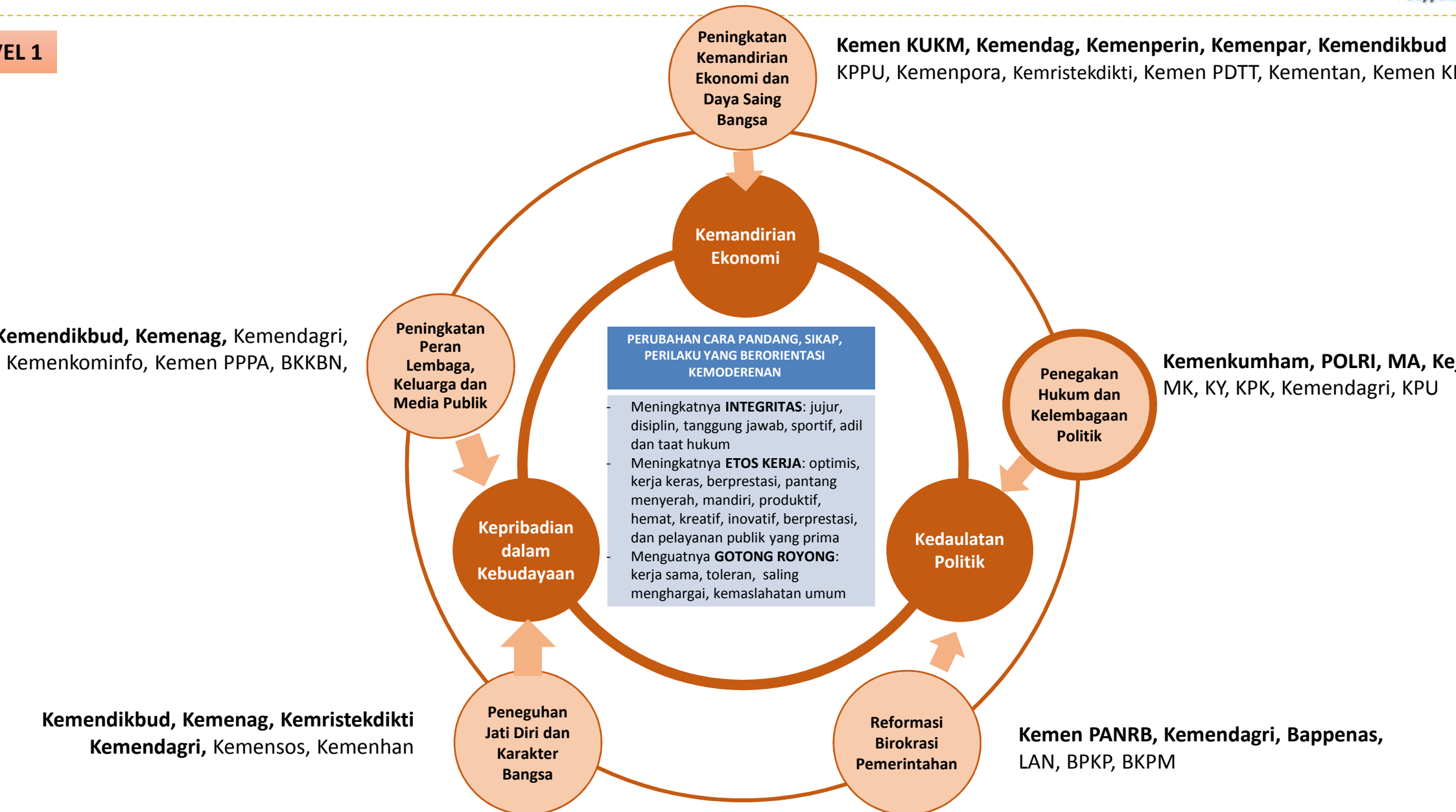
1. Ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
2. Pembangunan karakter melalui media publik



REVOLUSI MENTAL

Perencanaan Terintegrasi

EL 1





REVOLUSI MENTAL

Ilustrasi Perencanaan Terintegrasi Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

EL 2





PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,8 tahun
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	96,1 %
Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	68,4 %
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	84,2%
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	81,0%
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	84,6%
Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	65,0%
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,90
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,60
Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **	(2012)				(2018)
Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)	375	n.a.	n.a.	n.a.	427; 50
Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)	382	n.a.	n.a.	n.a.	438; 50
Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)	396	n.a.	n.a.	n.a.	446; 45
Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak menyontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (<i>bullying free environment</i>).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*

catatan: *) Akan diurusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental

Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali. Publikasi hasil PISA terakhir tahun 2012, dan hasil 2015 baru akan dipublikasikan bulan Desember 2016.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru
4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi

Kebijakan Terkait Revolusi Mental

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa
2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan
3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)



PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Perencanaan Terintegrasi

LEVEL 1



Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi



PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Merata

EL 2

Kemendikbud, Kemenag:

- Pemetaan dan Audit guru yang berhak mendapat tunjangan profesi
- Penyediaan tunjangan profesi guru berdasarkan kinerja guru
- Penyediaan tunjangan khusus bagi guru di daerah 3T/perbatasan

Pemda:

- Penyediaan asrama/rumah dinas guru di daerah 3T
- Penyediaan tunjangan daerah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Kemenristekdikti, Kemenag:

- Sistem penerimaan calon mahasiswa LPTK yang selektif
- Reformasi pendidikan keguruan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama

Kemendikbud, Kemenag:

- Pemetaan kebutuhan guru baru per bidang studi per daerah

Kemendikbud, Kemenag:

- Sertifikasi guru
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- Penilaian Kinerja Guru

Kemenristekdikti:

- Penguatan LPTK

Pemda:

- Revitalisasi KKG/MGMP/KKKS/MKKS

Kemendikbud, Kemenag:

- Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan rasio guru:murid per sekolah
- Penempatan Guru Garis Depan (GGD)

Kemen PDDT:

- Pemetaan kebutuhan guru di daerah 3T

Kemen PANRB:

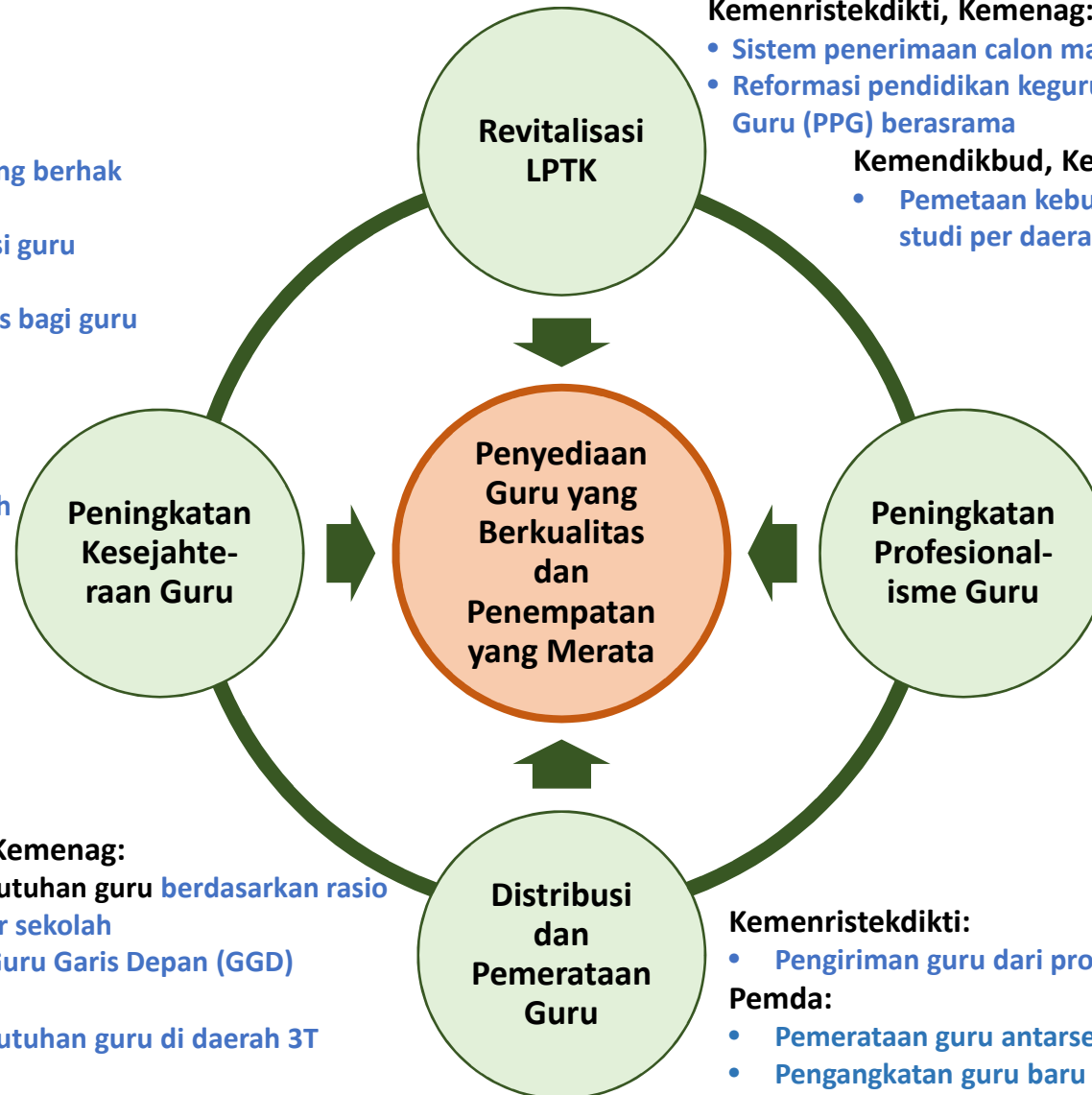
- Penetapan kuota formasi guru sesuai dengan peta kebutuhan

Kemenristekdikti:

- Pengiriman guru dari program SM-3T sesuai kebutuhan daerah

Pemda:

- Pemerataan guru antarsekolah dan antardaerah sesuai kewenangan
- Pengangkatan guru baru yang terkendali sesuai formasi
- Pengendalian pengangkatan guru honor oleh sekolah





PEMBANGUNAN KESEHATAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	Baseline (2014)	2015	2016	2017	2019
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat					
a. Menurunnya Angka kematian ibu (AKI), diukur dengan proksi:	346 (SP, 2010)	n.a	n.a	n.a	306
• Persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	70,4 (2013)	75,0	77,0	79,0	85,0
• Kunjungan Antenatal (K4) (persen)	70,4 (2013)	72,0	74,0	76,0	80,0
b. Menurunnya Angka kematian bayi (AKB), diukur dengan proksi:	32 (2012)	n.a	n.a	n.a	24
• Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (persen)	71,3 (2013)	75,0	78,0	81,0	90,0
c. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)	32,9 (2013)	31,3	30,5	29,6	28,0
d. Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	2,60 (2012)	2,37	2,36	2,33	2,28
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular					
a. Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	297 (2013)	280	271	262	245
c. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen)	7,2 (2013)	6,9	6,4	5,9	5,4
d. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	25,0	24,6	24,2	23,4
e. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4	15,4	15,4	15,4
Meningkatnya Perlindungan Finansial					
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (persen)	51,8 (Okt, 2014)	60,0	68,0	77,0	Min. 95
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan					
a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 (2014)	94	190	287	481
b. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2 (2013)	75,2	80,2	85,2	95,2
c. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015 (2013)	1.200	2.000	3.000	5.600
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan					

Angka: Data AKI dan AKB diperoleh melalui survei skala besar dan tidak tersedia setiap tahun

Arah Kebijakan

- Memperkuat upaya promotif dan preventif
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Pembiayaan kesehatan.
 - Penyediaan, distribusi, dan mutu farmasi, alkes, dan makanan
 - Penguatan pelayanan kesehatan dan rujukan
 - Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
 - Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

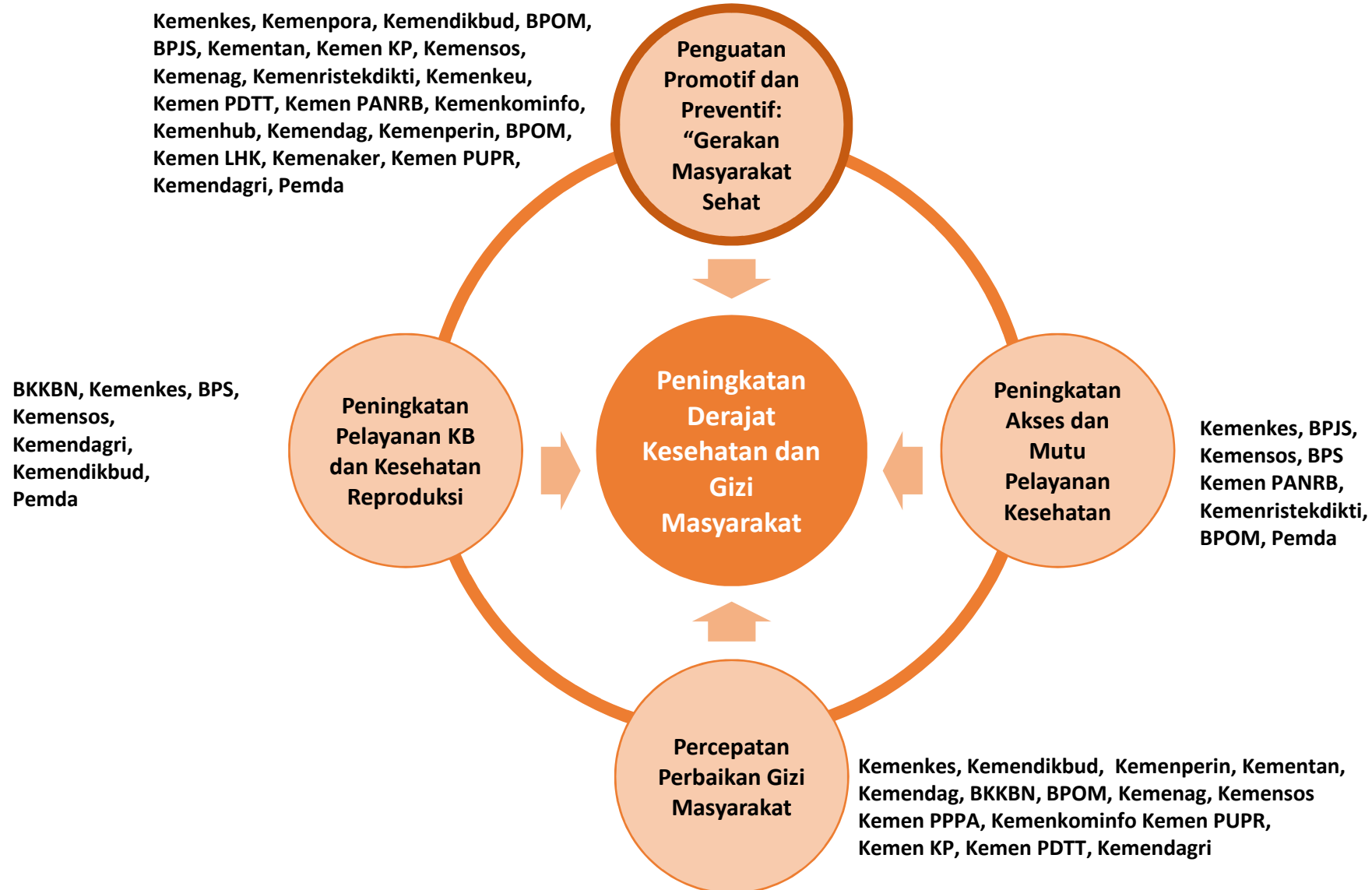
- Meningkatkan respons pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)
- Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)
- Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)



PEMBANGUNAN KESEHATAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

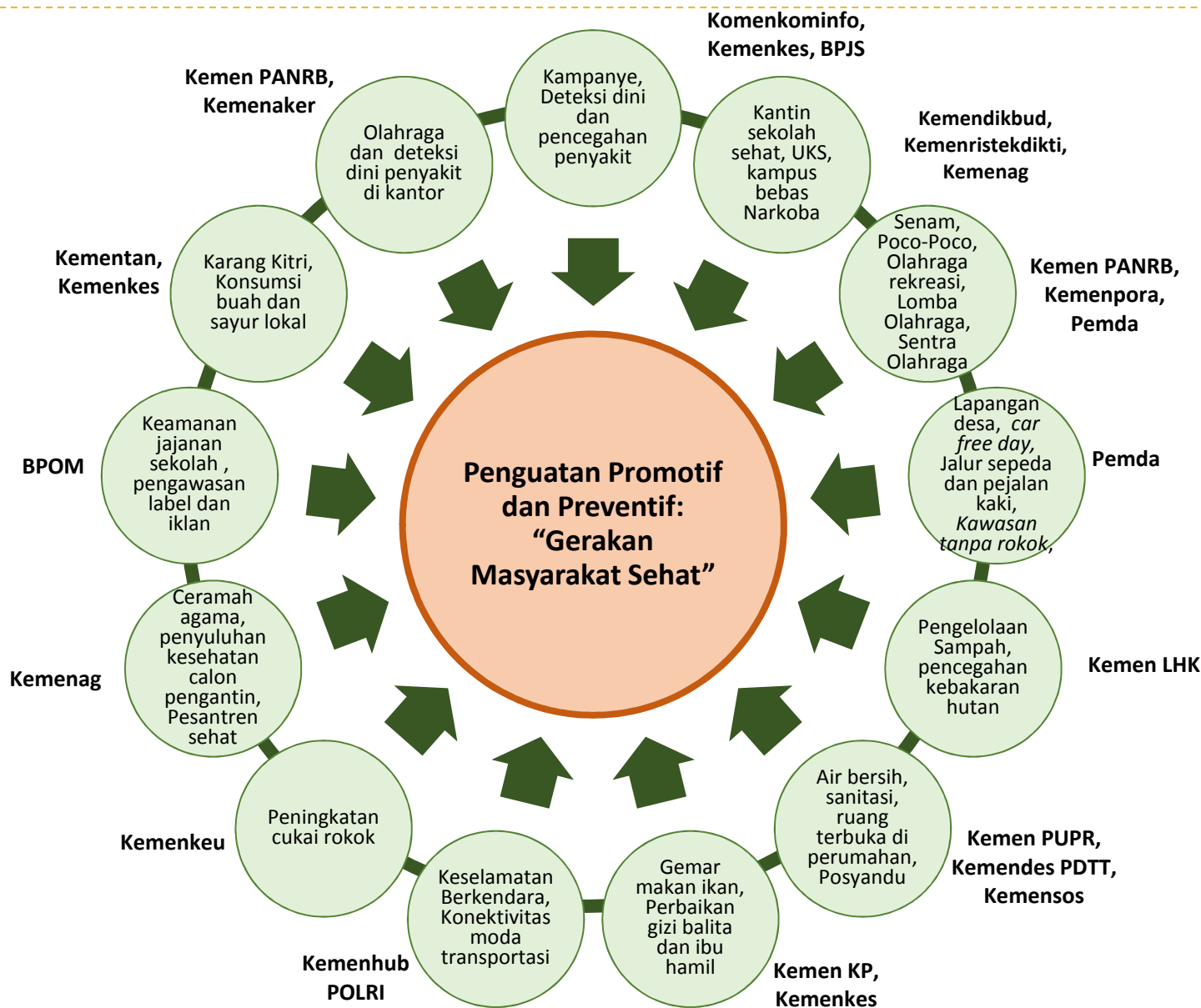




PEMBANGUNAN KESEHATAN

Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat”

EL 2





PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2019
Akses Air Minum Layak	70%	70,25%	77%	84%	100%
Akses Sanitasi Layak	69,42% Akses Layak: 61,08% Akses Dasar: 8,34%	72,2% Akses Layak: 62,4% Akses Dasar: 9,8%	77,4% Akses Layak: 66,3% Akses Dasar: 11,1%	83,2% Akses Layak: 70,7% Akses Dasar: 12,4%	100% Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15%
Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan	38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)	38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)	38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)	38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)	38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)
Pengurangan Tempat Tinggal (<i>Backlog</i>) berdasarkan Perspektif Penghuni *	7,6 Juta	7 Juta	6,5 Juta	6 Juta	5 Juta

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
5. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Masyarakat peduli lingkungan (*Reduce, Reuse, Recycle*; hemat air, penanganan sampah, lingkungan sanitasi bersih dan sehat)
2. Penegakan hukum dan disiplin (tata ruang, membayar kewajiban air minum, listrik, dll.)

Pencapaian target termasuk program “satu juta rumah”.

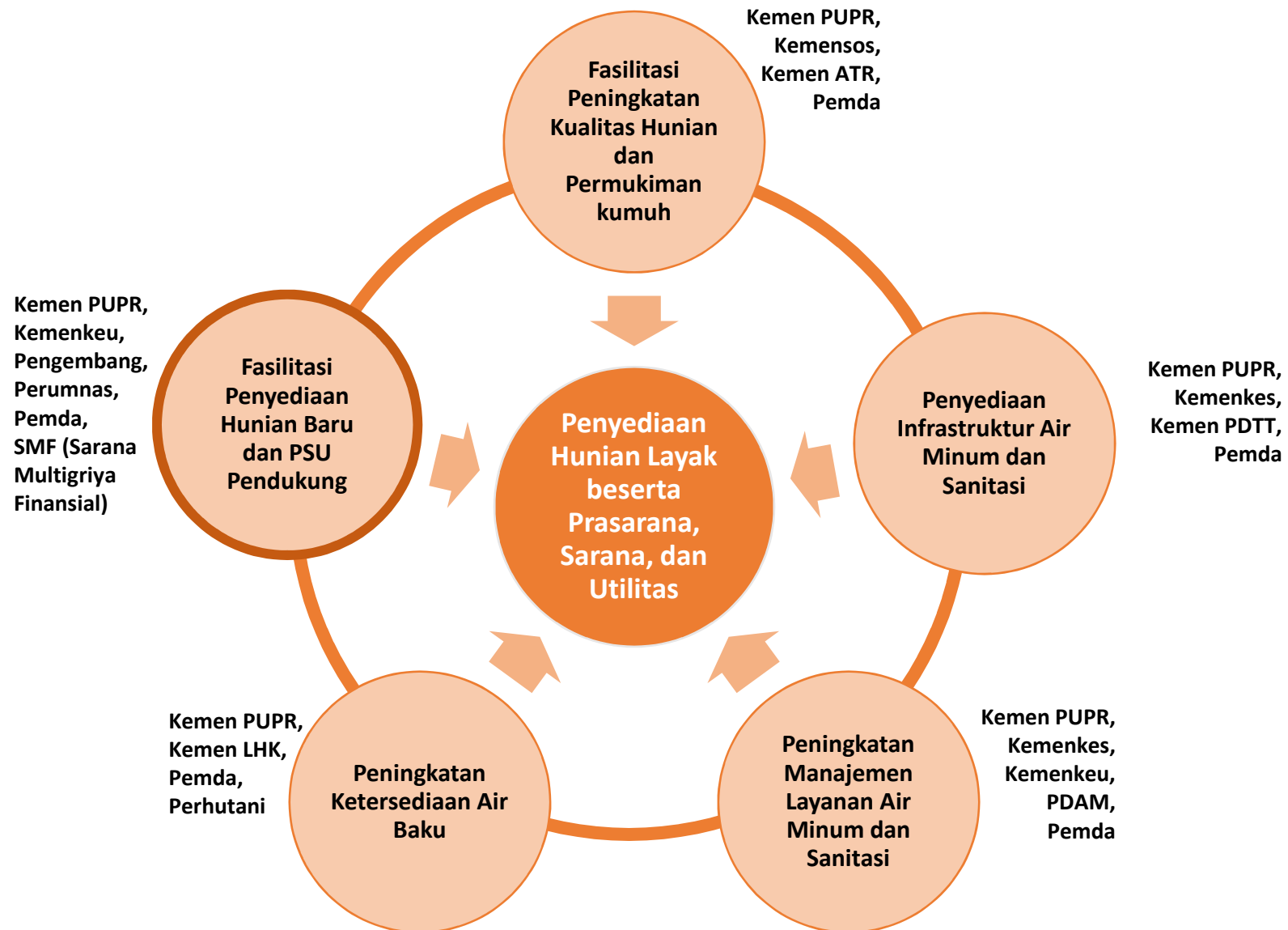


PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perencanaan Terintegrasi



EL 1

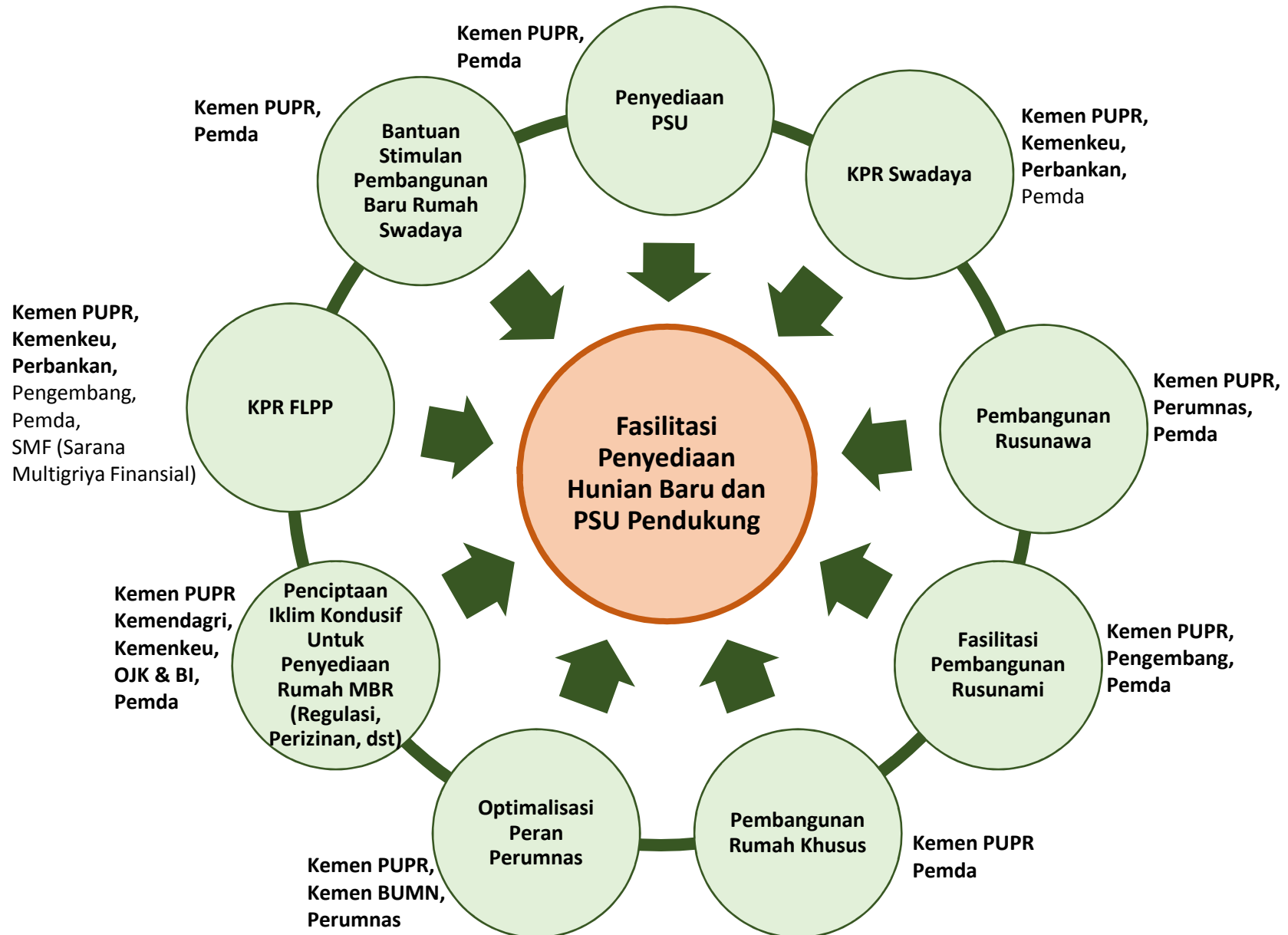




PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Pendukung

EL 2





PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan



PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan					
Produksi Pangan Utama: Padi (Juta Ton)	70,6	75,0	76,2	77,0	82,0
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:					
Gandum (Juta Ton)	19,1	19,8	21,4	22,4	24,1
Kelapa (Juta Ton)	0,92	0,98	1,50	1,90	2,60
Produksi Gula (Juta Ton)	2,6	2,6*	2,8	3,0	3,8
Produksi Sumber Protein:					
Daging Sapi (Juta Ton)	0,45	0,42*	0,59	0,64	0,76
Ikan (Juta ton)	10,6	13,6	14,8	16,0	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:					
Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta mumulatif)	8,90	9,08	9,17	9,52	9,89
Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (ha)	2,71 (2010-2014)	0,48**	0,30**	0,64**	3,01 (2015-2019)
Pembangunan irigasi tambak (Ribuan ha, umulatif)	189,75	195,58	203,48	229,45	304,75
Pembangunan waduk (landbreaking)	16 (on going)	13	8	9	49 (2015-2019)

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi

kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

Arah Kebijakan:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN:** Padi: (i) penyelesaian pengaman lahan berkelanjutan (**menahan konversi sawah**) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan:** (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik pangan
- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat:** (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur, buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan:** benih adaptif, perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

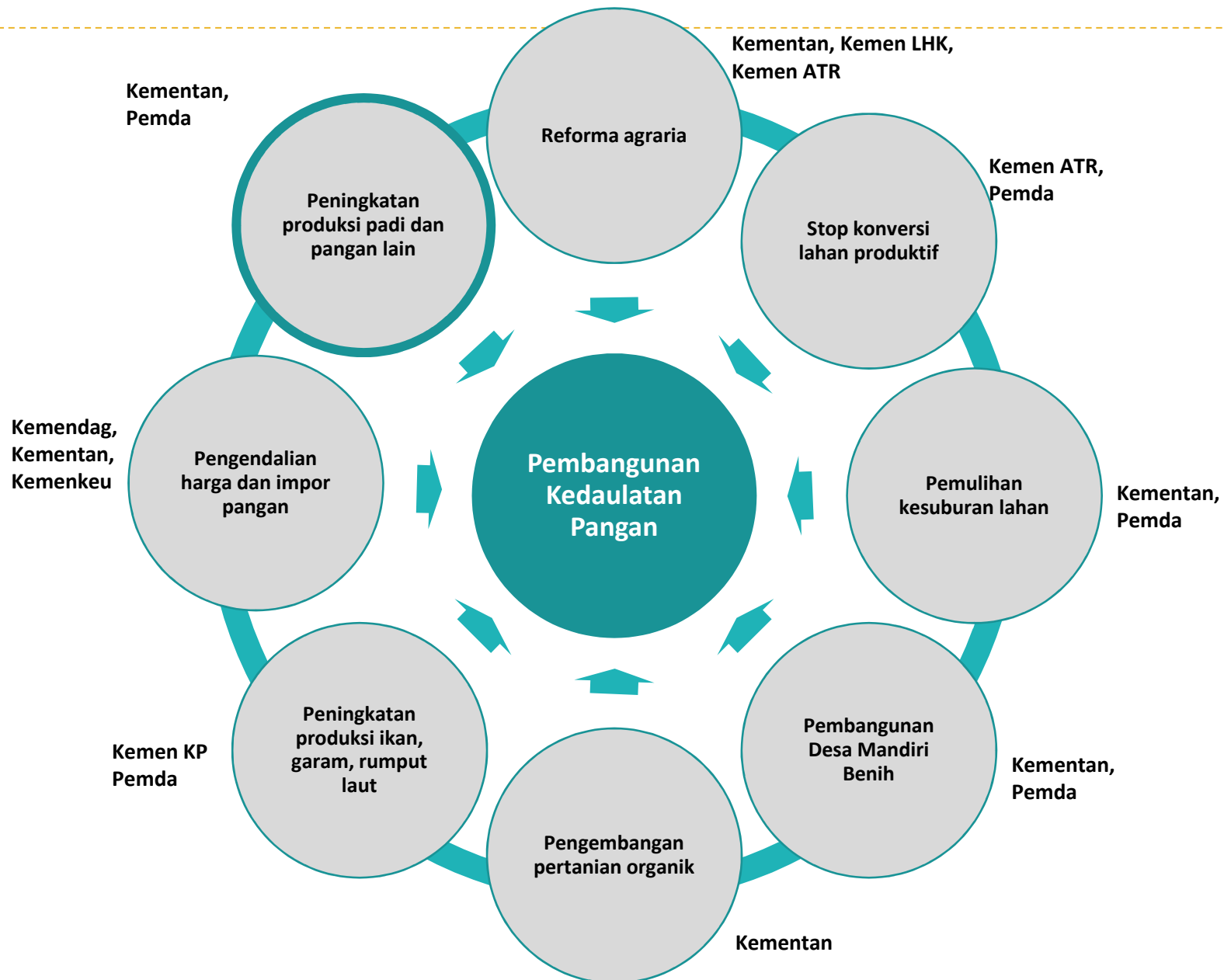
- Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta "Food Waste" di meja makan
- Mendorong kreativitas dan inovasi
- Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
- Penegakan hukum dan disiplin



PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

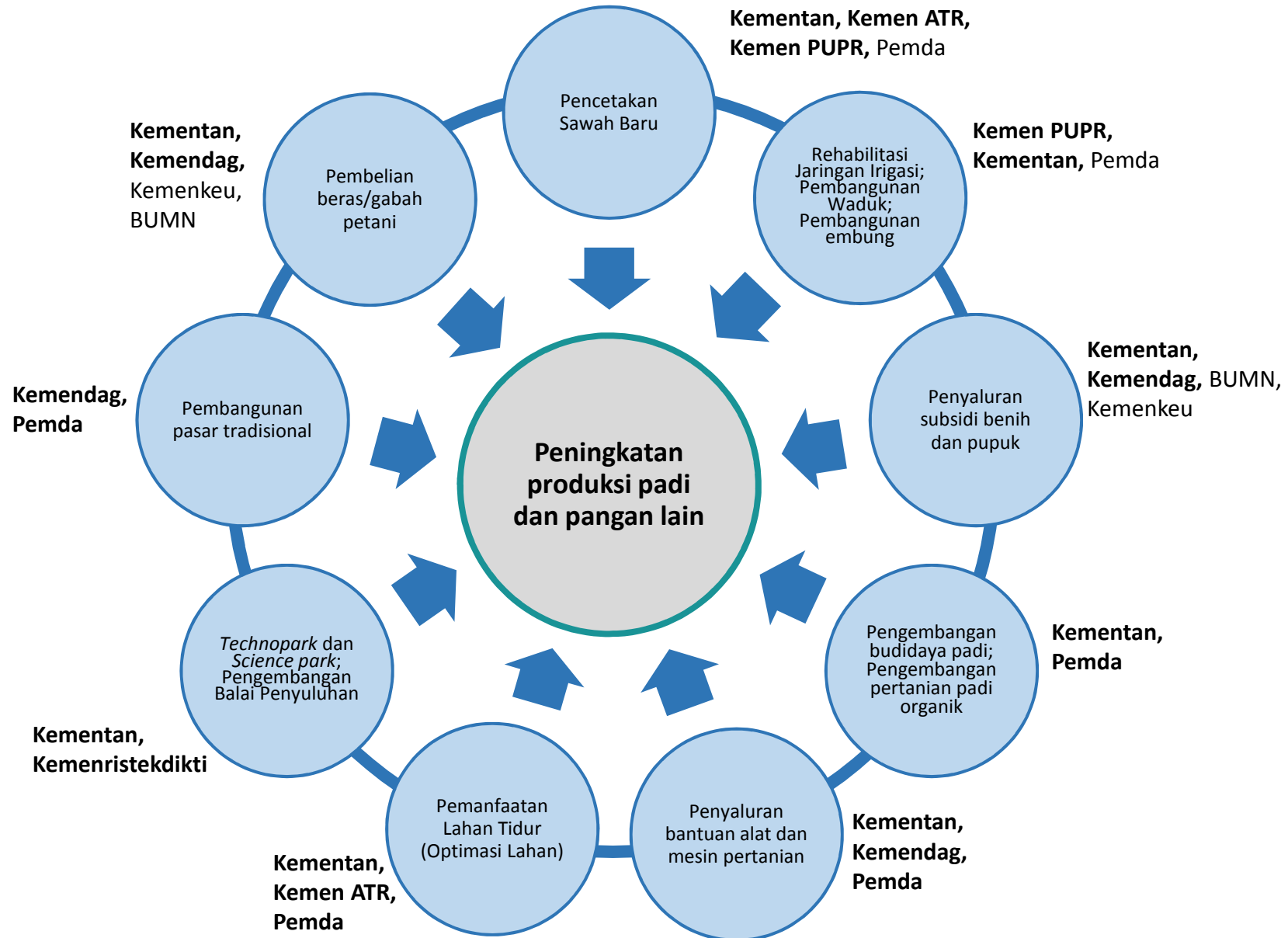




PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Perencanaan Terintegrasi Peningkatan Produksi Padi

EL 2





PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2019
Indeks Elektrifikasi	84,1%	88,5%	90,2%	91,1%	96,6%
Consumption Listrik Perkapita (Kwh)	843	914	985	1.058	1.200
Peningkatan Produksi Sumber Daya Energi:					
Minyak Bumi (ribu BM/hari)	789	788	830	780	700
Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.455	1.194	1.155	1.175	1.295
Batubara (juta Ton)	458	393	419	413	400
Penggunaan Dalam Negeri (DMO):					
Gas bumi Dalam Negeri	57%	59%	61%	62%	64%
Batubara Dalam Negeri	16,6%	20,3%	26,5%	29,3%	60,0%
Pembangunan FSRU/ Regasifikasi (unit)	2	1	2	1	2
Pengembangan pipa gas (kumulatif, km)	11.960	13.458	15.330	15.364	18.322
Pembangunan SPBG (unit)	13	18	30	25	15
Pengembangan gas kota (lokasi/SR) *	5/16.949**	2/8.000**	33/121.000	46/271.500	48/374.000
Persentase EBT dalam Bauran Energi (%)	6	10	13	15	16

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara) melalui lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (*shale gas* dan CBM)
2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi melalui cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk Sumber Daya energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif, pemberian subsidi, dan harga yang tepat untuk pemanfaatan bahan bakar nabati
4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan Sumber Daya energi untuk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan energi kota; (iii) konversi BBM ke BBG
5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan untuk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO)
6. Meningkatkan pengelolaan subsidi energi yang lebih transparan dan tepat sasaran
7. Pemanfaatan optimum Sumber Daya Energi Terbarukan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Penguatan tata kelola (*good governance*) sumberdaya energi
2. Pemanfaatan energi secara efisien
3. Pelayanan BUMN energi yang memuaskan pelanggan
4. Penambangan yang ramah lingkungan
5. Penegakan hukum dan disiplin di sektor energi

Merupakan target tahunan: 2014 dan 2015 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan swasta dan usaha dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.

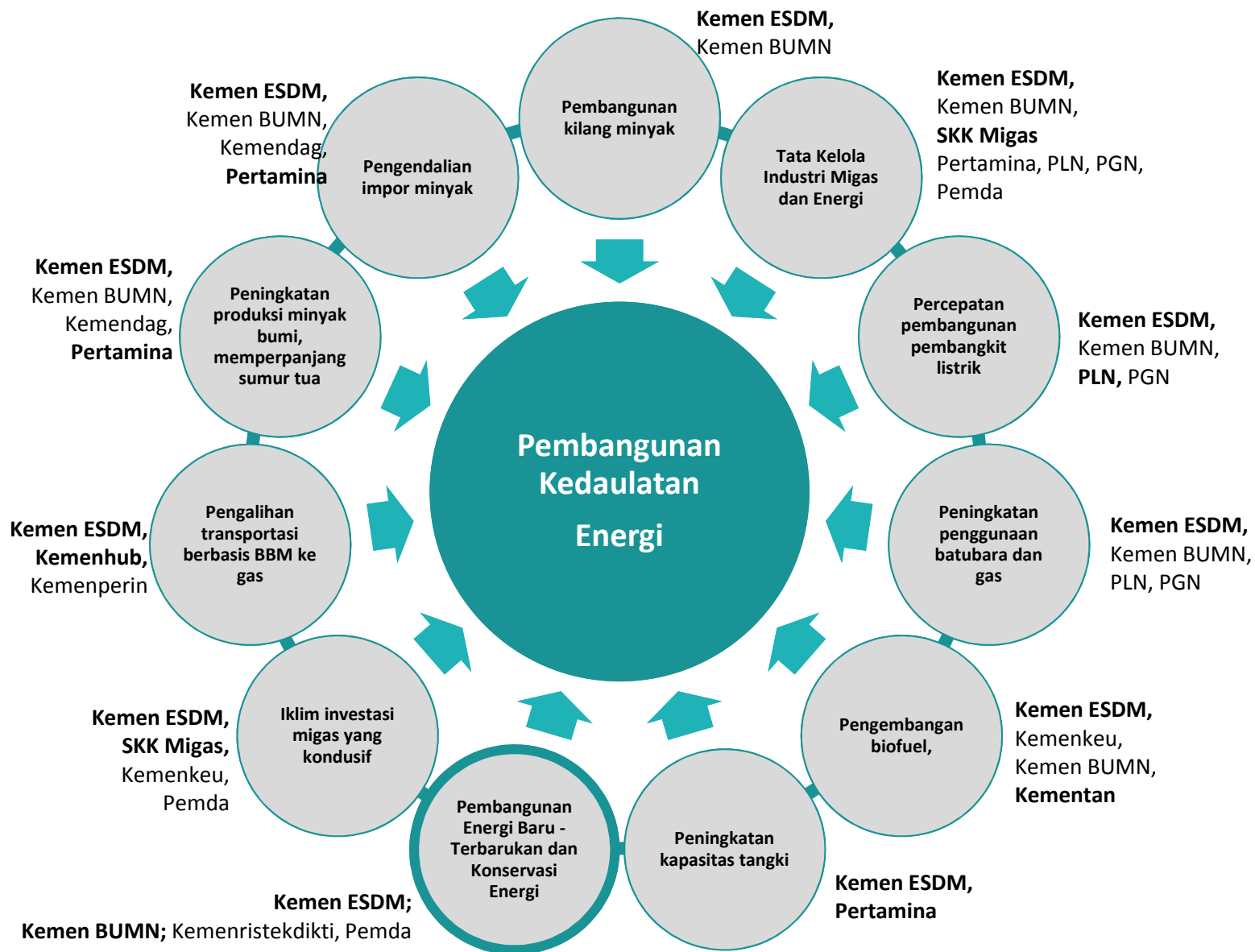
Hanya mencakup jumlah SR yang dibangun melalui APBN.



PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

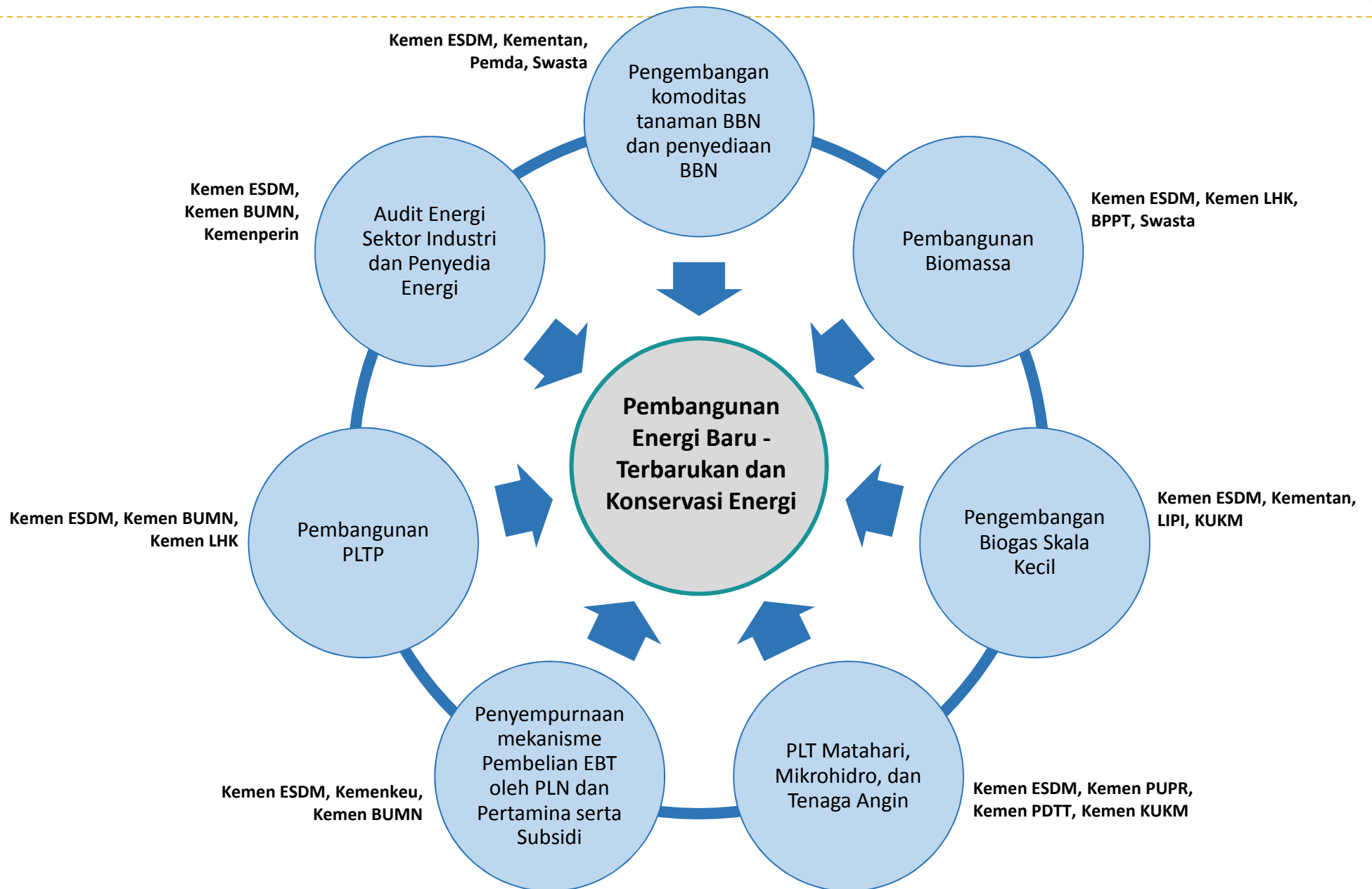




PEMBANGUNAN KEDAULATAN ENERGI

Perencanaan Terintegrasi Pembangunan EBT dan Konservasi Energi

EL 2





PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2019
Perkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim					
Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau ke PBB	13.466	750	500	target Deposit Pulau selesai	17.466 (Selesai th 2017)
Penyelesaian batas maritim antar negara	1 negara	1 negara	1 negara	1 negara	9 negara
Pencegahan Tindakan Perikanan Illegal					
Peningkatannya ketaatan pelaku perikanan	52%	66%	73%	76%	87%
Penguatan Konektivitas Nasional:					
Pembangunan pelabuhan untuk menunjang tol	24	24	24	24	24
Pembangunan pelabuhan penyeberangan	210	15*	23*	20*	270 (kumulatif)
Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis	50 unit	30	30*	0*	104 (kumulatif)
Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kelautan					
Produksi hasil kelautan (juta ton)	28,3	33,1	35,4	39,4	40-50
Perikanan (Tangkap & Budidaya)	10,6	13,6	14,8	16,0	18,8
Perikanan Laut	10,1	10,6	11,1	13,4	19,5
Perikanan Air	2,5	3,3	3,6	3,8	4,5
Pembangunan pelabuhan perikanan	21 unit	22 unit	22 unit	22 unit	24 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi laut	15,7 juta ha	16,5 juta ha	17,1 juta ha	17,9 juta ha	20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen d 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI
3. Penguatan lembaga pengawasan laut
4. Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana
5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda
6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan
8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Perubahan *mindset* sebagai bangsa maritim
2. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran Per
3. Penegakan hukum dan disiplin

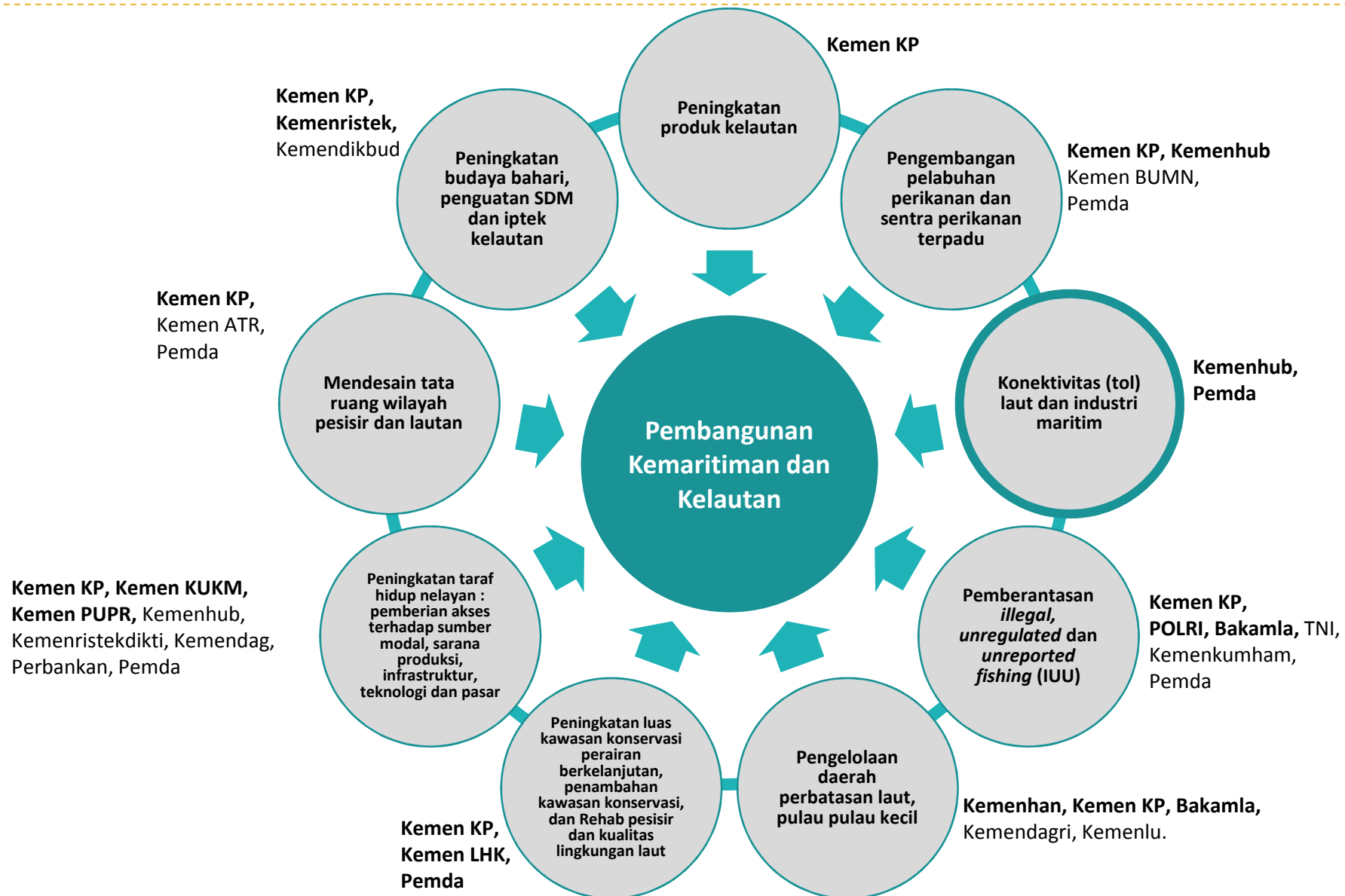
Angka: *) Mulai tahun 2016 pembangunan kapal perintis dialihkan menjadi penyelenggaraan layanan perintis, mengikuti model pelayanan udara perintis.



PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

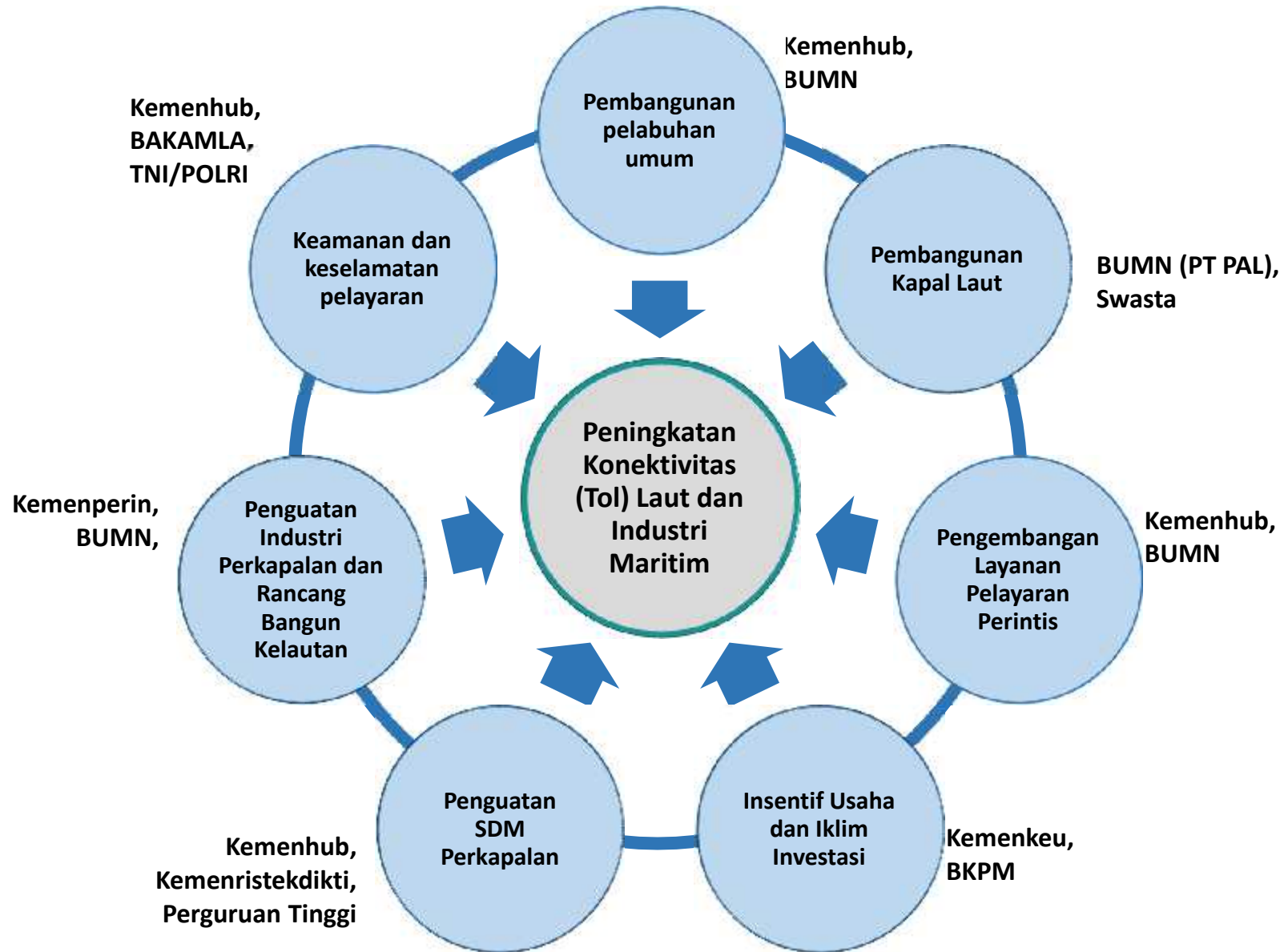




PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Perencanaan Terintegrasi Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

EL 2





PEMBANGUNAN PARIWISATA

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,4 juta	9,7 juta	12,0 juta	13,0 juta	20,0 juta
Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	259 juta	260 juta	263 juta	275 juta
Devisa (triliun rupiah) (kurs Rp12.000)	133,9	150	172,8	185,9	260

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungan nyaman bagi pelancong
- Petugas yang ramah dan melayani
- Penegakan hukum dan disiplin

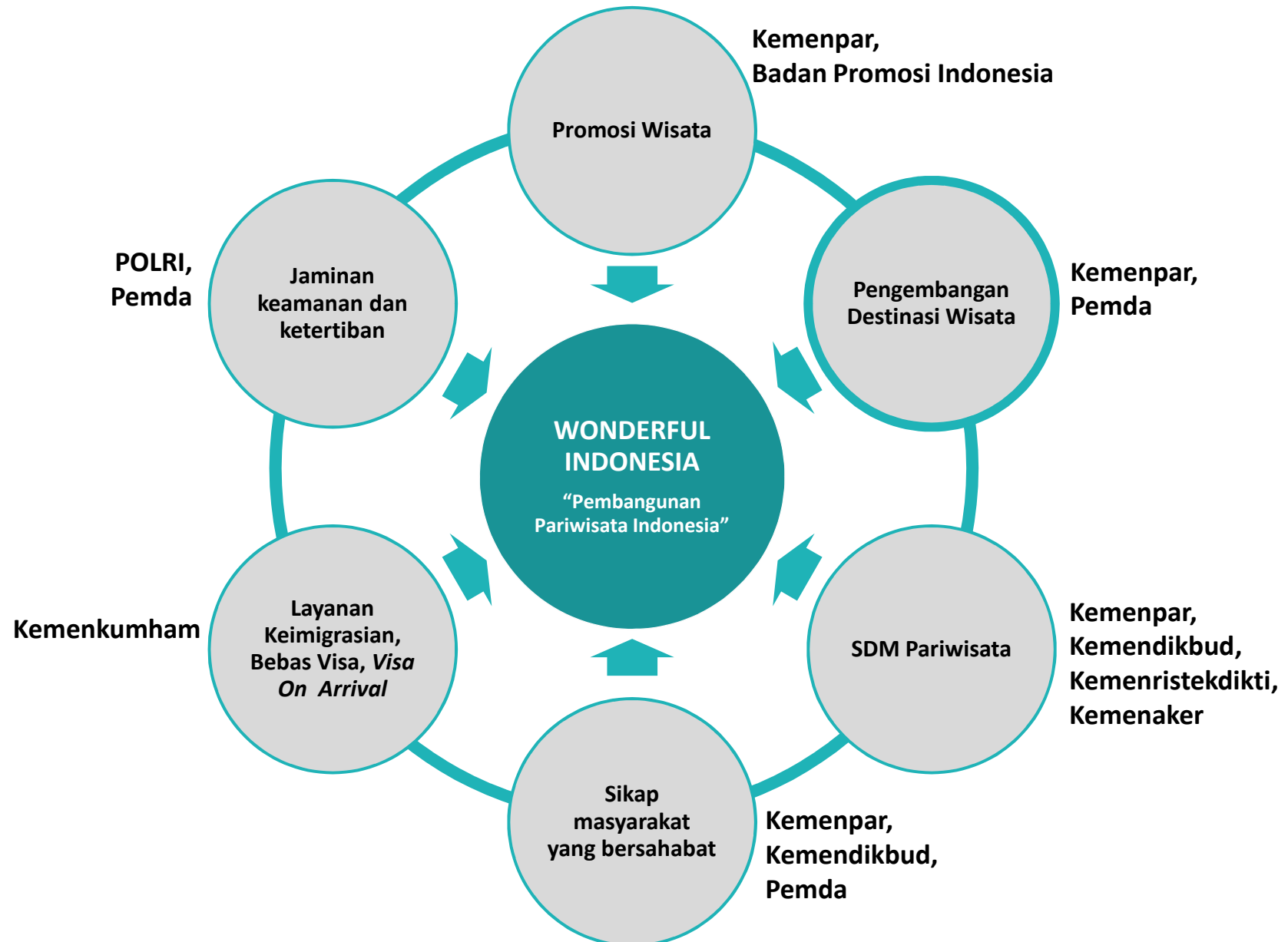


PEMBANGUNAN PARIWISATA

Perencanaan Terintegrasi



EL 1

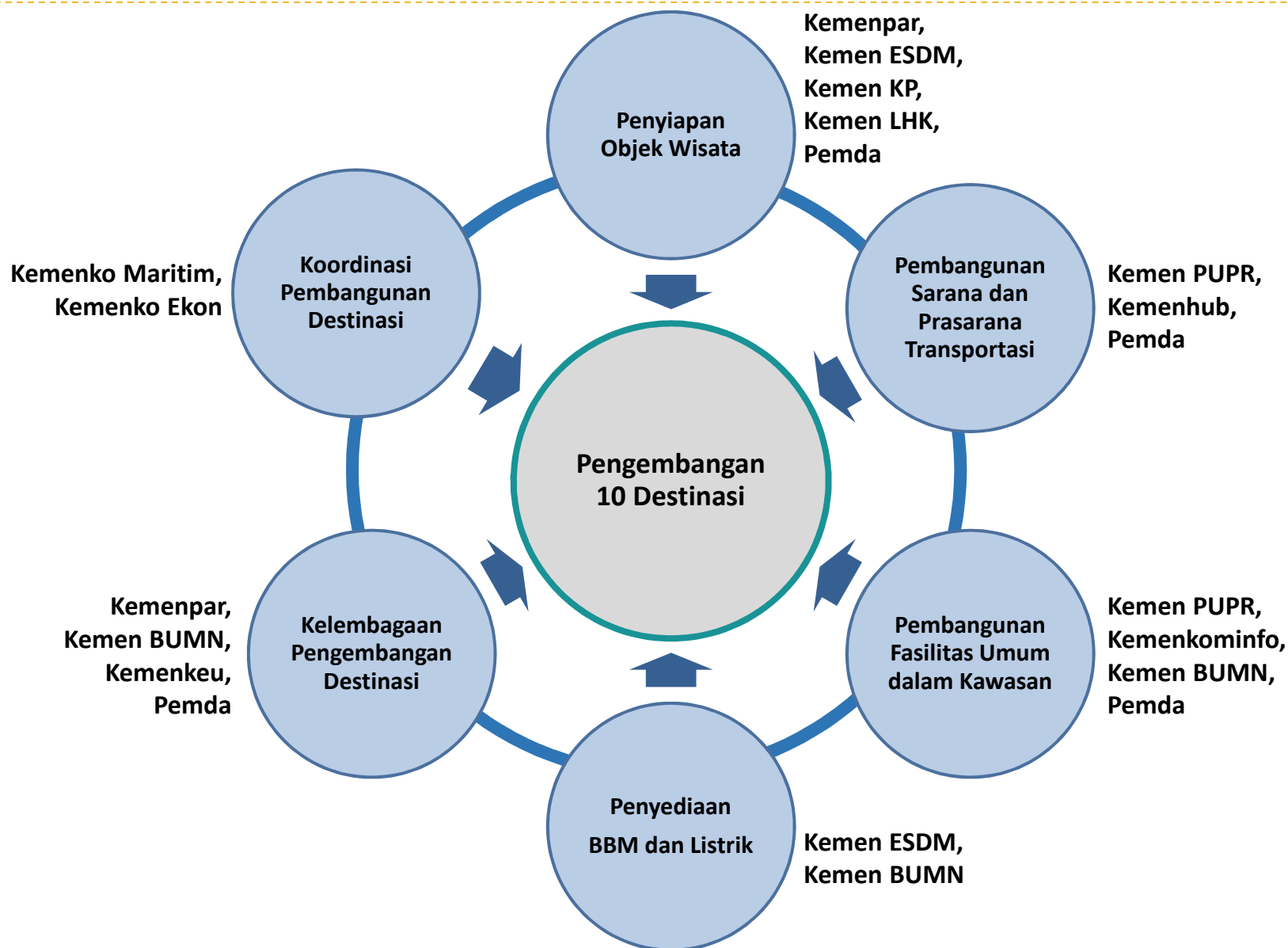




PEMBANGUNAN PARIWISATA

Perencanaan Terintegrasi Pengembangan 10 Destinasi

EL 2





PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Sasaran Pertumbuhan Industri					
Industri (%) <i>(Realisasi dan Proyeksi)</i>	4,70 (4,63)	6,10 (4,25)	6,90 (5,40)	7,40 (6,50)	8,60 (8,00)
Kontribusi dalam PDB (%) <i>(Realisasi dan Proyeksi)</i>	20,70 (21,01)	20,80 (20,84)	21,00 (20,95)	21,10 (21,35)	21,60 (21,76)
Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK					
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa	7	7	7 lama + 3 baru	10 lama + 2 baru	12 lama + 2 baru
Kawasan Industri	n.a	n.a	n.a	14	14

ARAH KEBIJAKAN:

Pertumbuhan Industri:

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa
2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah pabrik tidak sekitar 9 ribu usaha
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor, nilai tambah per tenaga kerja)

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA
→ (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

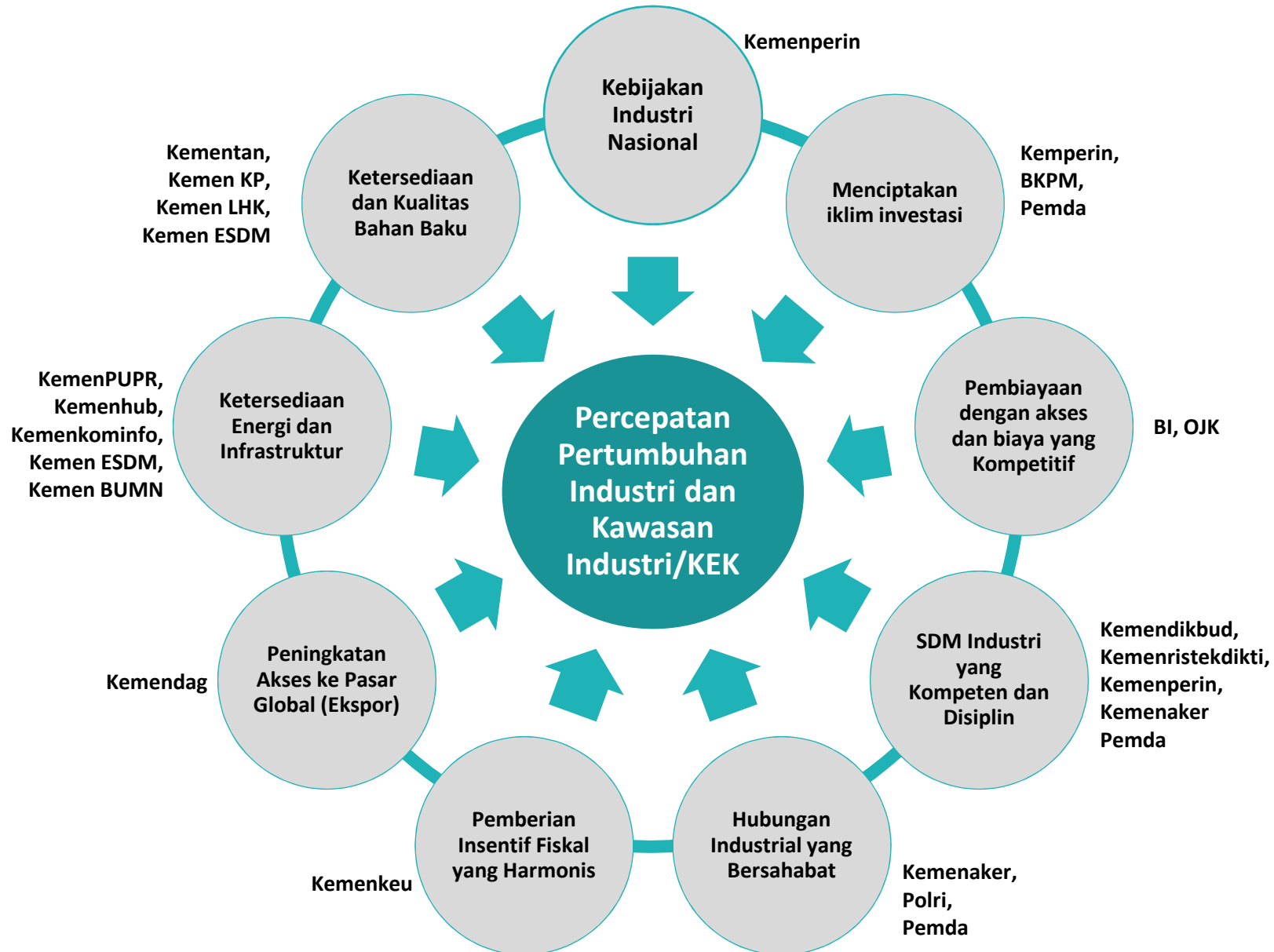
- Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri
- Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi
- Penegakan hukum dan disiplin



PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK

Perencanaan Terintegrasi

EL 1



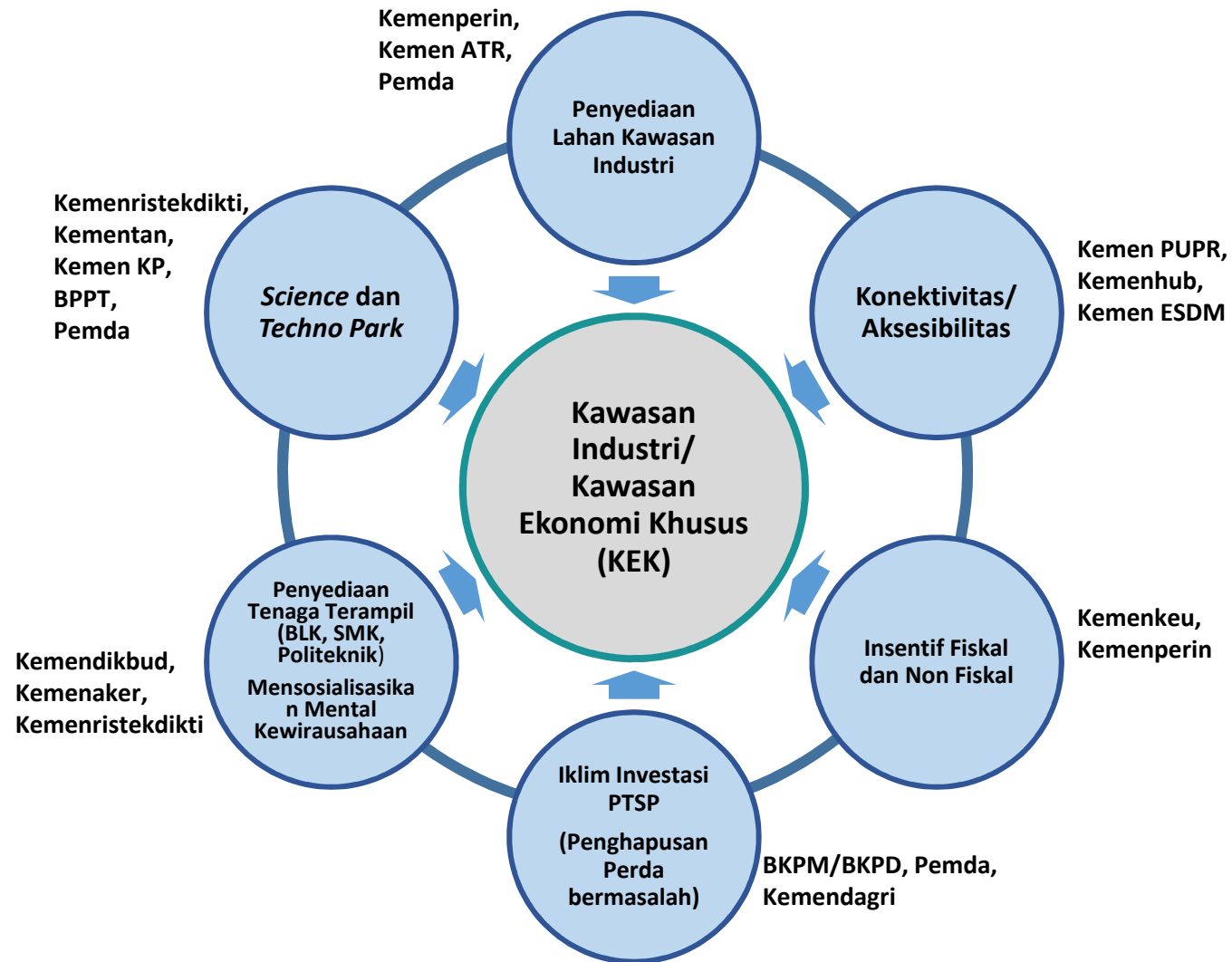


PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI/KEK

Perencanaan Terintegrasi



EL 2





PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan



PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014	2015	2016	2017	2019
Penciptaan lapangan kerja					
Penyediaan lapangan kerja	1,73 juta	191,2 ribu	± 2 juta	± 2 juta	± 2 juta
Bagian kerja formal (%)	40,5	42,1	43,6	46,0	51,0
Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja					
Partisipasi Kerja Orang)	523.870	815.705	810.000	1.000.000	1.200.000
Sertifikasi (orang)	151.250	93.813	123.000	150.000	200.000
Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil					
Saluran dan pendampingan usaha (orang/unit usaha)	22.790 / 52.720	31.540/ 58.186	31.067/ 84.016	42.000/ 89.000	43.000/ 97.000
Wirausaha (Orang)	91.000	70.400	112.600	138.000	150.000
Saluran KUR (Rp triliun)	3,409	3,04	10,5	10,5	
Akses terhadap Pelayanan Dasar					
Pemilikan akte lahir	64,6%	72,3%	74,0%	75,0%	77,4%
Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan	n.a	n.a	n.a	Ditentukan kemudian	100%
Pendukung sosial bagi penduduk miskin dan rentan					
Saluran asuransi jaminan kesehatan/KIS (individu)	86,4 juta	88,2 juta	92,4 juta	94,4 juta	107,2 juta
Saluran tunai bersyarat/PKH (keluarga)	2,8 juta	3,5 juta	6 juta	7 juta	8 juta
Saluran pendidikan/KIP (anak usia sekolah)	11,9 juta	20,3 juta	21,6 juta	21,6 juta	21,6 juta
Saluran pangan (anak tangga sasaran)	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta

Arah Kebijakan:

- Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas:
 - Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas
 - Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya
 - Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi
 - Hubungan industrial yang harmonis
- Pengembangan ekonomi produktif:
 - Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro
 - Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha
 - Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
- Perluasan peningkatan pelayanan dasar, melalui:
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana
 - Pengembangan dan penguatan sistem terkait penyediaan layanan dasar
- Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:
 - Efektivitas program Bidik Misi
 - Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS
 - Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

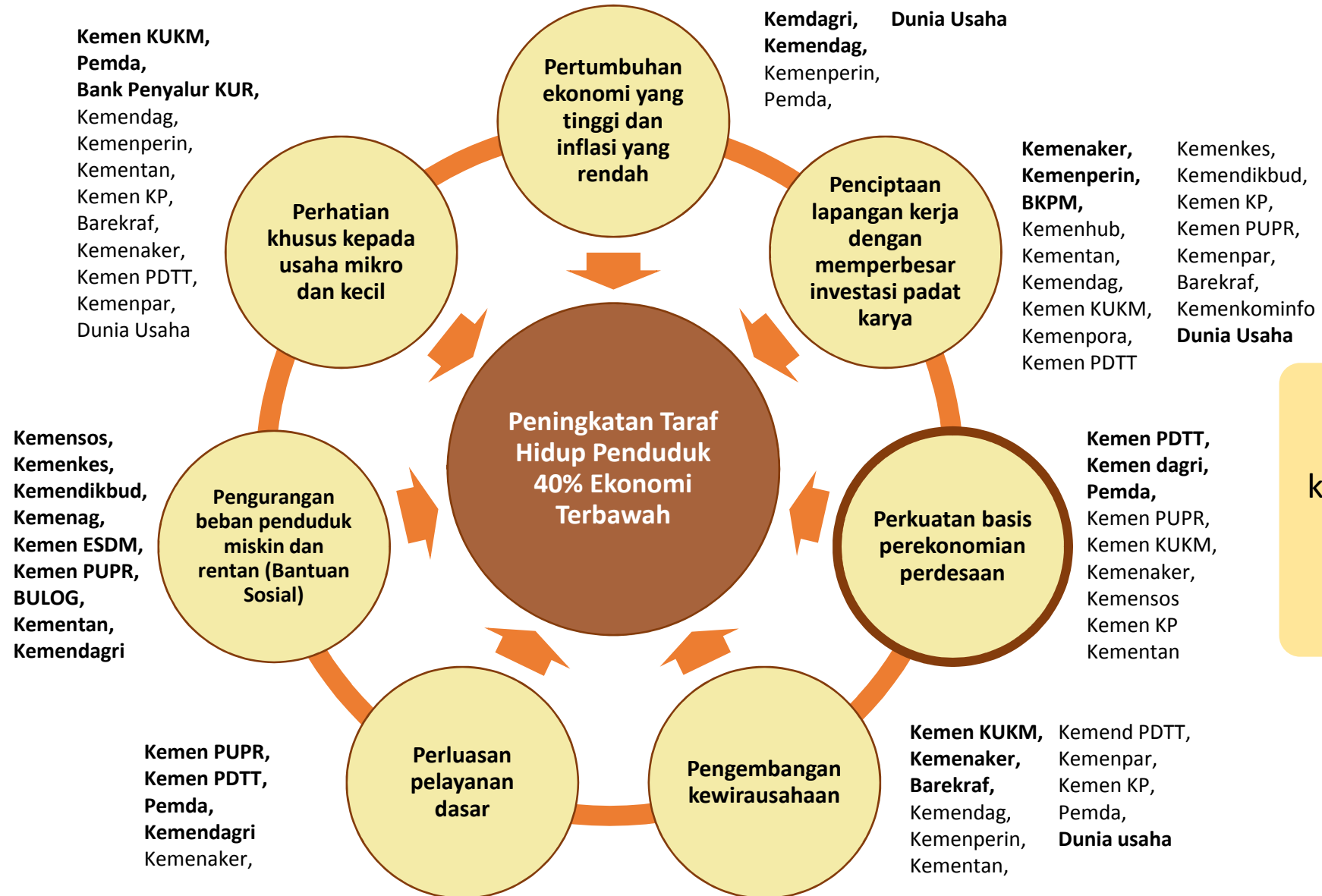
- Redesain program yang memungkinkan perubahan *mindset* masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat
- Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana
- Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat
- Penegakan aturan dan disiplin



PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1



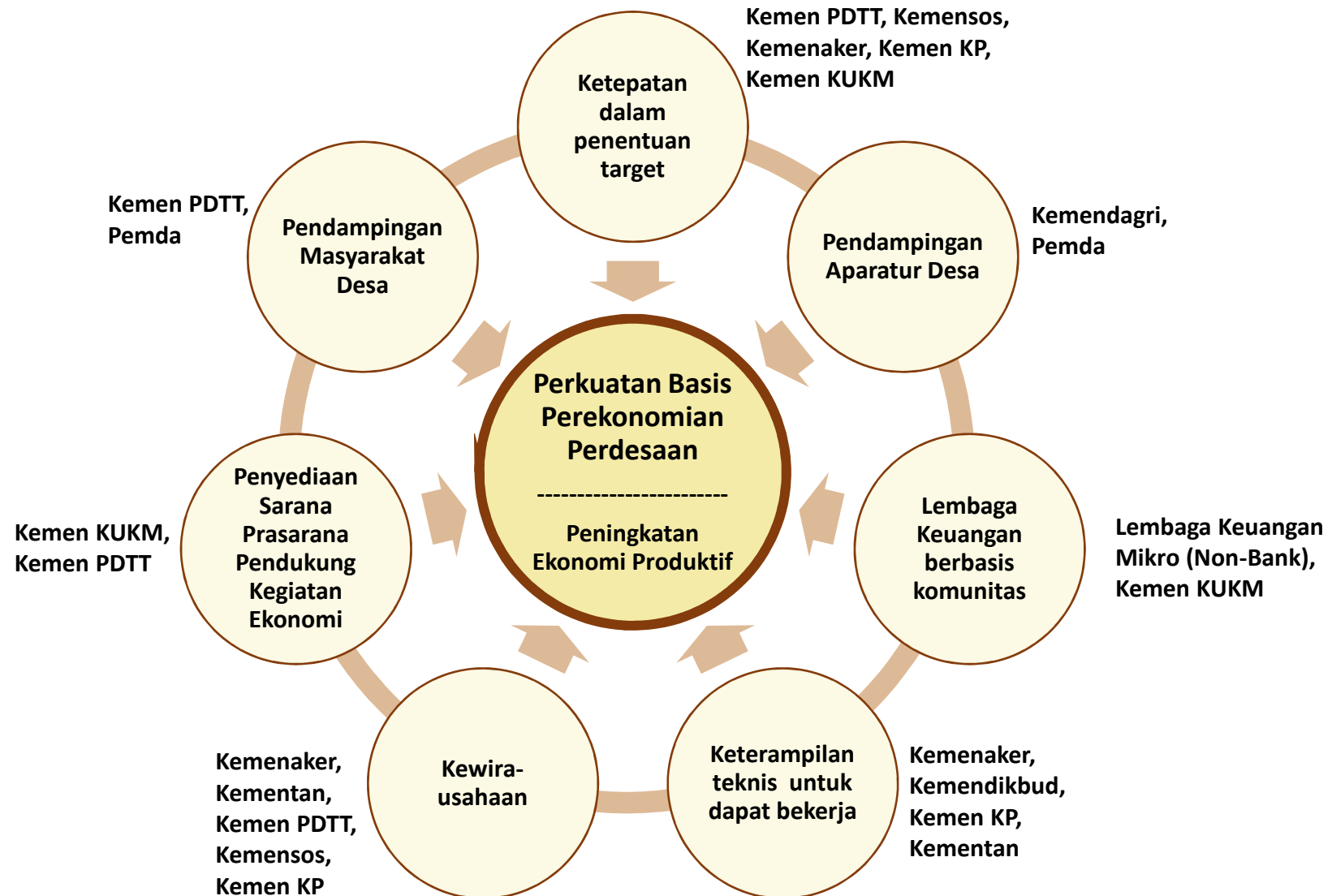
Alokasi diprioritaskan kepada program yang sudah teruji manfaatnya.



PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

Perencanaan Terintegrasi Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

EL 2





PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN DAERAH TERTINGGAL

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA					
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)	3 (111 lokasi prioritas)	50 lokpri 3 PLBN	100 lokpri 7 PLBN	10 PKSN 150 lokpri 7 PLBN	10 PKSN (187 lokasi prioritas)
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	10	30	50	92 pulau kecil terluar/terdepan
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					
Jumlah Daerah Tertinggal	122 (termasuk 9 DOB)	n.a *	n.a *	n.a *	42
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	7,10%	6,96%	7,02%	7,17%	7,24%
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	16,6%	16,0%	15,4%	14,9%	14,0%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	68,5	68,1	68,5	68,8	69,6

Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahun sekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Arah Kebijakan:

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

1. Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan
2. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi

Pembangunan Daerah Tertinggal

1. Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas
2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan
3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik
4. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan pelayanan imigrasi, kepabeanan, karantina dan keamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
2. Mengubah sikap dan cara pandang bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang namun menjadi beranda negara

Pembangunan Daerah Tertinggal:

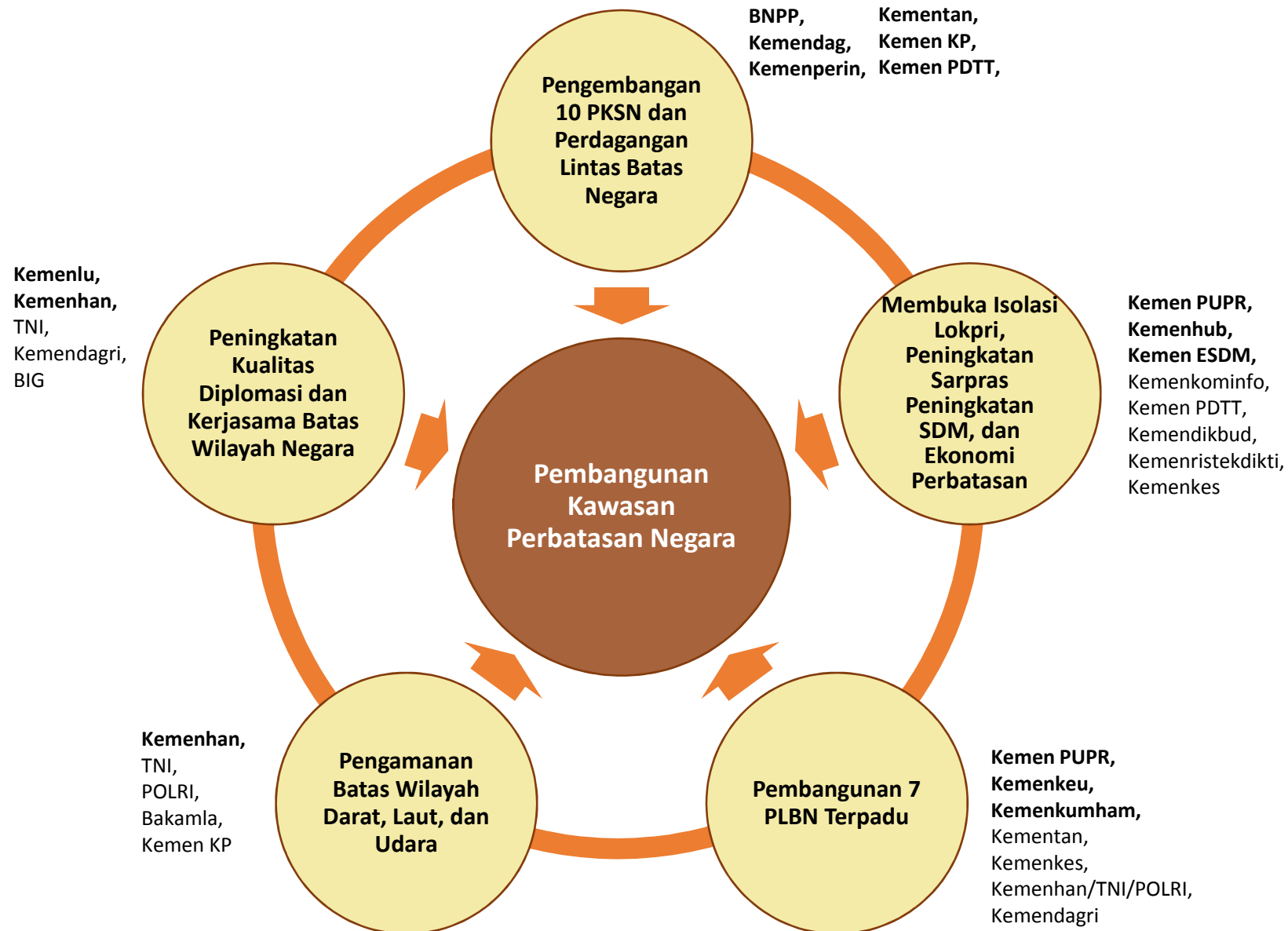
1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat
2. Membangun semangat kompetisi untuk mengejar ketertinggalan
3. Penegakan hukum dan disiplin



PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

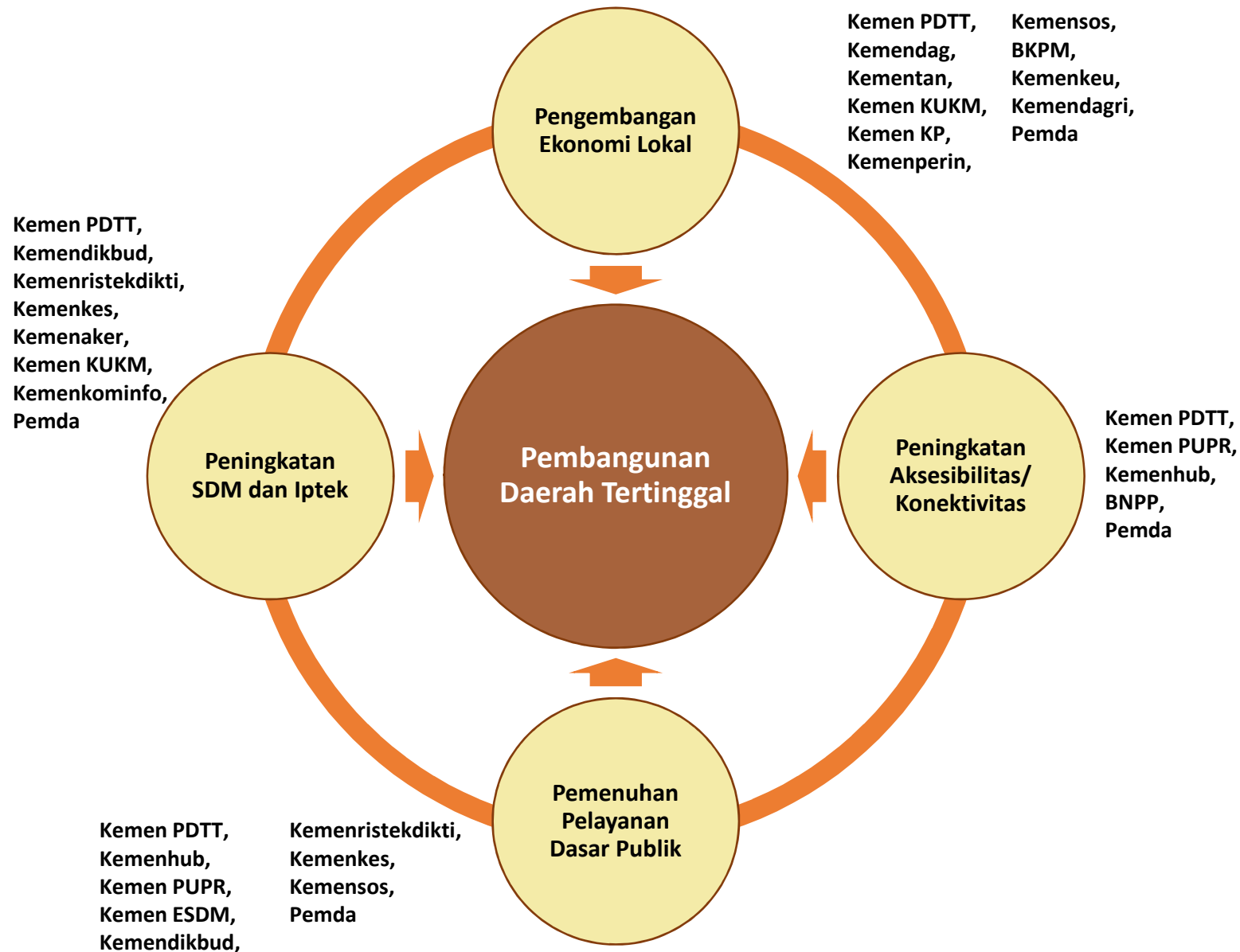




PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Perencanaan Terintegrasi

EL 1



Alokasi diprioritaskan kepada program yang sudah teruji manfaatnya.



PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
PEMBANGUNAN PERDESAAN					
Penurunan desa tertinggal	n.a	Sampai 500 desa	1.000 desa	1.500 desa	s.d. 5.000 desa tertinggal
Peningkatan desa mandiri	n.a	Sedikitnya 200 desa	400 desa	600 desa	paling sedikit 2.000 desa
PEMBANGUNAN PERKOTAAN					
Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi	2	1	4	7	2+5 (usulan baru)
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	4	5	10	20 dioptimalkan perannya
Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	n.a	13	14	14	39 pusat pertumbuhan yang diperkuat
Pembangunan 10 Kota Baru Publik	n.a	3	6	2	10 Kota Baru

Arah Kebijakan:

Pembangunan Perdesaan:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi
3. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
4. Sinergi program pembangunan desa terpadu yang dikoordinir oleh pemerintah daerah
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan/transmigrasi yang menuju klusterisasi permukiman
7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota

Pembangunan Perkotaan:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
2. Penerapan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) : tertata baik, aman, nyaman, dan layak huni (memiliki taman, fasilitas olahraga, dan sarana rekreasi)
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

Pembangunan Perdesaan:

- Pemilihan program yang sudah teruji dan membawa manfaat kepada rakyat dan dilaksanakan secara terpadu
- Peningkatan produktivitas sumber daya manusia, dan mempertahankan modal sosial masyarakat desa/ transmigrasi

Pembangunan Perkotaan:

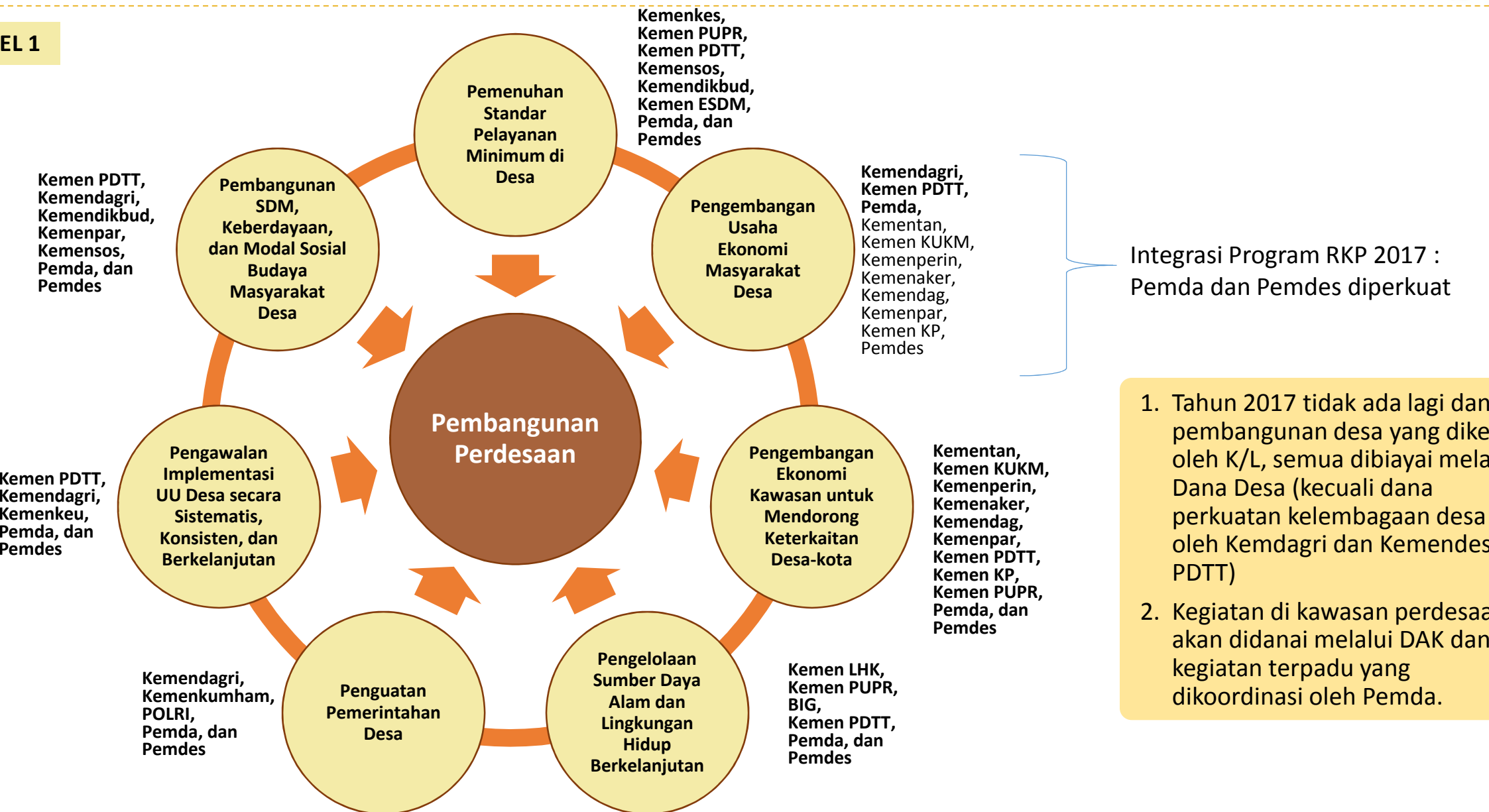
- Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan
- Penegakan hukum dan disiplin



PEMBANGUNAN PERDESAAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1



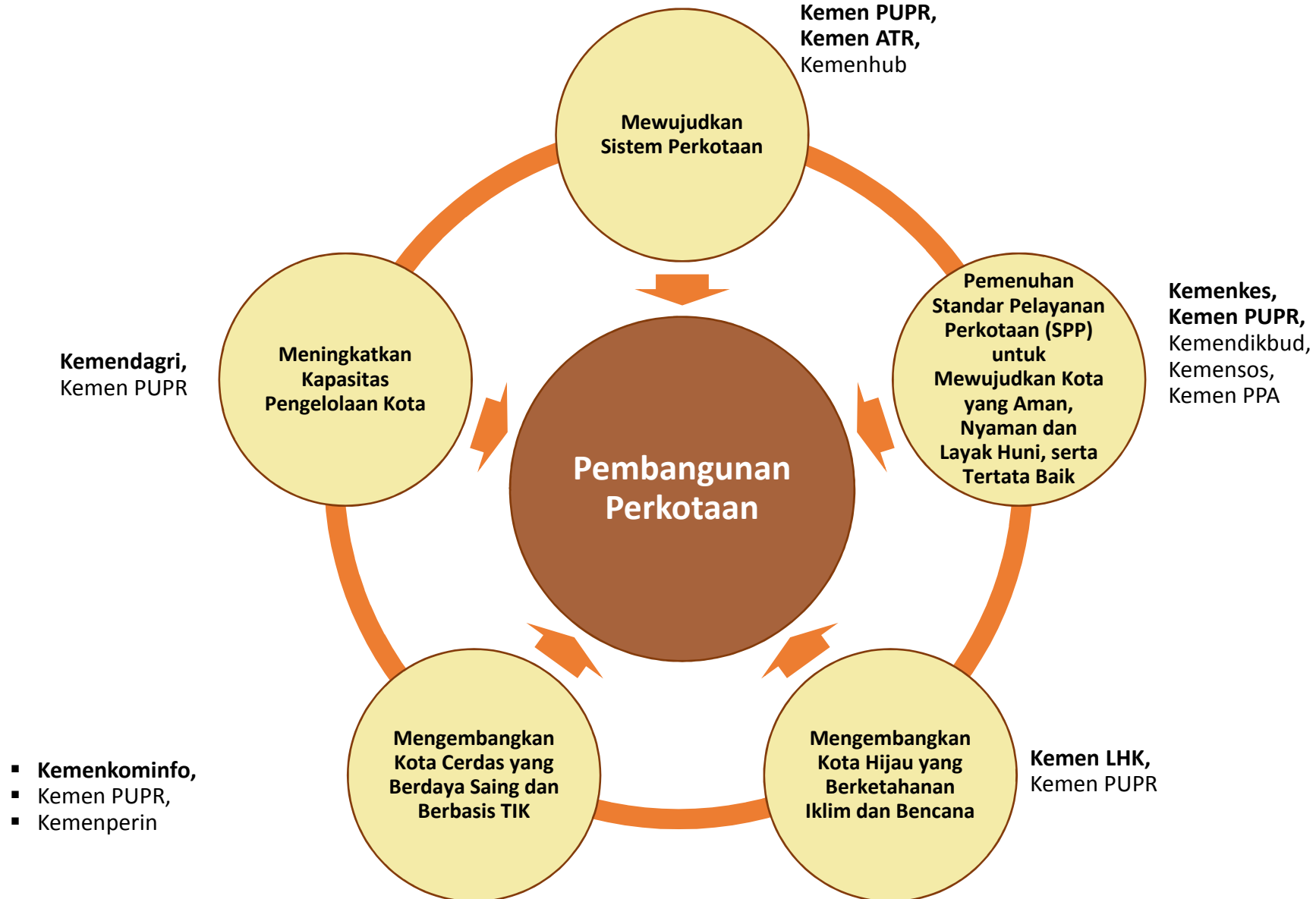
1. Tahun 2017 tidak ada lagi dan pembangunan desa yang dikoordinasi oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDPTT)
2. Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.



PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Perencanaan Terintegrasi

EL 1





PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Sasaran dan Arah Kebijakan



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Pembangunan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)	163	40	45	40	163 (kumulatif)
Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	7 – 8	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3 – 4
KA API					
Penggunannya jalur KA termasuk jalur ganda(Km)	954,43	186,99	619,49	902,3	3.258 (kumulatif)
Penggunannya jalan baru (Km)	1.268	512	490	502,5	2.650 (kumulatif)
Pembangunan jalan tol (Km)	820	135	104	253	1.000 (kumulatif)
Bandara					
Penggunannya bandara baru /peningkatan bandara	1	15	15 (lanjutan)	12 (lanjutan)	15 (kumulatif)
Subsidi					
Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)					
Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan					
Perkeretaapian (trayek)					
Subsidi Perintis Angkutan Udara					
Subsidi Perintis Angkutan Darat					
Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)					
Perkotaan					
Pasar angkutan umum (%)					
Pembangunan kereta perkotaan (kota)					
Pembangunan BRT (kota besar)					
Keamanan					
Pengurangan rasio angka kecelakaan kereta api					
per 1 juta-km perjalanan kereta api)					
Pengurangan angka fatalitas korban kecelakaan					
transportasi jalan (% dari kondisi <i>baseline</i>)					
Komunikasi					
Penggunaan tulang punggung serat optik nasional di					
kota kabupaten/kota					

Arah Kebijakan:

- Mempercepat pembangunan transportasi yang memperkuat konektivitas nasional (laut, darat dan udara)
- Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis
- Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional
- Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional
- Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan
- Mempercepat pembangunan infrastruktur *broadband* dan menjangkau seluruh wilayah R.I
- Mengembangkan transportasi massal perkotaan

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Pembangunan yang berorientasi Indonesia sentris
- Masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan pembangunan yang merata dan pembangunan maritim
- Penegakan hukum dan disiplin



PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017



DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

- Revolusi Mental
- Pembangunan Pendidikan
- Pembangunan Kesehatan
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata
- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan
- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan



PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Sasaran dan Arah Kebijakan



Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2019
Keamanan dan Ketertiban					
Keamanan Perkara	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Persentase kepuasan publik atas layanan penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, dan Hakim).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (P21)	176.710	178.495	180.279	182.081	185.740
Keamanan MEF TNI (%)	28,1	36,0	44,5	53,1	71,2
Kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,0	35,0	41,6	45,5	53,8
Kelembagaan institusi yang melaksanakan pengamanan informasi	15	20	25	30	40
Operasi terpadu Keamanan Laut	11	12	12	12	12
Kelembagaan penyalahgunaan narkoba (%)	0,08	0,05	0,03	0,03	0,03
Kejadian terorisme (kali)	9	10	1	0	0
Kepercayaan dan Kepastian Hukum					
Pembangunan Hukum (Skala 0-1)	0,68	0,68 – 0,69	0,69 – 0,71	0,71 – 0,73	0,75
Persepsi Korupsi	34	36	38	42	50
Perilaku Anti Korupsi	3,61	3,59	3,63	3,70	3,75
Partisipasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi					
Demokrasi Indonesia	63,72	73,04	n.a	74,3	75
Kelembagaan sengketa informasi publik	32%	60%	60%	70%	90%
Pengurangan jumlah konflik kekerasan komunal	-	Menjadi <5	Menjadi <5	Menjadi <5	Menjadi <5
Reformasi Birokrasi					
TP atas Laporan Keuangan (Provinsi/Kabupaten/Kota)	74 %	78 %	82 %	87%	95 %
AKIP (Provinsi/Kabupaten/Kota)	60,24 %	65 %	70 %	75%	85 %
Reformasi Birokrasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kelembagaan masyarakat terhadap layanan publik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Arah Kebijakan:

1. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

- Peningkatan pelayanan prima kepolisian
- Keamanan laut yang terkendali
- Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba
- Peningkatan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan deteksi dini atas ancaman terorisme

2. Kepastian dan Penegakan Hukum

- Penghormatan, perlindungan atas hak azasi manusia
- Penegakan hukum dan penanganan perkara transparan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat
- Pencegahan & pemberantasan korupsi yang efektif

3. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

- Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik sipil
- Peningkatan efektivitas penanggulangan konflik dan kekerasan dalam masyarakat
- Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
- Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan
- Pemantapan peran di ASEAN dan efektifitas politik luar negeri bebas aktif

4. Reformasi Birokrasi

- Mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan birokrasi yang kreatif, efektif dan efisien
- Mewujudkan birokrasi yang berorientasi melayani

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

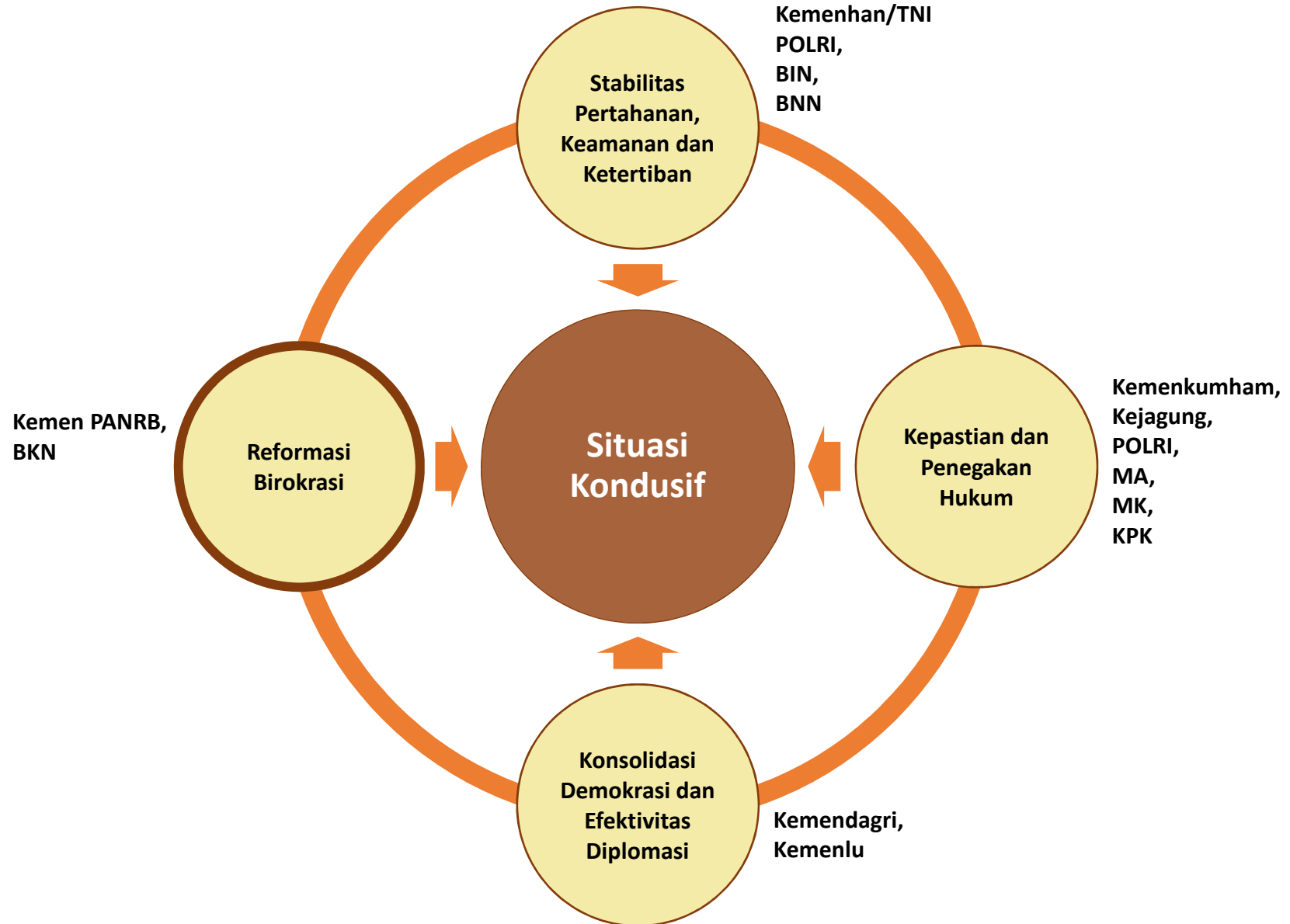
- Peningkatan disiplin masyarakat
- Peningkatan disiplin aparatur negara dan penegak hukum
- Birokrat yang profesional, melayani dan berorientasi pada pelayanan publik
- Penegakan Hukum dan Disiplin.



PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Perencanaan Terintegrasi

EL 1

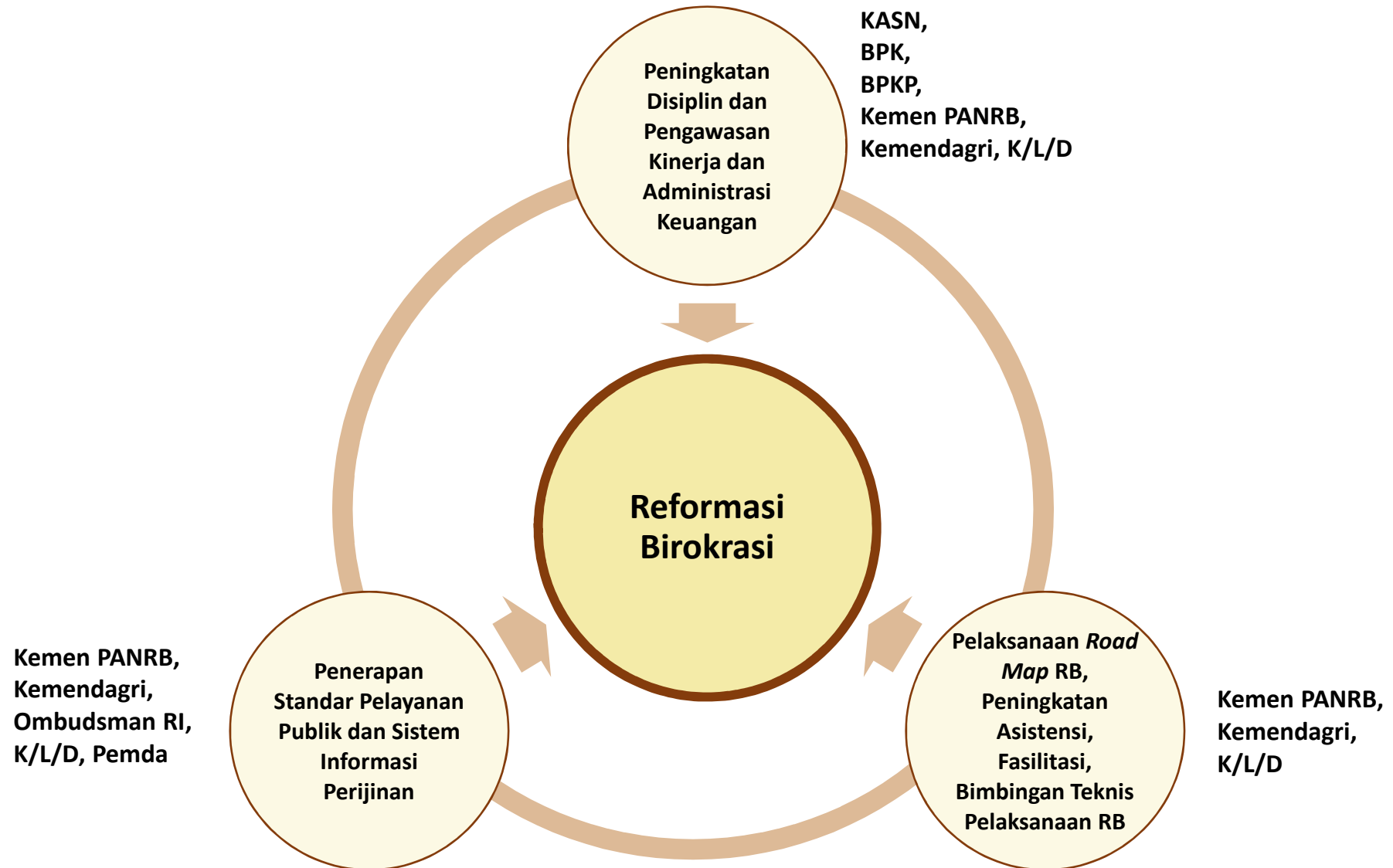




PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM

Perencanaan Terintegrasi Reformasi Birokrasi

EL 2





KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2016 (*ON GOING*)

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN D.I. Yogyakarta

EKSISTING

PEMBANGUNAN
2016

SANITASI

6,31% Akses Layak

AIR MINUM

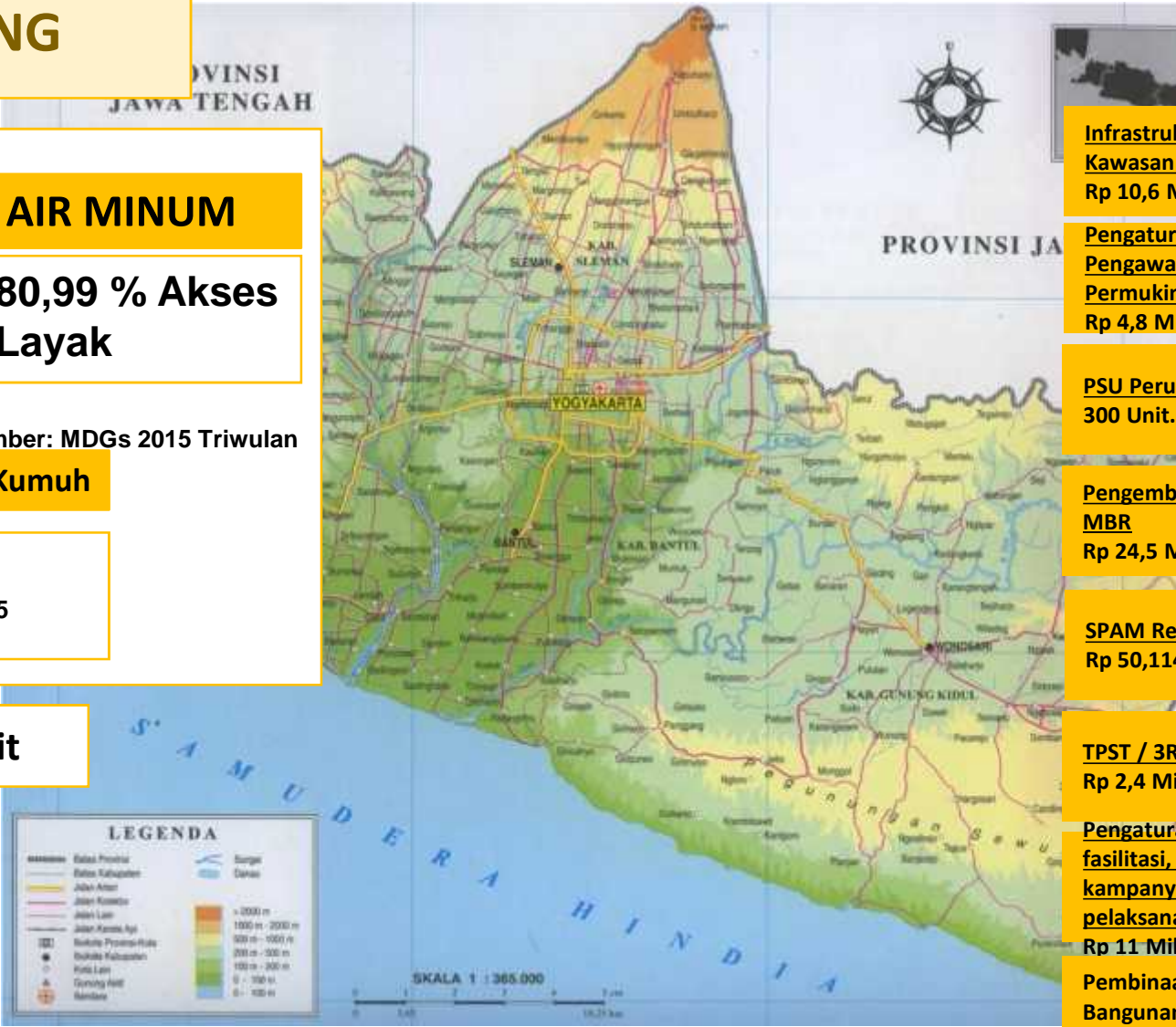
• 80,99 % Akses Layak

Sumber: MDGs 2015 Triwulan III

Rumah Tangga Kumuh

• 2,07 %
Sumber: MDGs 2015 Triwulan III

TPA: 3 Unit



Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan
Rp 10,6 Miliar

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pengembangan Permukiman
Rp 4,8 Miliar

PSU Perumahan
300 Unit. Rp 2,35 Miliar

Pengembangan Jaringan SPAM MBR
Rp 24,5 Miliar

SPAM Regional
Rp 50,114 Miliar

TPST / 3R Skala Komunal
Rp 2,4 Miliar

Pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi pelaksanaan PPLP
Rp 11 Miliar

Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung
Rp 5,1 Miliar

Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan
Rp 247 Miliar

Pembangunan Rusunawa
474 Unit. Rp 122,3 Miliar

Peningkatan Kualitas Swadaya
5000 Unit. Rp 82,5 Miliar

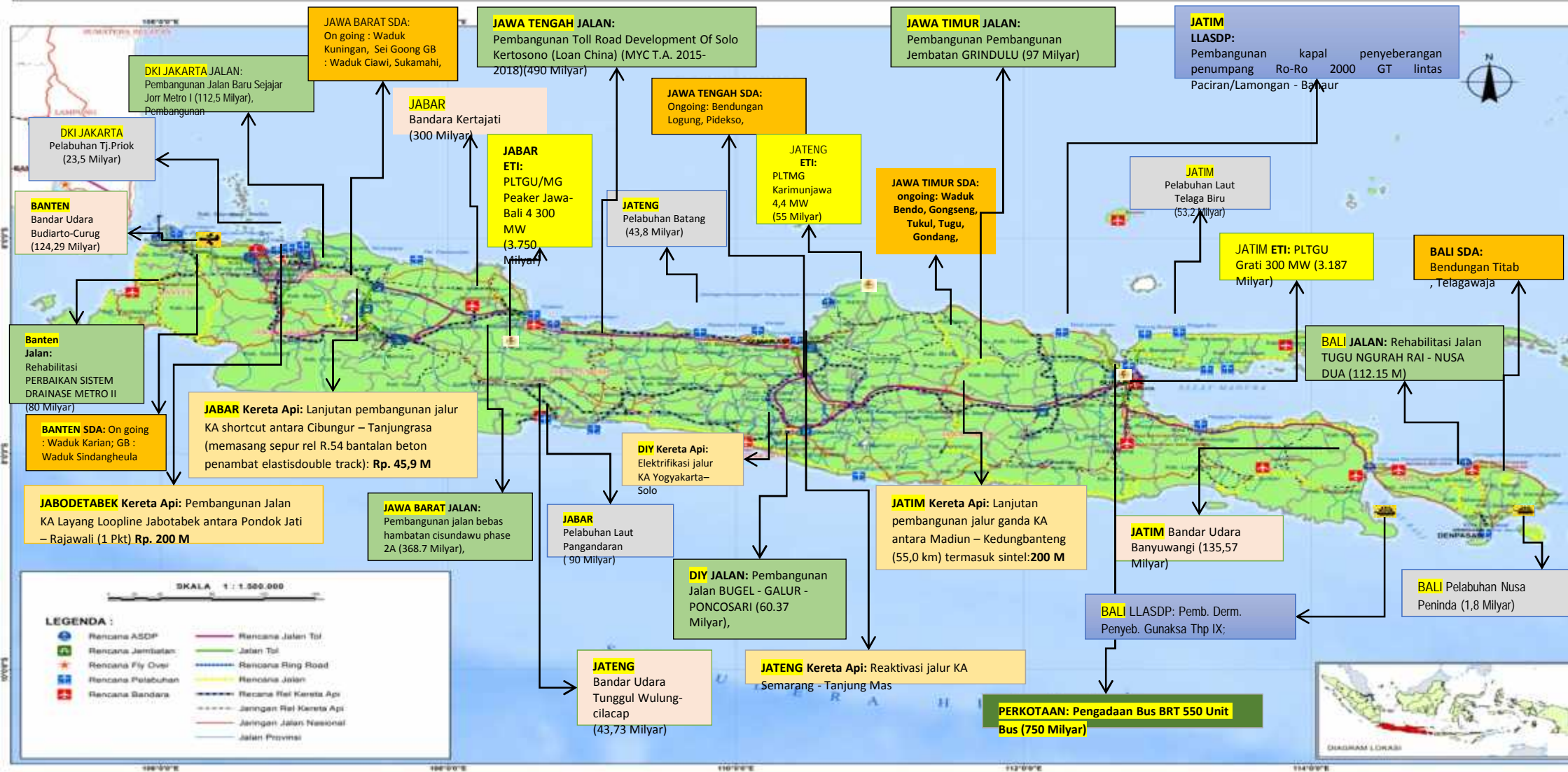
SPAM Ibu Kota Pemukiman Perluasan
Rp 4,5 Miliar

Infrastruktur limbah sistem terpusat skala kawasan, komunal
Rp 36,5 Miliar

Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT)
Rp 3 Miliar

Pengaturan, pembinaan, pengawasan pengembangan air minum
Rp 5,43 Miliar

Peta Infrastruktur Prioritas Pulau Jawa-Bali



SPAM di Ibu Kota Kecamatan (1 kab) dan Pengembangan Jaringan SPAM MBR (4 kab/kota) Rp 64,6 Milyar

Pembangunan Rumah Khusus

104 Unit, Rp 20,42 Milyar

Infrastruktur TPA (1 kab)

Rp 35 Milyar

Infrastruktur Permukiman

Kawasan Perkotaan Rp 168 Milyar

Peningkatan kualitas dan

pembangunan baru rumah

swadaya Rp 54 Milyar

DKI Jakarta

Luas Penanganan Kumuh 1024 hektar (DKI Jakarta)

Infrastruktur drainase Rp 75,5 Milyar

Pembangunan Rusunawa 576 Unit, Rp 121,2 Milyar

Banten

Jawa Barat

Pengelolaan Kumuh Perkotaan (Jawa Barat) di Ibu Kota

Perluasan (7 kab)

di Ibu Kota

(2 kab) dan

Pengembangan Jaringan

SPAM (4 kab) Rp 124,5

Infrastruktur TPA (3 kab)

Rp 124,5

Infrastruktur air limbah

terpusat (4 kab/kota)

Rp 124,5

Infrastruktur Permukiman

Kawasan Perkotaan Rp 216

Pembangunan Rusunawa

192 Unit, Rp 40,4 Milyar

Peningkatan kualitas rumah

swadaya Rp 30,15 Milyar

Peningkatan kualitas rumah

swadaya Rp 30,15 Milyar

SPAM Regional (1 unit), di Ibu Kota Kecamatan (3 kab) dan di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (3 kab/kota), Rp 183,3 Milyar

Infrastruktur TPA (3 kab)

Rp 123,25 Milyar

Infrastruktur air limbah sistem

terpusat (1 kota) Rp 350,3 Milyar

Infrastruktur Permukiman Kawasan

Perkotaan Rp 268 Milyar

Pembangunan Rusunawa Rp 20,2

Milyar

Pembangunan Rumah Swadaya

Rp 26,22 Milyar

Pengembangan Jaringan SPAM MBR (14 kab), Pembangunan SPAM Regional (1 unit), dan di Ibu Kota Kecamatan (3 kab) Rp 163,5 Milyar

Infrastruktur TPA (4 kab/kota) Rp 142,25 Milyar

Infrastruktur air limbah sistem

terpusat (5 kab/kota) dan IPLT (4 kab) Rp 54 Milyar

Infrastruktur Permukiman Kawasan

Perkotaan Rp 276 Milyar

Pembangunan Rusunawa

480 Unit, Rp 101 Milyar

Pembangunan Rumah

Swadaya Rp 26,22 Milyar

Luas Penanganan Kumuh

2957,2 hektar (Jatim)

Jawa Tengah

Yogyakarta

Jawa Timur

SPAM di Ibu Kota Kecamatan (1 kab) dan di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar (2 kab/kota), Rp 44,5 Milyar

Infrastruktur

Permukiman Kawasan

Perkotaan Rp 194 Milyar

Infrastruktur TPA (1 kab)

Rp 40,6 Milyar

Infrastruktur air limbah sistem

terpusat (2 kota/kab) Rp 47

Milyar

Pembangunan Rusunawa 192

Unit, Rp 40,4 Milyar

Peningkatan kualitas rumah

swadaya Rp 30,15 Milyar

Peta Program Prioritas Sektor Perumahan dan Permukiman Pulau Jawa dan Bali

Legenda



Pembangunan Rusunawa



• Pembangunan Rumah Khusus



• Pembangunan Rumah Swadaya



• Pengembangan Jaringan



• SPAM MBR



• SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK)



• SPAM Regional



• SPAM kawasan rawan banjir/perbatasan/pulau terluar



• Infrastruktur Drainase Perkotaan



• Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah



• Infr. Permukiman Kws Perkotaan



Tanpa Skala





Kegiatan Strategis KA Trans Jawa

KegiatanKA	Indikatif 2016 (Milyar)
Pembangunan jalur ganda KA (pemasangan rel) antara Maja – Rangkasbitung (3 Km)	14,9
Pembangunan longsor/ amblesan jalur KA lintas Tanah Abang – Rangkasbitung	38,0
Peningkatan jalur KA (penanggungan tubuh jalan yang ambles) antara Bogor – Cikampek (0,2 Km)	17,0
Pembangunan Jalan KA Layang Loopline Jabotabek antara Pondok Jati – Rajawali (1 Pkt)	200,0
Pembangunan gardu listrik di Jakarta Kota (2x4000 KW, kontrak tahun jamak 2015-2016) (1 unit)	39,6
Pemeliharaan dan Perkuatan Dinding Penahan Tanah Jalan KA Lintas Jakarta Kota – Tanjung Priok	46,97
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara)	1.220,0
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara s/d Bekasi	530,0
Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Bekasi s/d Cikarang)	1.091,1
Pembangunan underpass di Emplasemen Stasiun Tambun dan Stasiun Cibitung (2 unit)	74,0
Pembangunan jalur ganda KA antara Purwokerto – Kroya (26 Km), Jembatan, Terowongan, Emplasemen, dan material	689,0
Pembangunan jalur ganda KA Lintas Selatan Jawa antara Wonokromo - Madiun lintas Surabaya - Madiun (100 km)	590,0
Pembangunan jalur ganda KA antara Madiun – Kedungbanteng (55,0 km) termasuk sintel antara Madiun - Solo	520,0
Pembangunan jalur tram Surabaya (17,0 km) tahap 1	355,9
Pembangunan CTS di sta. Surabaya Pasarturi	70,0

Kegiatan KA	Indikatif 2016 (Milyar)
Penanganan jalur KA rawan longsor/ amblesan km.107 (persiapan relokasi track) lintas Cikampek-Padalarang	3,3
Lanjutan pembangunan jalur KA shortcut antara Cibungur – Tanjunggrasa (memasang sepur rel R.54 bantalan beton penambat elastis double track)	45,0
Pembangunan konstruksi viaduct antara stasiun Bandung -stasiun Kiara condong (RMP)	64,0
Pembangunan jalur ganda dan jembatan KA antara Padalarang - Gedebage(Loan)	317,0
Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjungsari (tahap 1)	36,0
Pembangunan jembatan KA antara Cikampek – Tanjunggrasa	86,0
Persiapan pembangunan jalur KA menuju pelabuhan Cirebon (lahan, AMDAL, Izin, dan anggaran)	192,0
Reaktivasi jalur KA (2,3 km) antara Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Mas:	64,0
Pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa antara Kroya – Kutoarjo (1 Pkt)	519,0
Pembangunan jalur ganda KA (badan jalur) antara Solo – Kedungbanteng(3,6 Km)	15,0
Pemasangan sistem telekomunikasi dan sistem CTS jalur ganda KA antara Tegal - Bojonegoro (1 Pkt): Rp. 66 M	66,0
Pengadaan lahan untuk pembangunan gedung operasional Balai, reaktivasi jalur KA antara Semarang Tawang-Tanjung Mas dan jalur ganda KA antara Solo-Kedungbanteng	10,0
Pemasangan elektrifikasi antara Solo – Yogyakarta – Kutoarjo	500,0



Provinsi D.I. Yogyakarta (1)

o	Kegiatan	Indikatif 2016 (Milyar)
alan		
1.	Pembangunan jalan bugel - galur - poncosari	60,37
2.	Pembangunan jalan samas - kretek	50,75
A		
1.	Pembangunan/peningkatan di slinga	27,0
2.	Rehabilitasi jaringan irigasi di. Wadaslintang	43,78
3.	Pembangunan SPAM regional keburejo	67,0
4.	Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing sungai serayu dan anak sungainya	10,0
5.	Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing sungai bogowonto dan anak sungainya	10,0



Provinsi D.I. Yogyakarta (2)

Kegiatan	Indikatif 2016 (Miliar)
Pembangunan Air Minum	84,5
Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum	5,4
Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman)	24,5
SPAM Regional Kab. Bantul	50,1
SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan (Kab. Bantul, Kota Yogyakarta)	4,5
Kebersihan Lingkungan Permukiman	52,9
Pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi pelaksanaan PPLP (Kota Yogyakarta)	11,0
Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal (Kab. Bantul, Kab. Sleman)	36,5
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab. Gunungkidul)	3,0
TPST/3R skala komunal (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo)	2,4
Pembangunan Permukiman	262,4
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta)	4,8
Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman)	10,6
Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulonprogo, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta)	247,0

No.	Kegiatan	Indikatif 2016 (Miliar)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	5,1
1.	Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung (Kab. Kulonprogo)	5,1
	Penyediaan Perumahan	92,5
1.	Pembangunan Rusunawa (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul)	40,4
2.	PSU Perumahan (Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul)	2,1
3.	Pembangunan Rumah Khusus	6,8
4.	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	13,1
5.	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	30,1



PERKEMBANGAN DATA APBN 1970-2016



Uraian	1970/71	1980/81	1990/91	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Negara dan Hibah	338.6	9,933.3	42,193.0	205,334.5	540,126.1	949,656.10	1,104,902.00	1,310,561.60	1,529,673.1	1,667,140.8	1,635,378.5	1,822,54
Penerimaan Dalam Negeri	338.6	9,933.3	42,193.0	205,334.5	532,671.0	948,149.30	1,101,162.50	1,032,570.20	1,525,189.5	1,665,780.7	1,633,053.4	1,820,51
1. Penerimaan Perpajakan	220.8	2,911.7	22,010.9	115,912.5	351,973.6	742,738.00	850,255.50	989,636.60	1,192,994.1	1,280,389.0	1,264,107.0	1,546,66
2. Penerimaan Bukan Pajak	117.8	7,021.6	20,182.1	89,422.0	180,697.4	205,411.30	250,907.00	277,991.40	332,195.4	385,391.7	386,946.4	273,84
Hibah					7,455.1	1,506.80	3,739.50	825.1	4,483.6	1,360.0	2,325.1	2,03
Bantuan Negara	413.8	10,653.8	39,754.0	221,466.7	565,069.8	1,047,666.00	1,229,558.50	1,435,406.70	1,683,011.1	1,842,495.3	1,876,872.8	1,095,72
Belanja Pemerintah Pusat	380.8	8,894.7	32,866.8	188,391.9	411,667.4	725,243.10	836,578.20	964,997.30	1,154,380.9	1,249,943.0	1,280,368.6	1,325,55
Dana Perimbangan	33.0	1,759.1	6,887.2	33,074.8	146,159.8	306,023.40	334,324.0	399,985.60	444,798.8	487,931.0	516,401.0	700,42
Dana Otonomi Khusus & Penyeimbang						16,399.60	58,656.3	70,423.90	83,831.5	104,621.3	130,640.3	69,74
/Defisit Anggaran (A-B)	(75.2)	(720.5)	2,439.0	(16,132.2)	(24,943.8)	-98,009.90	-124,656.50	(124,020.0)	153,338.0	175,354.5	(241,494.3)	(273,17
Pembiayaan Anggaran	75.2	720.5	(2,439.0)	16,132.2	24,943.8	98,009.90	124,656.50	124,020.00	153,338.0	175,354.5	241,494.3	273,17
Pembiayaan Dalam Negeri	(6.8)	(53.8)	(3,202.6)	5,936.5	29,786.0	1,078,915	125,266.00	125,912.30	172,292.1	196,258.0	254,932.0	272,78
Pembiayaan Luar Negeri	82.0	774.3	763.6	10,195.7	(4,842.2)	-9,881.50	-609.5	-1,892.30	(19,454.2)	(20,903.5)	(13,437.7)	39